



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020



BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang petunjuk teknis, pelaporan dan tata cara reviuinya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat serta penjelasan tentang Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2024. Hal ini merupakan wujud dari keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government*. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 ini, khususnya seluruh Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat serta Tim Perumus yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan selama penyusunan LAKIP ini.

LAKIP ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, namun demikian telah dilakukan upaya untuk memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar SKPD terkait dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi nara sumber. Mudah-mudahan LAKIP Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja instansi pemerintah tahun 2020 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program kegiatan pada tahun berikutnya.

Gerung, 10 Maret 2021

WALIBUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHAUD, S.Ag, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Penyelenggaraan *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024, untuk mewujudkan visi lima tahun kedepan telah ditetapkan 5 misi, 5 tujuan, 12 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 dan salah satu media pertanggungjawaban Bupati selaku Kepala Daerah. LAKIP tidak sekedar hanya alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020, ditetapkan 12 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja dengan pencapaian berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Bab III dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya.

Hasil analisis pencapaian RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019–2024 yakni sebanyak 19 indikator kinerja yang mendukung 12 sasaran strategis, 10 indikator kinerja sasaran mencapai target dengan **Kategori Sangat Baik** dan 10 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target dengan 3 indikator Kinerja dengan **kategori Sangat Baik**, 2 indikator kinerja dengan **Kategori Baik**, 1 indikator dengan **Kategori Kurang** dan 1 indikator kinerja dengan **Kategori Sangat Kurang**, dan 1 indikator yang tidak ada nilai yaitu Gini Ratio, karena pada tahun 2020 indikator tersebut tidak dihitung oleh BPS Lombok Barat. Indikator RPJMD yang belum tercapai yaitu :

- 1) Nilai AKIP Kabupaten dengan kategori B (62,87 %);
- 2) Persentase Wilayah terhubung dengan Pusat Perekonomian dengan capaian sebesar 90,87 %;
- 3) Persentase Pendapatan Asli Daerah dengan capaian sebesar 92,66 %;
- 4) Nilai PDRB Perkapita (ADHK) dengan cpaian sebesar 87,94 %;
- 5) TPT dengan capaian sebesar 56,88 %
- 6) Persentase wilayah yang terhubung dengan moda transportasi;
- 7) Nilai Realisasi Investasi PMA dengan capaian sebesar 16,22 %.

Dalam tahun anggaran 2020, untuk pencapaian 12 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja utama pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2019-2024, telah dianggarkan melalui APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 1.893.671.160.410,53 dengan realisasi sebesar Rp. 1.784.074.477.631,73 atau 94,21 %.

Di samping itu, beberapa prinsip dalam akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan atau pemberi amanah. Sehingga, beberapa upaya dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pada tahun-tahun berikutnya perlu dilakukan beberapa perbaikan yaitu perumusan indikator kinerja daerah maupun indikator kinerja utama pada masing-masing perangkat daerah agar lebih spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki jangka waktu dalam pencapaiannya (*SMART*), termasuk juga di dalamnya terkait penentuan besaran target kinerja agar adanya hasil analisis yang lebih mendalam sehingga pengukuran kinerja pada akhir tahun anggaran dapat memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM.....	2
1.2.1. Geografi dan Iklim.....	2
1.2.2. Demografis.....	4
1.3 PERTUMBUHAN EKONOMI.....	8
1.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	8
1.3.2. Inflasi.....	11
1.4. KONDISI PEMERINTAHAN.....	12
1.5 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN, ISU, DAN SASARAN STRATEGIS.....	18
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.....	28
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	31
2.3 PERJANJIAN KINERJA.....	34
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA	38
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020.....	40
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu.....	43
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.....	52
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional.....	57
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja	59

	serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	
	6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	134
	7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	140
	B. REALISASI ANGGARAN.....	145
BAB IV	: INOVASI DAN PRESTASI KERJA	
	A. INOVASI.....	149
	B. PRESTASI KERJA.....	151
BAB IV	: PENUTUP.....	160
	LAMPIRAN	
	1. Pernyataan telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.	
	2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Lombok Barat.	
	3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.	

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Peta Kabupaten Lombok Barat	2
3.1.	Rekapitulasi Nilai SAKIP Provinsi dan Kab./Kota	65
3.2.	Persentase PNS Kabupaten Lombok Barat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020	143

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
3.1 Angka kemiskinan Kab. Lombok Barat 2017-2018	95
3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Lombok Barat 2008-2020	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Asas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggaraan Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Di sinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Tingkat pemerintah Kabupaten disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

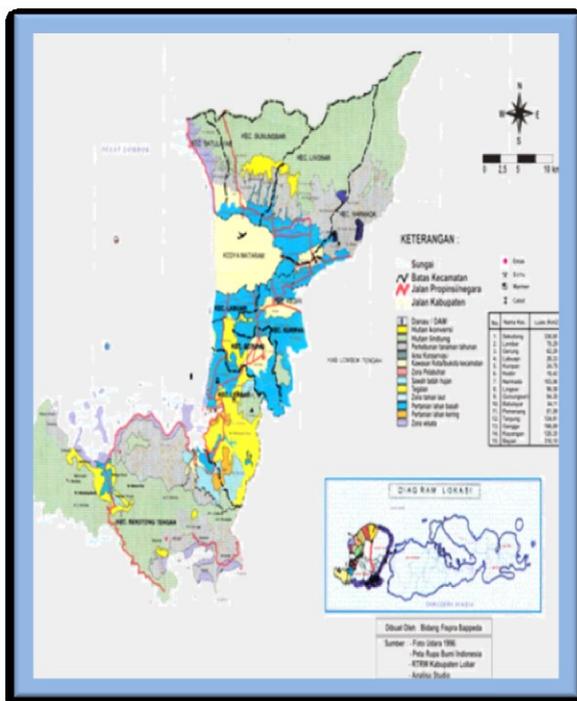
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 ini disusun sehubungan dengan komponen yang keempat dari Sistem AKIP, yaitu pelaporan kinerja.

Sebagai sebuah laporan kinerja, LAKIP ini amat penting artinya sebagai salah satu indikator penilaian laporan pertanggungjawaban Bupati di depan sidang DPRD, di samping juga sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

1.2. GAMBARAN UMUM

1.2.1 Geografi dan Iklim

Gambar 1.1.
Peta Kabupaten Lombok Barat



Kabupaten Lombok Barat berada pada 115,46° – 116,20° Bujur Timur dan 8,25° – 8,55° Lintang Selatan. Sebelah selatan dan barat Kabupaten Lombok Barat berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, sebelah utaranya berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara, dan sebelah timurnya berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu,

Kabupaten Lombok Barat ini mengelilingi Kota Mataram yang merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kabupaten Lombok Barat merupakan kabupaten dengan letak geografis yang menguntungkan. Luas wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah sebesar 1.053,92 km². Sebesar 50,23% dari luas Kabupaten Lombok Barat merupakan wilayah Kecamatan Sekotong, yaitu dengan luas 529,38 km² sedangkan Kecamatan Kuripan merupakan kecamatan yang paling sempit dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat dimana luasnya hanya mencapai 21,56 km².

Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Lombok Barat dikategorikan sebagai berikut :

- a. ketinggian 0 - 100 meter di atas permukaan laut, memiliki luas sebesar 34.800 Ha atau 40,80% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- b. ketinggian 100-500 meter, memiliki luas wilayah sebesar 40.966 Ha atau 48% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- c. ketinggian 500-1000 meter memiliki luas wilayah 8.650 Ha atau 10,1% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat, dan
- d. ketinggian 1000 meter keatas seluas 885 Ha atau 1,0% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Sedangkan tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Lombok Barat sangat bervariasi dan di klasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelas kemiringan sebagai berikut :

- a. Tingkat kemiringan 0-2 % merupakan tingkat kemiringan yang paling luas mencapai sekitar 31.841 Ha atau 37,3 % dari luas Kabupaten Lombok Barat;
- b. Tingkat kemiringan 2-15 % mencapai seluas 10.657 Ha atau 12,5 % dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- c. Tingkat kemiringan 15-40 % seluas 25.920 Ha atau 30,3 % dari luas Kabupaten Lombok Barat dan

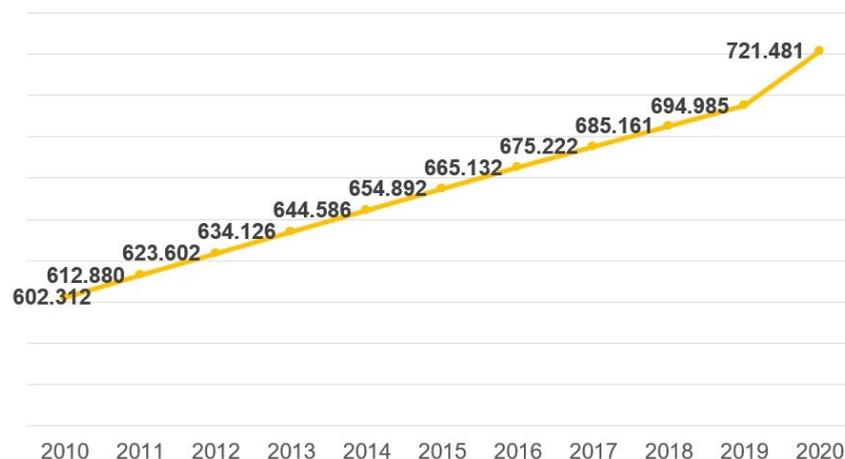
- d. Tingkat kemiringan lahan 40 % keatas seluas 16.883 Ha atau 19,8 % dari luas Kabupaten Lombok Barat dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.

1.2.2 Demografis

1.2.2.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan, penduduk merupakan aset potensial bagi pembangunan. Penduduk yang besar dapat dimanfaatkan untuk proses pembangunan, memungkinkan penggalan sumberdaya alam yang dimiliki, memacu pemerintah untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana social ekonomi, serta merupakan pasar potensial bagi berbagai produk. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat sebesar 721.481 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Lombok Barat dari tahun 2010 sampai dengan 2020 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1.2.
Perkembangan Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2010-2020

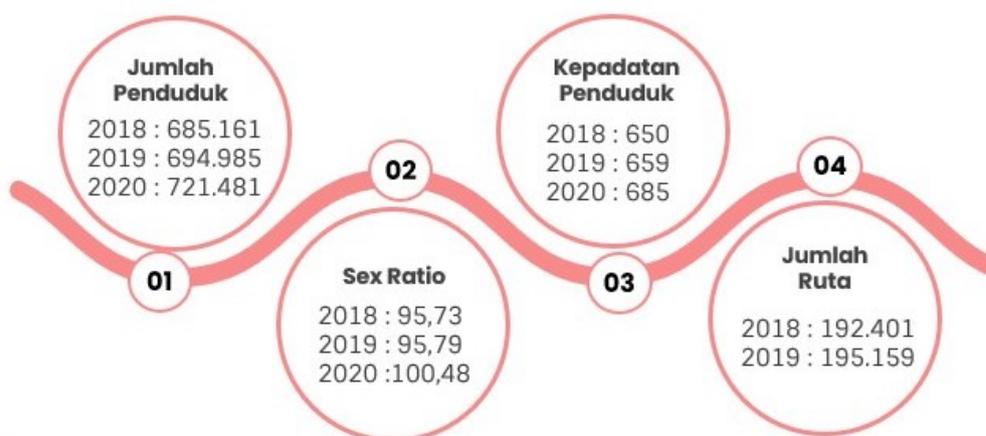


1.2.2.2 Kepadatan Penyebaran Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk sepanjang 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Lombok Barat sebesar 1,80 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk terjadi karena dipengaruhi factor kematian, kelahiran dan migrasi. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk

Lombok Barat masih lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2020 yaitu sebesar 1,63 Persen.

Gambar 1.3. Indikator Kependudukan Kab. Lombok Barat Tahun 2018-2020



Sumber : BPS Lombok Barat, 2020

Sex rasio di Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 sebesar 100,48 yang artinya penduduk Laki-laki di Lombok Barat lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan, yaitu dengan rincian Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 361.610 jiwa dan 359.871 jiwa berjenis kelamin perempuan. Jumlah rumah tangga di Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 sebanyak 195.159 rumah tangga. Selanjutnya Kecamatan Narmada merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak 14,22%, sedangkan Kecamatan Kuripan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit 5,80%. Kecamatan Gerung dan Labuapi memiliki jumlah penduduk laki-laki yang lebih rendah daripada perempuan, sehingga Kecamatan Gerung dan Labuapi yang sex ratio-nya kurang dari 100,00 sedangkan kecamatan lainnya berada diatas 100,00.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Menurut Kecamatan 2020

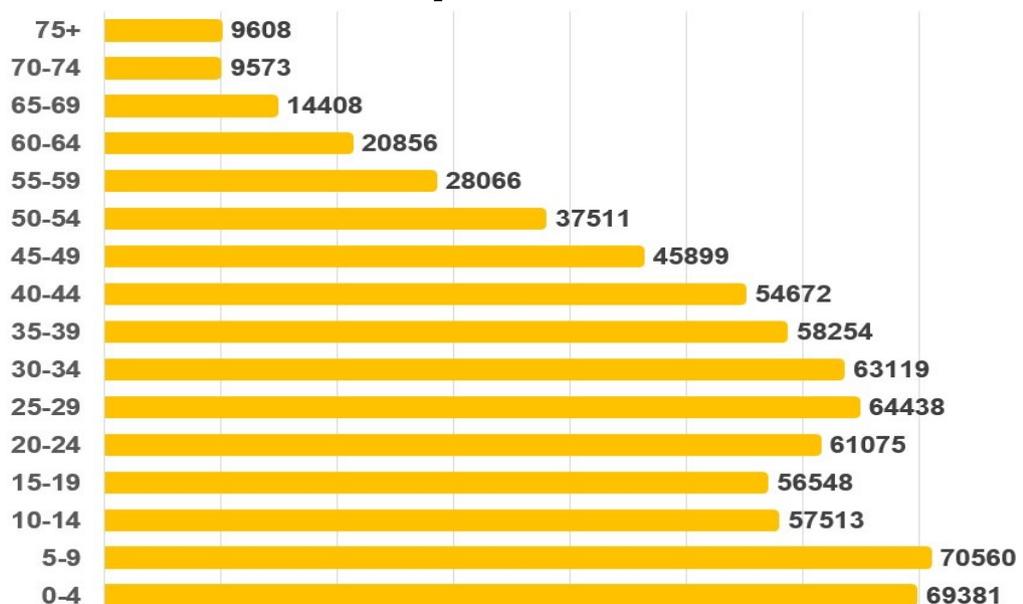
Kecamatan	Penduduk laki-Laki	Penduduk Perempuan	Penduduk Total (ribu)
Sekotong	33,49	32,68	66,17
Lembar	27,22	27,19	54,41
gerung	44,34	45,26	89,6

Kecamatan	Penduduk laki-Laki	Penduduk Perempuan	Penduduk Total (ribu)
Labuapi	39,45	39,51	78,96
Kediri	31,77	31,71	63,49
Kuripan	21,03	20,78	41,81
Narmada	51,68	50,95	102,63
Lingsar	38,11	37,68	75,8
Gunung Sari	47,51	47,48	95,00
Batu Layar	27	26,62	53,62
Lombok Barat	361,61	359,87	721,48

Sumber : BPS Lombok Barat, 2021

Jika dilihat dari sisi kelompok umur, jumlah penduduk seperti halnya piramida, dimana pada umur muda jumlah penduduk lebih besar daripada jumlah penduduk usia tua. Penduduk usia produktif memang mendominasi di Lombok Barat, dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan penduduk usia lanjut. Besarnya penduduk usia 0 hingga 19 tahun dapat disikapi oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan terutama dalam hal pendidikan. Karena penduduk usia tersebut berada pada usia sekolah, apabila mereka tidak memperoleh pendidikan yang layak maka kualitas SDM Lombok Barat akan rendah.

Gambar 1.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Menurut Kelompok Umur Tahun 2020



Sumber : BPS Lombok Barat, 2020

Rasio beban tanggungan (*dependancy ratio*) Kabupaten Lombok Barat dalam empat tahun terakhir berkurang menjadi 47,11 persen. Dependency Ratio 47,11 persen artinya dari 100 penduduk usia produktif harus menanggung 47 penduduk usia non produktif. Penduduk usia produktif di Lombok Barat lebih banyak menanggung penduduk usia 0-14 daripada penduduk usia 65 tahun keatas.

Tabel 1.2. Rasio Beban Tanggungan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2020

Jumlah Penduduk menurut umur	2017	2018	2019	2020
0 - 14	195.908	197.394	198.719	197.454
15 - 64	447.351	454.640	461.858	490.438
>=65	31.963	33.117	34.408	33.589
<i>Dependency Ratio</i>	50,94	50,70	50,48	47,11

Sumber : BPS Lombok Barat, 2020

Kepadatan Penduduk Kabupaten Lombok Barat terus mengalami peningkatan, mencapai 685 jiwa/km² di tahun 2020. Kecamatan Kediri merupakan kecamatan terpadat di Lombok Barat. Dengan luas wilayah hanya sebesar 21,64 km² kepadatan penduduk di Kecamatan Kediri mencapai 2.934 jiwa/km². Beberapa kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram menjadi kawasan pemukiman penyangga, yaitu Kecamatan Labuapi, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada, Kecamatan Lingsar, dan Kecamatan Batulayar. Sebagai kecamatan penyangga, kepadatan penduduk di lima kecamatan tersebut juga memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Status sebagai kecamatan penyangga secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian daerah tersebut.

Tabel 1.3. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Kepadatan (jiwa/Km)
1	Sekotong	529,38	125
2	Lembar	62,66	868
3	Gerung	62,3	1438
4	Labuapi	28,33	2787

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Kepadatan (jiwa/Km)
5	Kediri	21,64	2934
6	Kuripan	21,56	1939
7	Narmada	107,62	954
8	Lingsar	96,58	785
9	Gunungsari	89,74	1059
10	Batulayar	34,11	1572
Lombok Barat		1.053,93	685

Sumber : BPS Lombok Barat, 2021

1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Selma Periode Tahun 2020 laju perekonomian Kabupaten Lombok Barat tidak stabil. Hal ini disebabkan karena peristiwa Pandemi Covid-19. Apabila survey dilakukan pada saat pandemic covid-19, maka angka TPT di Lombok Barat kemungkinan akan lebih tinggi dari angka yang dipublish saat ini. Sebagaimana diketahui, kontraksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II dan kuartal III tahun 2020 menyebabkan terjadinya peningkatan pengangguran terbuka. Sektor yang paling banyak kehilangan pekerja adalah sektor perdagangan, industri manufaktur, konstruksi, jasa perusahaan, dan akomodasi serta makanan dan minuman (pariwisata). Pada tingkat nasional, Bappenas memperkirakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2020 akan mencapai 8,1-9,2 persen. Jumlah tersebut jauh di atas realisasi 2019 yang mencapai 5,28 persen. Sedangkan pada 2021 diperkirakan mencapai 7,7 hingga 9,1 persen. Untuk itu, Pemerintah Pusat akan menjalankan strategi untuk memulihkan kembali ekonomi Indonesia, mendorong bertumbuhnya kewirausahaan hingga pembangunan infrastruktur sederhana di pedesaan yang bersifat padat karya, dengan harapan TPT bisa dikembalikan (jumlah pengangguran dan TPT) setidak-tidaknya mendekati sebelum pandemic.

1.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar

kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatau periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. PDRB harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Harga konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar. Tahun dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.

Berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik Lombok Barat, PDRB per kapita (ADHK) di Lombok Barat pada tahun 2020 sebesar Rp 14.032.000,00 per kapita, menurun dari tahun 2019 sebesar Rp 15.676.920,00 per kapita, dan masih lebih rendah dari target yang ditetapkan pada RKPD sebesar Rp 17.830.000,- dengan capaian sebesar 78,69 persen. Nilai PDRB per kapita Lombok Barat (ADHK) mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017, dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018 akibat gempa bumi yang melanda Pulau Lombok, dan meningkat kembali pada tahun 2019, dan menurun drastis pada tahun 2020 sebagai dampak pandemic Covid-19. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar Rp 14,15 juta rupiah. Secara nominal terus

mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 15,45 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2018 sedikit menurun menjadi 15,31 juta rupiah dan meningkat kembali menjadi 15,68 juta rupiah pada tahun 2019, dan sebesar 14,03 juta tahun 2020. Perubahan angka PDRB per kapita atas harga konstan tidak dipengaruhi oleh factor inflasi.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lombok Barat masih berada dibawah nilai PDRB per kapita di Nusa Tenggara Barat yang pada tahun 2020 mencapai angka 17,53 juta rupiah atau masih terdapat selisih sebesar 2,86 juta rupiah. PDRB per kapita (ADHK) di Kabupaten Lombok Barat dan Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan 2018-2020

Lapangan Usaha		2018	2019	2020
1		2	3	4
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,79	1,07	0,86
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,37	6,20	-4,05
C	Industri Pengolahan	-2,12	4,96	-0,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,28	9,88	6,67
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	4,92	5,61
F	Konstruksi	-1,45	8,54	-20,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,61	7,25	-6,50
H	Transportasi dan Pergudangan	5,03	1,02	-16,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9,97	-2,47	-36,49
J	Informasi dan Komunikasi	4,99	4,08	10,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,98	1,58	17,11
L	Real Estat	-2,46	4,72	0,46
M,N	Jasa Perusahaan	-6,72	3,70	-10,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,89	1,79	-1,45
P	Jasa Pendidikan	3,70	5,27	0,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,37	6,05	0,98
R,S,T, U	Jasa lainnya	-4,77	3,27	-8,54
Produk Domestik Regional Bruto		0,57	3,84	-7,08

Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Barat 2020

*) angka sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan data tersebut, 3 sektor yang dominan kontribusinya terhadap PDRB adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Kontruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tetap menjadi sektor utama dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB dari tahun ke tahun.

1.3.2. Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah yang menggambarkan tingkat harga rata - rata barang/jasa kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi menunjukkan harga rata-rata barang/jasa kebutuhan yang tinggi. yang berdampak terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat begitu pula sebaliknya. Indikator yang digunakan untuk melihat seberapa jauh perubahan harga adalah Indeks Harga Implisit (IHI). Indeks harga implisit menggambarkan tingkat perubahan harga umum (inflasi) seluruh komoditi baik barang maupun jasa dari seluruh kegiatan ekonomi mulai dari sektor pertanian sampai dengan sektor jasa-jasa yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 1.5
Perkembangan Laju Indeks Harga Implisit Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 – 2016

Tahun	Indeks Harga Implisit (IHI)	Laju Perubahan IHI/ Inflasi	Laju PDRB Per Kapita	
			ADH Berlaku	ADH Konstan
1	2	3	4	5
2011	103.09	3.09	8.23	6.05
2012	106.37	3.19	7.36	5.27
2013	109.09	2.55	6.68	5.26
2014*	115.71	6.07	7.69	5.48
2015**	122.72	6.06	11.06	6.39
2016**	129.32	4.67	8.97	4.10

Sumber data : Buku PDRB Kabupaten Lombok Barat 2017

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

Selama periode tahun 2011 – 2016, laju perubahan IHI atau inflasi selalu berada pada level yang lebih rendah dibandingkan laju perubahan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku. Hal ini mengindikasikan selama periode tersebut kemampuan daya beli masyarakat adalah cukup baik dan cenderung meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara nyata nilai tambah per penduduk Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan. Demikian halnya dengan data laju perubahan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang senantiasa bernilai positif. Semakin menguatkan keadaan ekonomi masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang semakin baik.

1.4. Kondisi Pemerintahan

Secara administrative, Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tahun 2020 terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu: Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lembar, Kecamatan Gerung, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Narmada, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gerung merupakan ibu kota kabupaten sekaligus sebagai pusat pemerintahan. Kecamatan Narmada memiliki jumlah desa dan dusun terbanyak yaitu 21 desa, dengan 133 dusun. Kecamatan Kuripan sebagai kecamatan dengan jumlah desa dan dusun paling sedikit yaitu 6 desa, 40 dusun. Tabel berikut menyajikan secara rinci jumlah desa/kelurahan serta luas wilayah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Lombok Barat sampai tahun 2020.

Tabel 1.6. Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020

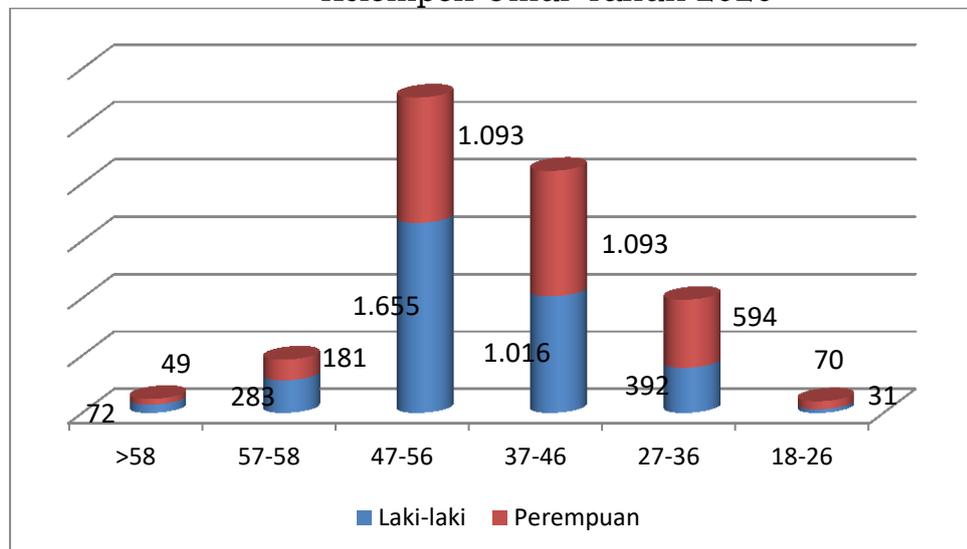
No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Dusun	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Sekotong	9	106	529,38	50,23
2	Lembar	10	87	62,66	5,95
3	Gerung	11/3	71	62,30	5,91
4	Labuapi	12	73	28,33	2,69
5	Kediri	10	74	21,64	2,05
6	Kuripan	6	40	21,56	2,05
7	Narmada	21	133	107,62	10,21
8	Lingsar	15	94	96,58	9,16
9	Gunungsari	16	103	89,74	8,51

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Dusun	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
10	Batulayar	9	63	34,11	3,24
Jumlah		119/3	844	1.053,92	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat 2020

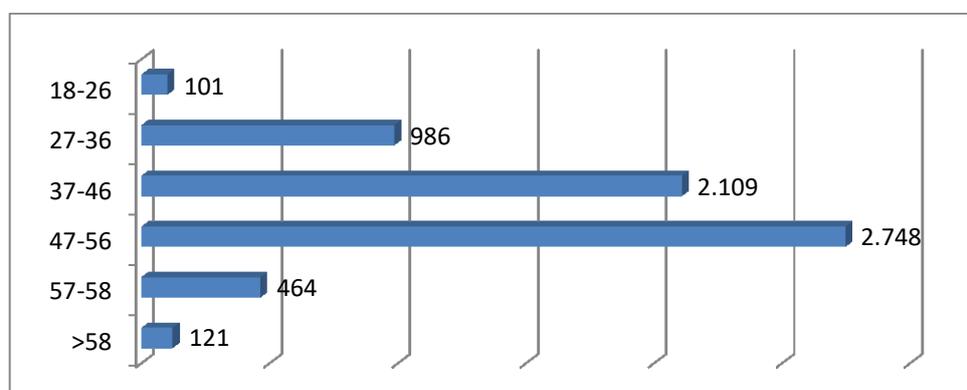
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2019 sebanyak 6.529 pegawai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah PNS di Kabupaten Lombok Barat menurun sebesar 3,47 persen, dimana tahun sebelumnya 6.764 pegawai. Dilihat dari sisi jenis kelamin, 3.449 PNS laki-laki atau 52,83 persen, dan 3.080 PNS perempuan atau 47,17 persen.

Gambar 1.5. PNS Lombok Barat Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2020



Sumber : BKDPSDM Kabupaten Lombok Barat, 2020

Gambar 1.6. PNS Lombok Barat Berdasarkan Usia Tahun 2020



Sumber : BKDPSDM Kabupaten Lombok Barat, 2020

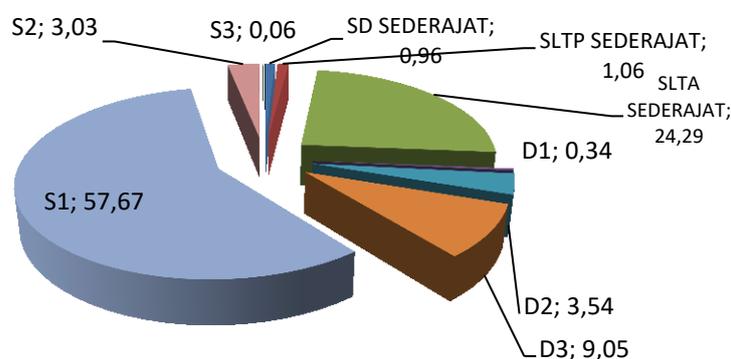
Kelompok usia 47-56 tahun mendominasi jumlah PNS berdasarkan usia, disusul dengan kelompok usia 37-46 tahun. Dari gambar di atas, dapat disimpulkan mayoritas PNS di Lombok Barat mayoritas di umur 47-56 tahun, dengan persentase 42,09%. Dengan adanya perbedaan usia yang jauh tersebut, menjadi tantangan bagi PNS generasi muda untuk dapat melakukan terobosan dalam pelayanan publik dan masyarakat dengan jumlah PNS yang terbatas. Birokrasi harus siap melakukan regenerasi agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan optimal.

Tabel 1.7. Jumlah PNS Kabupaten Lombok Barat Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	L	P	JML
1	SD SEDERAJAT	58	5	63
2	SLTP SEDERAJAT	62	7	69
3	SLTA SEDERAJAT	1.037	549	1.586
4	D1	6	16	22
5	D2	123	108	231
6	D3	166	425	591
7	S1	1.856	1.909	3.765
8	S2	138	60	198
9	S3	3	1	4
JUMLAH		3.449	3.080	6.529

Sumber : BKDPSDM Kabupaten Lombok Barat, 2020

Gambar 1.7. Persentase PNS Kabupaten Lombok Barat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020



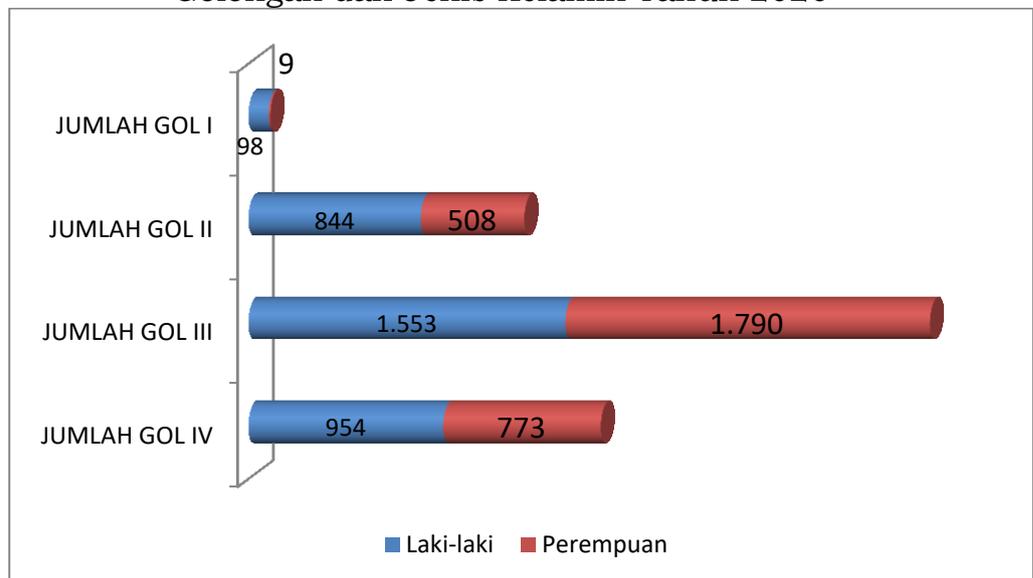
Sumber : BKDPSDM Kabupaten Lombok Barat, 2020

Jenjang pendidikan Sarjana merupakan tingkat pendidikan yang mendominasi PNS dengan persentase sebesar 57,67% seperti

gambar 5 di atas. Pada gambar 6 di bawah, dapat terlihat detail pendidikan lulusan Strata-1 mendominasi jumlah Pendidikan terbanyak. Lulusan SMA atau sederajat menjadi tingkat pendidikan kedua tertinggi dengan jumlah 1.586 orang, disusul dengan lulusan Diploma 3 sebanyak 591 orang dan Diploma 2 sebanyak 231 orang. Patut disyukuri, bahwa birokrasi di Lombok Barat juga memiliki kualifikasi Sumberdaya Manusia dengan jenjang pendidikan tertinggi (S3) yaitu sebanyak 4 orang doctor.

Golongan III merupakan Golongan dominan dari PNS yaitu sebanyak 51,20% dari total PNS atau berjumlah 3.343 PNS, disusul dengan Golongan IV sebesar 26,45% atau 1.727 dari seluruh PNS. Sedangkan Golongan I berjumlah 1,64% dari total PNS. Besarnya persentase Golongan III memiliki kaitan dengan tingkat pendidikan D-IV/S-1 yang merupakan tingkat pendidikan terbanyak yang dimiliki oleh PNS sesuai pada Gambar di atas.

Gambar 1.8. Jumlah PNS Kabupaten Lombok Barat Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber : BKDPSPDM Kabupaten Lombok Barat, 2020

PNS eselon IV a dengan golongan III mendominasi PNS dengan jumlah 478 orang, diikuti PNS eselon IV b dengan jumlah 87 orang, dan PNS eselon III b golongan IV dengan jumlah 86 orang. Data PNS Kabupaten

Lombok Barat tahun 2020 berdasarkan golongan dan eselon secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.8. Data PNS Kabupaten Lombok Barat Menurut Golongan Dan Eselon Tahun 2020

NO	GOL	ESELON								STAF	TOTAL
		IIA	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVB	V	JML		
1	IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IV/d	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	IV/c	-	24	-	-	-	-	-	24	1	25
4	IV/b	-	5	38	15	4	-	-	62	3	65
5	IV/a	-	-	16	71	37	4	-	128	11	139
JMLH GOL IV		1	29	54	86	41	4	-	215	15	230
6	III/d	-	-	3	30	308	18	-	359	62	421
7	III/c	-	-	-	1	138	15	-	154	66	220
8	III/b	-	-	-	-	32	30	-	62	235	297
9	III/a	-	-	-	-	-	24	-	24	677	701
JMLH GOL III		-	-	3	31	478	87	-	599	1.040	1.639
JML ESL & STAF		1	29	57	117	519	91	-	814	1.055	1.869

Sumber : BKDPSPDM Kabupaten Lombok Barat, 2020

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.9
Organisasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2020

NO	NAMA DINAS/BADAN/KANTOR	TIPE	ESELONERING PP NO. 18 TAHUN 2016								JUMLAH
			II		III		IV		V		
			a	b	a	b	A	b	A	b	
1	Sekretariat Daerah (<i>termasuk Staf Ahli</i>)	A	1	6	10	0	27	30	-	-	47
2	Sekretariat DPRD	A	-	1	4	0	12	0	-	-	17
3	Inspektorat Kabupaten	A	-	1	6	0	3	0	-	-	10
DINAS DAERAH											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A	-	1	1	5	18	0	-	-	25
5	Dinas Kesehatan	A	-	1	1	4	15	0	-	-	21

NO	NAMA DINAS/BADAN/KANTOR	TIPE	ESELONERING PP NO. 18 TAHUN 2016								JUMLAH
			II		III		IV		V		
			a	b	a	b	A	b	A	b	
6	Dinas Sosial	A	-	1	1	4	15	0	-	-	21
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A	-	1	1	5	18	0	-	-	25
8	Dinas Perumahan dan Pemukiman	A	-	1	1	3	12	0	-	-	17
9	Satuan Polisi Pamong Praja	A	-	1	1	3	12	0	-	-	17
10	Dinas Pemadam Kebakaran	C	-	1	1	2	6	0	-	-	10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
11	Dinas Perhubungan	A	-	1	1	4	11	0	-	-	17
12	Dinas Komunikasi Informatika <i>(termasuk urusan Persandian dan Statistik)</i>	A	-	1	1	4	15	0	-	-	21
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	-	1	1	4	15	0	-	-	21
14	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	A	-	1	1	4	15	0	-	-	21
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan <i>(penggabungan 2 urusan)</i>	A	-	1	1	3	9	0	-	-	14
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A	-	1	1	4	15	0	-	-	21
17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A	-	1	1	4	15	0	-	-	21
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B	-	1	1	3	11	0	-	-	16
19	Dinas Lingkungan Hidup <i>(termasuk urusan Kehutanan)</i>	A	-	1	1	4	15	0	-	-	21
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	C	-	1	1	2	8	0	-	-	12
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
21	Dinas Pariwisata	A	-	1	1	4	15	0	-	-	21
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	A	-	1	1	3	12	0	-	-	17
23	Dinas Pertanian	A	-	1	1	6	21	0	-	-	29
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A	-	1	1	4	15	0	-	-	21
25	Dinas Ketahanan Pangan	B	-	1	1	3	8	0	-	-	13
26	Dinas Tenaga Kerja <i>(termasuk urusan Transmigrasi)</i>	B	-	1	1	3	11	0	-	-	16
UNSUR PENUNJANG (BADAN DAERAH)											
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah <i>(termasuk urusan Penelitian dan Pengembangan)</i>	A	-	1	1	4	15	0	-	-	21
28	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	B	-	1	1	3	11	0	-	-	16
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A	-	1	1	4	15	0	-	-	21
30	Badan Pendapatan Daerah	A	-	1	1	4	11	0	-	-	17
MENUNGGU PP TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	1	1	4	11	0	-	-	17
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	1	-	4	9	0	-	-	14
KECAMATAN / KELURAHAN / UPT											

NO	NAMA DINAS/BADAN/KANTOR	TIPE	ESELONERING PP NO. 18 TAHUN 2016								JUMLAH
			II		III		IV		V		
			a	b	a	b	A	b	A	b	
33	Kecamatan (10 Kecamatan)	A	-	-	10	10	50	20	-	-	90
34	Kelurahan (3 Kelurahan)	-	-	-	-	0	3	15	-	-	18
35	UPTD						79	79			158
36	RSUD				1	5	11				17
JUMLAH			1	37	59	123	567	114	0	0	901

<i>Eselonering Menurut PP 41 Th 2007</i>	II		III		IV		V		JLH
	A	B	A	B	A	B	A	B	
	1	34	56	112	448	45	0	0	

<i>Eselonering Menurut PP 18 Th 2016</i>	II		III		IV		V		JLH
	A	B	A	B	A	B	A	B	
	1	37	59	123	567	114	0	0	

<i>SELISIH</i>	II		III		IV		V		+ / -
	A	B	A	B	A	B	A	B	
	0	3	3	11	119	69	0	0	

Sumber : Bagian Ortal Sekretariat Daerah Kab. Lombok Barat, 2020

1.5. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN, ISU DAN SASARAN STRATEGIS

Permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh masyarakat Lombok Barat secara umum adalah bagaimana membangun masyarakat yang unggul dan mandiri melalui pendidikan dan kesehatan, bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata, mengurangi tingkat kemiskinan, melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum, meningkatkan pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

a. Masyarakat yang Unggul dan Mandiri

1. Sektor pendidikan sebagai salah satu komponen pendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memegang peran sentral

bersama-sama dengan sektor kesehatan dan ekonomi. Kondisi saat ini masih relatif rendahnya rata-rata lama sekolah yang pada tahun 2018 berada pada angka 6,16 tahun dan partisipasi murni yang belum mencapai 100%, serta menurunnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan akibat terjadinya gempa bumi tahun 2018.

2. Dibiidang kesehatan ada beberapa indikator yang menjadi prioritas permasalahan serius seperti angka kematian bayi tercatat 1,75 % pada tahun 2018, angka kematian ibu 36,14 serta predikat provinsi NTB sebagai daerah peringkat ke 2 untuk tingkat stunting di Indonesia dengan kondisi di Lombok Barat 28,96 % serta masih tingginya kasus TBC. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta kasus HIV AIDS meningkat, hal ini terjadi karena meningkatnya intensitas migrasi sosial antar daerah, antar negara. Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu tujuan wisata dan tingginya *turnover* TKI/TKW.
3. Pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai budaya serta kearifan lokal dalam pembangunan belum optimal. Budaya dan kearifan lokal yang ada masih sebatas *event*, festival, temu budaya atau pameran tapi belum secara sistematis diaktualisasi dalam program pembangunan.

b. Masyarakat yang Sejahtera

1. Pelayanan transportasi dalam rangka mewujudkan keamanan dan kenyamanan moda angkutan hanya mampu melayani 58% wilayah Lombok Barat serta belum memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah sehingga tertata dengan baik.
2. Rasio jaringan irigasi yang ada saat ini hanya 0,17% belum menjangkau seluruh areal pertanian yang ada, begitu juga halnya dengan sumber daya kemasyarakatan untuk penyediaan sumber

air baku dan konservasi sumber mata air yang baru mencapai 10,89% sehingga perlu perhatian serius untuk meningkatkan program ini.

3. Terkait dengan tata ruang, pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan belum optimal dilaksanakan serta tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan.

c. Kemiskinan

1. Ketimpangan struktur ekonomi daerah dari sektor pertanian ke sektor jasa belum berkembang. Sejalan dengan berkembangnya sektor jasa, sector produksi mendapat tantangan yang kuat terutama dari para pesaing dari luar daerah. Sektor industri perlu ditopang dengan pengembangan keterampilan, bantuan modal dan pemasaran sehingga dapat bersaing dan mempunyai nilai tambah terhadap perekonomian daerah.
2. Pengembangan produk olahan lokal masih kurang, hal ini memerlukan dukungan pengembangan teknologi proses, dan pengolahan serta strategi pemasaran yang baik.
3. Ketimpangan pertumbuhan antar kawasan, antar kecamatan. Beberapa indikator yang menunjukkan ketimpangan tersebut antara lain disparitas angka kemiskinan, ketimpangan pelayanan sosial dasar yang tersedia seperti pendidikan, kesehatan, akses informasi dan infrastruktur.

d. Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum

1. Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara Masyarakat Sipil, DPRD, Partai Politik dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal.

2. Kualitas pelayanan publik belum optimal sehingga perlu pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi, elektronik dan internet (*electronic Government, e-Gov*) serta perlu peningkatan implementasi *Good Governance*.
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebanyak 15 (lima belas) bidang urusan masih belum optimal di implementasikan terkait kendala standar yang ditetapkan dari pusat terlalu tinggi dan daerah masih belum mampu merealisasikan target SPM tersebut. Hal ini terkendala alokasi dana yang ada.
4. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum sepenuhnya dapat menerapkan produk hukum dalam bentuk perda dengan baik. Sampai saat ini telah tercatat ditangani sebanyak 82,35 %.

e. Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah

1. Sampai saat ini investasi dan Penanaman Modal Asing baru mencapai USD 833.175 dan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 780 milyar lebih. Angka ini jika dibandingkan dengan potensi investasi Lombok Barat baik dalam hal pariwisata, pertanian, jasa maupun industri lainnya masih belum optimal.
2. Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan hingga saat ini baru mencapai 3,31% dengan jumlah pelaku industri 9.357. Kondisi ini masih dibawah potensi sektor industri dan perdagangan yang ada di Kabupaten Lombok Barat sehingga perlu perhatian yang lebih optimal mengembangkan sektor tersebut.
3. Untuk ketersediaan pangan dengan sasaran tercapainya diversifikasi pangan berkualitas dan berkelanjutan sampai saat ini masih menempati skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 72,30%. Seharusnya Kabupaten Lombok Barat dengan potensi yang ada dapat mencapai skor 74%.

4. Sektor pertanian merupakan sektor basis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat yang menyumbang 22,64% distribusi pendapatan. Angka tersebut masih dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi jika sektor ini dapat dikelola dengan baik untuk mendapatkan produktifitas yang tinggi.
5. Produksi sektor perikanan dan kelautan sampai saat ini mencapai 100.503 ton lebih. Angka yang masih relatif kecil jika dibandingkan dengan luas lahan dan potensi yang ada, hal ini disebabkan masih kurang optimalnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya.
6. Memperhatikan kondisi saat ini rasio elektrifikasi rumah tangga baru mencapai 41,30% dan rumah tangga yang menggunakan air bersih 53,51%, masih dibawah kondisi yang diharapkan, hal ini disebabkan masih kurangnya daya dukung dan ketersediaan energi listrik yang ada. Kondisi lainnya, masih banyak terdapat daerah-daerah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih

f. Lingkungan Hidup

1. Kondisi Kabupaten Lombok Barat memiliki kerawanan bencana alam geologi yang cukup tinggi, pemicu terjadinya bencana geologi diantaranya gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir bandang, tanah longsor dan lainnya; Dari 10 kecamatan yang ada, 9 kecamatan dinyatakan rawan longsor, dan rawan banjir di beberapa kecamatan serta Bencana Tsunami di Kecamatan Sekotong dan Lembar.
2. Masih luasnya lahan kritis yang belum tertangani yaitu mencapai 19.709,51Ha. Kondisi tersebut diperparah dengan tingkat konversi lahan hutan yang masih tinggi serta adanya illegal logging, perambahan hutan, kebakaran hutan serta bencana alam mengakibatkan penurunan kualitas (degradasi) sumberdaya

hutan dan lahan, serta menurunnya debit air dan berkurangnya sumber mata air.

3. Penambangan emas ilegal di dalam kawasan hutan Sekotong dipastikan akan mempercepat kerusakan ekosistem kawasan tersebut serta limbah merkuri yang ditimbulkan akan mencemari ekosistem laut sekitarnya.
4. Meningkatnya kebutuhan galian non logam (pasir, batu, tanah urug) akibat pesatnya kebutuhan pembangunan akan berpotensi kerusakan dan kelestarian alam.
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan masih kurang pedulinya masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara mandiri mengakibatkan terancamnya pencemaran lingkungan. Sampai saat ini pemerintah daerah belum mampu mengimbangi keterangkutan dan pengolahan sampah dengan pengelolan sampah hanya 8,20 persen.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya-upaya konservasi sumberdaya alam serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, di tambah dengan adanya praktik illegal logging yang semakin memperparah kondisi lingkungan yang harusnya dijaga.

g. Kependudukan

1. Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia. Tercatat jumlah penduduk lansia usia 65 tahun ke atas terus meningkat dengan persentase sebesar 64,5 persen.
2. Ketimpangan persebaran penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan

birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis. Kecamatan Sekotong yang memiliki luas wilayah 529,38 km² (50,23% luas Kabupaten Lombok Barat) kepadatannya hanya 99 jiwa/km². Sementara Kecamatan Kediri dengan luas wilayah hanya 21,64 km² ditempati oleh 2.754 jiwa/km².

3. Pertambahan penduduk di Kabupaten Lombok Barat grafiknya cenderung meningkat sehingga akan berdampak pada tingginya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar. Laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,49 persen/ tahun, ini belum diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang optimal.
4. Kepemilikan Administrasi Kependudukan masih rendah, baik dalam hal Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta – akta kependudukan lainnya.

Berdasarkan uraian permasalahan pembangunan di atas, dapat dirumuskan Isu-isu Strategis dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lombok Barat kurun waktu lima tahun kedepan yang diklasifikasikan dalam 3 aspek pembangunan, yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Rakyat

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat, sejumlah isu yang ditetapkan masuk aspek kesejahteraan rakyat sebagai berikut:

- a. Nilai PDRB perkapita belum optimal.
- b. Indeks Gini.
- c. Angka kemiskinan masih tinggi, diatas rata-rata nasional.
- d. Relatif tingginya angka pengangguran.
- e. IPM.
- f. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah.
- g. Angka usia harapan hidup.
- h. Persentase balita gizi buruk.
- i. Tingkat pengangguran terbuka.
- j. Indeks kepuasan masyarakat

- k. Persentase PAD terhadap pendapatan masih rendah.
- l. Opini BPK
- m. Skor PPH.
- n. Kontribusi setiap sektor pembentuk PDRB belum optimal.
- o. Pertumbuhan industri kecil masih rendah.

2. Aspek Pelayanan Umum

Dalam rangka berupaya memperbaiki pelayanan umum sebagai tugas utama penyelenggaraan pemerintahan, dapat diuraikan beberapa isu dibawah ini:

- a. Penegakkan perda belum optimal.
- b. Pelaksanaan tugas pemerintahan yang bersih dan baik belum optimal.
- c. Rendahnya unit penyelenggara pelayanan publik yang ber ISO.
- d. Masih tingginya kasus kematian bayi.
- e. Masih tingginya kasus kematian ibu.
- f. Masih terdapatnya prevalensi kurang gizi.
- g. Meningkatkan insidensi HIV dan AIDS.
- h. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social belum optimal.
- i. Masih rendahnya minat baca dan kunjungan ke perpustakaan daerah dan ketersediaan sarana dan Prasarana Sekolah menurun akibat terjadinya bencana.
- j. Pelayanan moda transportasi belum lancar.
- k. Rumah tangga yang menggunakan air bersih masih rendah.
- l. Rumah tangga yang menggunakan listrik masih rendah.
- m. Penyediaan jaringan irigasi belum optimal.
- n. Rumah tangga dengan sanitasi layak masih rendah.
- o. Pencemaran kualitas air sungai masih tinggi.
- p. Konservasi sumber mata air belum optimal.
- q. Pengelolaan sampah belum optimal.
- r. Masih terdapatnya penambangan tanpa ijin.
- s. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis belum optimal.

- t. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten masih rendah.
- u. Tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah.
- v. Jumlah LPM aktif rendah.
- w. Total Fertility Rate Tinggi.
- x. Luas lahan bersertifikasi masih rendah.
- y. Kepemilikan Dokumen kependudukan belum optimal.
- z. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak –anak masih terjadi.

3. Aspek Daya Saing

Sebagai ikhtiar pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing, beberapa isu yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

- a. Nilai tukar petani masih rendah.
- b. Konflik SARA masih terjadi.
- c. Angka kriminalitas belum tertangani secara optimal.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Lombok Barat ke depan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Isu reformasi Birokrasi.
- b. Isu Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan.
- c. Isu Penanggulangan Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan pendapatan.
- d. Isu Pembangunan manusia.
- e. Isu kelestarian Lingkungan hidup dan daerah rawan bencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 telah mengamanatkan 12 sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.10. Sasaran Strategis Kabupaten Lombok Barat

No	Sasaran
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan dan akuntabilitas Kinerja
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah
5	Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar
6	Meningkatnya Daya Saing Sektor Ekonomi Unggulan
7	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Hidup Masyarakat
9	Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan
10	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
12	Menurunnya Risiko Bencana

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan yang bersifat strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk periode 5 tahun.

Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati, RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Untuk periode Tahun 2019-2024, RPJMD Kabupaten Lombok Barat disahkan melalui Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024, dan sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Organisasi Perangkat daerah di Kabupaten Lombok Barat hingga ke level perencanaan tahunan.

Pembangunan Daerah Tahun 2020 merupakan awal tahun dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024, dengan Visi

Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019–2024 adalah “ **TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA, DAN BERPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU**”.

Dalam rangka pencapaian visi diatas dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :



Tabel 2.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Lombok Barat

NO (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	STRATEGI (4)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi
		1.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	
		1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	
2	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dan akses infrastruktur dasar	2.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatkan Konektivitas antar wilayah dan akses infrastruktur dasar melalui penyediaan jalan, moda transportasi, rumah layak
		2.2 Meningkatnya akses infrastruktur dasar	
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang	3.1 Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui kemitraan usaha dan iklim investasi yang
		3.2 Meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat	
4	Meningkatnya Kualitas Hidup	4.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Usia Harapan Hidup
		4.2 Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	Meningkatkan Rata - Rata Lama Sekolah
			Meningkatkan Harapan Lama Sekolah
4.3 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender		
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	5.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kelestarian sumber daya
			Meningkatkan Kelestarian Sumber Daya Alam melalui pengendalian pemanfaatan ruang
		5.3 Menurunnya Risiko Bencana	Meningkatkan Upaya Mitigasi Bencana

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mengacu pada visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran berikut Indikator Kinerja Utama yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2019-2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH dan PIHAK PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	nilai	Pihak Independen	Bappeda, Setda, Inspektorat	Semua OPD
2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK	Opini	BPK	BPKAD	Semua OPD
3 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Daerah	3 Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Huruf dan Angka	Kementerian PAN dan RB	Bappeda, Setda, Inspektorat	Semua OPD
4 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	4 Persentase Wilayah terhubung dengan pusat-pusat perekonomian	(Pasar Dapat Dilalui Roda 4*Objek Wisata Dapat Dilalui Roda 4*Pasar Memiliki Trayek*Objek Wisata Memiliki Trayek)^0,25	Indeks composit	PU,perindag,Dichub	Dichub	Dichub,Dirperindag, dan PUTR
5 Meningkatkan akses infrastruktur dasar	5 Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100$	%	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas PUTR
	6 Persentase Masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi}}{\text{Jumlah penduduk} \times 100}$	%	Dinas PUTR	Dinas PUTR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan	Dinas PUTR
	7 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Nilai Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$	%	Bapenda dan BPKAD	Bapenda	OPD Penghasil PAD
6 Meningkatkan Daya Saing sektor ekonomi unggulan	8 Nilai PDRB Perkapita	PDRB Perkapita	Rp.Juta	BPS	Seluruh OPD	Seluruh OPD
	9 Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi :					
	FMDN	Nilai Realisasi FMDN (Facilitas) tahun yg dihitung	Rp. Milyar	DPMPTSP	DPMPTSP	Dinas PUTR, Pariwisata dan SETDA
FMA	Nilai Realisasi FMA tahun yg dihitung	\$ juta				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH dan PIHAK PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(\text{Indeks Kualitas Air} \times 30\%) + (\text{Indeks Kualitas Udara} \times 30\%) + (\text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan} \times 40\%)$	Indeks	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Semua OPD dan Masyarakat
12 Menurunnya Risiko Bencana	19 Indeks Risiko Bencana	$\text{Indeks Ancaman} \times \text{Indeks Kerentanan}$	Indeks	BPBD	BPBD	Dinas Pemadam Kebakaran, SatPOLPP, Kesbang, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
		$\text{Indeks Kapasitas Daerah}$				

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020, adalah sebagai berikut .

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2020

Sasaran Strategis	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2020
Sasaran 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	IKM	persen	82,89
Sasaran 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	OPINI BPK	Opini	WTP
Sasaran 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Program Peningkatan AKIP Daerah	NILAI AKIP DAERAH	Nilai	BB (71,00)

Sasaran Strategis	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2020
Sasaran 4. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Program Peningkatan Konektivitas Wilayah	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat - Pusat Perekonomian	persen	82,74
Sasaran 5. Meningkatnya akses infrastruktur dasar	Program Peningkatan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	83,98
	Program Peningkatan Akses Air Minum Layak	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum	Persen	79,76
Sasaran 6. 'Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	Program Peningkatan Pembangunan Ekonomi	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	13,18
	Program Peningkatan PDRB Sektor - Sektor Unggulan	Nilai PDRB Perkapita (ADHK)	Juta Rp	17,83
	Program Peningkatan Investasi	Nilai Investasi :		
		PMA	Juta US \$	121,39
		PMDN (Fasilitas)	Rp. Milyar	536,12
Sasaran 7. Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Program Pemerataan Pembangunan	Indeks Gini	Indeks	< 0,3
	Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	15,00
	Program Penurunan Angka Pengangguran	TPT	Persen	3,20
Sasaran 8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	UHH	Tahun	66,84

Sasaran Strategis	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2020
Sasaran 9. Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	Program Peningkatan Rata- Rata Lama Sekolah	RLS	Tahun	6,25
	Program Peningkatan Harapan Lama Sekolah	HLS	Tahun	13,20
Sasaran 10. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaa n Gender	KLA	Persen	30,00
		IPG	Persen	89,00
Sasaran 11. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	55,41
Sasaran 12. Menurunnya Risiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah	Indeks	150,39

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020

A. CAPAIAN KINERJA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kewajiban menyampaikan akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi sertapengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukurankinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan tingkat pencapaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan dengan pengukuran kinerja.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performancegap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Untuk memudahkan interpretasi terhadap kinerja yang telah diperjanjikan, maka kami menggunakan skala penilaian terhadap kinerja pemerintah menggunakan skala yang diatur dalam Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 91	Sangat Baik (SB)	
2.	75 – 89,99	Baik (B)	
3.	65 – 74,99	Cukup (C)	
4.	50 – 64,99	Kurang (K)	
5.	≤ 50	Sangat Kurang (SK)	

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

Secara umum Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat 2019-2024.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020.

Berikut adalah pencapaian indikator sasaran Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020.

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target Kinerja Tahun 2020 Yang Telah Ditetapkan Dengan Capaian Kinerja (Realisasi) Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2020			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,89	85,00	102,55	SB
2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	SB
3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	3 Nilai AKIP Daerah	Nilai	71,00 (BB)	62,87 (B)	88,55	B
4 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	4 Persentase Wilayah Terhubung Dengan Pusat Perekonomian	%	76,55	69,56	90,87	SB
5 Meningkatkan Akses Infrastruktur Dasar	5 Persentase Rumah layak Huni	%	83,98	97,68	116,31	SB

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	Tahun 2020			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
	6	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Terhadap air Minum	%	79,76	81,12	101,71	SB
6 Meningkatnya Daya saing Sektor Ekonomi Unggulan	7	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	13,18	12,21	92,66	SB
	8	Nilai PDRB Perkapita	Juta Rupiah	17,83	15,68	87,94	B
	9	Nilai Realisasi Investasi					
		Nilai PMDN (Fasilitas)	Milyar Rupiah	536,12	812,32	151,52	SB
		Nilai Realisasi Investasi PMA	US (Juta)	121,39	19,69	16,22	SK
7 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	10	Indeks Gini Ratio	Indeks	0,32	< 0,3		
	11	Persentase Angka Kemiskinan	%	15,00	14,28	104,8	SB
	12	TPT	%	3,20	4,58	56,88	K
8 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13	UHH	Tahun	66,84	66,94	100,15	SB
9 Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan	14	Persentase HLS	Tahun	13,20	13,71	103,86	SB
	15	Persentase RLS	Tahun	6,25	6,41	102,56	SB
10 Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	16	Kabupaten Layak Anak (KLA)	%	30,00	30,00	100,00	SB
	17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	89,00	89,05	100,06	SB

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	Tahun 2020			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	18	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	%	55,41	68,02	122,76	SB
12 Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB)	19	Indeks risiko Bencana (IRB)	Indeks	150,39	157,90	95,01	SB
Rata-rata Capaian						128,65	

Capaian RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019–2024 yakni sebanyak 19 indikator kinerja yang mendukung 12 sasaran strategis, 12 indikator kinerja sasaran mencapai target dengan **Kategori Sangat Baik** dan 7 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target dengan 3 indikator kinerja dengan **Kategori Sangat Baik**, 2 indikator kinerja dengan **Kategori Baik**, 1 indikator dengan **Kategori Kurang** dan 1 indikator kinerja dengan **Kategori Sangat Kurang**, dan 1 indikator yang **tidak ada nilai yaitu Gini Ratio**, karena pada tahun 2019 indikator tersebut tidak dihitung oleh BPS Lombok Barat. Indikator RPJMD yang belum tercapai yaitu :

- 1) Nilai AKIP Kabupaten dengan kategori B (62,87);
- 2) Persentase Wilayah terhubung dengan Pusat Perekonomian dengan capaian sebesar 90,87 %;
- 3) Persentase Pendapatan Asli Daerah dengan capaian sebesar 92,66 %;
- 4) Nilai PDRB Perkapita (ADHK) dengan capaian sebesar 87,94 %;
- 5) Nilai Realisasi Investasi PMA dengan capaian 16,22 %
- 6) TPT dengan capaian sebesar 56,88 %
- 7) Indeks Risiko Bencana (IRB) dengan capaian 95,01 %;

Hasil analisis pencapaian 19 Indikator Kinerja Utama daerah Kabupaten Lombok Barat setelah perubahan RPJMD diketahui bahwa 15 indikator kinerja mendapatkan kategori **Sangat Baik**, 2 indikator kinerja mendapatkan kategori **Baik**, 1 indikator kinerja mendapatkan kategori **Kurang**, 1 indikator kinerja mendapatkan kategori **Sangat Kurang** dan 1 indikator yang **tidak ada nilai yaitu Gini Ratio**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2020 masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Berikut adalah perbandingan pencapaian indikator sasaran Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 dan 2020.

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.3
RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%
		Target	Realisasi	
1 Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82,89	85,00	102,55
Rata-rata Capaian Kinerja				102,55

Tabel 3.4
RPJMD 2014-2019 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 9
Terwujudnya Pelayanan Sistem Pemerintahan Yang Bermutu

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%
		Target	Realiasi	
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	78,00	80,33	102,99
Rata-rata Capaian Kinerja				102,99

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** indikator kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat** capaian kinerja sebesar 102,55% pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2019 indikator kinerja **Indeks Kepuasan masyarakat** berada dalam sasaran strategis Terwujudnya Pelayanan Sistem Pemerintahan Yang Bermutu dengan capaian kinerja sebesar 102,99% pada tahun 2019.

Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 3.5
RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%
		Target	Realisasi	
1 Opini BPK	%	WTP	WTP	100
Rata-rata Capaian Kinerja				100

Tabel 3.6
RPJMD 2014-2019 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 10
Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Transparan dan
Bebas Korupsi

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%
		Target	Realisasi	
1 Opini BPK	%	WTP	WTP	100
Rata-rata Capaian Kinerja				100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja **Opini BPK** sudah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 100%. Baik itu di akhir Tahun RPJMD 2014-2019 sasaran strategis **Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, akuntabel, Transparan Dan Bebas Korupsi** dan di awal tahun RPJMD 2019-2024 yaitu sasaran strategisnya **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**, walaupun berbeda sasaran strategisnya tapi indikator kinerjanya tetap berkesinambungan.

Sasaran 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.7
RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%
		Target	Realisasi	
1 Nilai AKIP	%	BB	B	88,55
Rata-rata Capaian Kinerja				88,55

Tabel 3.8
RPJMD 2014-2019 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 9
Terwujudnya Pelayanan Sistem Pemerintahan Yang Bermutu

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%
		Target	Realiasi	
1 Nilai AKIP	%	BB	B	89,81
Rata-rata Capaian Kinerja				89,81

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja **Nilai AKIP** pada sasaran strategis **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan akuntabilitas Kinerja** di dalam RPJMD 2019-2024 capaian kinerja sebesar 88,55% pada tahun 2020, sedangkan **Nilai AKIP** pada sasaran strategis **Terwujudnya pelayanan sistem pemerintahan yang Bermutu** yang tertuang di dalam RPJMD 2014-2019 capaian kinerjanya sebesar 89,81% pada tahun 2019 yaitu di akhir tahun RPJMD tersebut.

Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah

Tabel 3.9
RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%
		Target	Realisasi	
1 Persentase Wilayah Terhubung Dengan Pusat Perekonomian	%	76,55	69,56	90,87
Rata-rata Capaian Kinerja				90,87

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah tidak mengalami adanya perbandingan dikarenakan tidak ada persamaan Sasaran strategis dan indikator kinerja pada RPJMD 2014-2019 dengan RPJMD 2019-2024.

Sasaran 5. Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar

Tabel 3.10
RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi	
1	Rasio RLH	%	83,98	97,68	116,31
2	Persentase RT dengan Akses Air Minum Layak	%	79,76	81,12	101,71
Rata-rata Capaian Kinerja					109

Tabel 3.11
RPJMD 2014-2019 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%
			Target	Realiasi	
1	Rasio RLH	%	78,00	97,21	124,63
2	Persentase RT dengan Akses Air Minum Layak	%	85,00	80,4	94,59
Rata-rata Capaian Kinerja					109,61

Dari tabel 3.10 di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja **Rasio Rumah Layak Huni** capaian kinerjanya sebesar 116,31% dan **Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak** dengan capaian kinerja sebesar 101,71% yang rata-rata capaian kinerjanya sebesar 109%. Dua Indikator tersebut berada pada sasaran strategis **Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar** yang berada pada RPJMD 2019-2024 Yaitu pada awal tahun RPJMD tersebut.

Dari table 3.11 diatas dapat diketahui bahwa indikator kinerja **Rasio Rumah layak Huni** capaian kinerjanya sebesar 124,63% dan **Persentase Rumah tangga Dengan Akses ir Minum Layak** dengan capaian kinerja sebesar 94,59% yang rata-rata capaian kinerjanya sebesar 109,61%.Dua indicator tersebut berada pada sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar** yang berada pada RPJMD 2014-2019 yaitu pada akhir tahun RPJMD tersebut.

Sasaran 6. Meningkatnya Daya Saing Sektor ekonomi Unggulan

Tabel 3.12
RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 6
Meningkatnya Daya saing sektor Ekonomi Unggulan

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2020		%	
			Target	Realiasi		
1.	Persentase PAD Terhadap pendapatan	%	13,18	12,21	92,66	
2.	Nilai PDRB Perkapita	Juta Rupiah	17,83	15,68	87,94	
3.	Nilai Investasi	PMA	Juta	121,39	19,69	16,22
		PMDN	Milyar	536,12	812,32	151,52
Rata-rata Capaian Kinerja					87,1	

Tabel 3.13
RPJMD 2014-2019 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2019		%
			Target	Realiasi	
1	Pendapatan Asli Daerah	M	249,48	246,20	98,69
Rata-rata Capaian Kinerja					98,69

Tabel 3.14
RPJMD 2014-2019 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4
Peningkatan Sektor Produksi Utama (Pertanian, Perikanan)

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%
		Target	Realiasi	
1 Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	%	21,03	20,81	98,18
Rata-rata Capaian Kinerja				98,18

Tabel 3.15
RPJMD 2014-2019 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 5
Peningkatan Sektor Pariwisata

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%
		Target	Realiasi	
1 Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	16,46	16,68	101,34

Tabel 3.16
RPJMD 2014-2019 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 7
Peningkatan Sektor Industri, Perdagangan, UKM

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%
		Target	Realiasi	
1 Persentase Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan terhadap PDRB	%	17,82	17,92	100,56

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran tidak dapat diperbandingkan karena adanya perbedaan **Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD 2014-2019 dengan RPJMD 2019-2024 Kabupaten Lombok Barat.**

Sasaran 7. Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Tabel 3.17

RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	
		Target	Realiasi		
1	Persentase Angka Kemiskinan	%	15,00	14,28	104,8
2	TPT	%	3,20	4,58	56,88
Rata-rata Capaian Kinerja					80,84

Dari tabel di Tabel 3.18

RPJMD 2014-2019 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 17
Terpenuhinya Kebutuhan Hidup Minimum Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	
		Target	Realiasi		
1	Angka Kemiskinan	%	15,90	15,17	104,81
Rata-rata Capaian Kinerja					104,81

Dari tabel di Tabel 3.19

RPJMD 2014-2019 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 8
Peningkatan Kesempatan Kerja

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	
		Target	Realiasi		
1	TPT	%	3,20	2,67	119,85
Rata-rata Capaian Kinerja					119,85

Dari tabel 3.17 diatas dapat diketahui bahwa sasaran **Meningkatnya Kemandirian Masyarakat** di indikator kinerja **Tingkat Pengangguran Terbuka pada RPJMD 2019-2024** mengalami peningkatan sehingga rata-rata capaian kinerja sebesar 56,88% yang disebut sebagai Indikator Negatif. Sedangkan indikator kinerja Persentase Angka Kemiskinan dengan capaian kinerja sebesar 95,20% pada tahun 2020.

Pada table 3.18 sasaran **Terpenuhinya Kebutuhan Hidup Minimum Masyarakat** pada indikator Kinerja **Angka Kemiskinan** pada RPJMD 2014-2019 capaian kinerja sebesar 104,81% pada tahun 2019, sedangkan pada table 3.19 indikator kinerja Peningkatan Kesempatan Kerja capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 119,85%.

Sasaran 8. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.20
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 8
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	
		Target	Realiasi		Target	Realisasi		
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	65,40	66,64	101,90	66,84	66,94	100,15
Rata-rata Capaian Kinerja					101,90			100,15

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dengan capaian kinerja sebesar 101,90% pada tahun 2019 dan capaian kinerja sebesar 100,15% pada tahun 2020. Namun sudah melampaui target sesuai dengan yang diharapkan.

Sasaran 9. Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan

Tabel 3.21
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 9
Meningkatnya Kualitas Dan Mutu pendidikan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	
		Target	Realiasi		Target	Realisasi		
1	Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	12,80	13,48	105,31	13,2	13,71	103,86
2	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	6,45	6,37	98,76	6,25	6,41	102,56
Rata-rata Capaian Kinerja					102,68			103,21

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan** mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 103,21% pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 102,68 %. Mengalami peningkatan sebesar 0,53 %.

Sasaran 10. Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Tabel 3.22
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 10
Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1 Kabupaten Layak Anak (KLA)	%				30,00	30,00	100,00
2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	91,75	88,93	97,06	89,00	89,05	100,06
Rata-rata Capaian Kinerja				97,06			100,03

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran **Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan** dalam indikator kinerja **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun sudah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 100,06%, sedangkan indikator kinerja **Kabupaten Layak Anak (KLA)** tidak dapat diperbandingkan karena Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan indikator kinerja baru pada RPJMD 2019-2024. Namun realisasi sudah mencapai target dari target 30 % dengan realisasi 30 % dengan capaian kinerja 100 %.

Sasaran 11. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3.23
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 11
Terwujudnya Masyarakat Sadar Lingkungan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%
		Target	Realiasi	
1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	55,41	68,02	122,76
Rata-rata Capaian Kinerja				122,76

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran **Meningkatnya ketertiban dan kenyamanan masyarakat** dengan indikator kerjanya

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari tahun sebelumnya, dikarenakan sasaran dan indikator kinerja tersebut tidak ada di tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang masih berpedoman pada RPJMD 2014-2019. Sedangkan sasaran **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup** yang indikator kinerjanya **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** dengan capaian kinerja sebesar 122,76% pada tahun 2020 yang merupakan awal dari RPJMD 20119-2024.

Sasaran 12. Menurunnya Indeks Risiko Bencana

Tabel 3.24
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 12
Menurunnya Indeks Risiko Bencana

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%
		Target	Realiasi	
1 Indeks Risiko Bencana Daerah(IRB)	Indeks	150,39	157,90	95.01
Rata-rata Capaian Kinerja				95,01

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran **Menurunnya Indeks Risiko Bencana** mengalami indikator negative dimana target untuk menurunnya risiko bencana yang di targetkan sebesar 150,39% dengan realisasi sebesar 157,90% dengan capaian kinerja sebesar 95,01% pada tahun 2020.

3. Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Berikut disampaikan perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan target akhir RPJMD tahun 2019-2024 per sasaran strategis terlihat pada table berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.25
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realiasi			
1 Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82,89	85,00	102,55	90,03	94,41
Rata-rata Capaian Kinerja				102,55		94,41

Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 3.26
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realiasi			
1 Opini BPK	opini	WTP	WTP	100	WTP	100
Rata-rata Capaian Kinerja				100		100

Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.27
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realiasi			
1 Nilai AKIP Daerah	Nilai	BB (71,00)	B (62,87)	88,55	A (83,5)	75,29
Rata-rata Capaian Kinerja				88,55		75,29

Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah

Tabel 3.28
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2020 Terhadap target Akhir RPJMD	
		Target	Realiasi				
1	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	%	76,55	69,56	90,87	97,47	71,37
Rata-rata Capaian Kinerja					90,87		71,37

Sasaran 5. Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar

Tabel 3.29
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar

Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD	
		Target	Realiasi				
1	Meningkatnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	%	83,98	97,68	116,31	90,97	107,38
	Akses Infrastruktur Dasar Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum	%	79,76	81,12	101,71	82,00	98,93
Rata-rata Capaian Kinerja					109,01		103,16

Sasaran 6. Meningkatnya Daya Saing Sektor ekonomi Unggulan

Tabel 3.30
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 6
Meningkatnya Daya saing sektor Ekonomi Unggulan

Indikator kinerja		Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD	
			Target	Realiasi				
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah	%	13,18	12,21	92,66	14,45	84,50	
2	Nilai PDRB Perkapita (ADHK)	Juta Rupiah	17,83	15,68	87,94	20,55	76,30	
3	Nilai Realisasi Investasi	PMA	Juta US\$	121,39	19,69	16,22	177,73	11,08
		PMDN	Milyar	536,12	812,32	151,52	784,93	103,49
Rata-rata Capaian Kinerja					87,09		68,84	

Sasaran 7. Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Tabel 3.31
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realiasi			
1	Persentase Angka Kemiskinan	%	15,00	14,28	104,8	10,75	67,16
2	TPT	%	3,20	4,58	56,88	2,75	33,46
Rata-rata Capaian Kinerja					80,84		50,31

Sasaran 8. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.32
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 8
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realiasi			
1	UHH	Tahun	66,84	66,94	100,15	67,92	98,56
Rata-rata Capaian Kinerja					100,15		98,56

Sasaran 9. Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan

Tabel 3.33
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 9
Meningkatnya Kualitas Dan Mutu pendidikan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun Terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi			
1 Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,2	13,71	103,86	13,90	98,63
2 Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	6,25	6,41	102,56	7,19	89,15
Rata-rata Capaian Kinerja				103,21		93,89

Sasaran 10. Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Tabel 3.34
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 10
Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun Terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi			
1 Kabupaten Layak Anak (KLA)	%	30,00	30,00	100,00	70,00	42,86
2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	89,00	89,05	100,06	91,50	97,32
Rata-rata Capaian Kinerja				100,03		70,09

Sasaran 11. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3.35
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 11
Terwujudnya Masyarakat Sadar Lingkungan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun Terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realiasi			
1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	55,41	68,02	122,76	58,57	116,14
Rata-rata Capaian Kinerja				122,76		116,14

Sasaran 12. Menurunnya Indeks Risiko Bencana

Tabel 3.36
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 12
Menurunnya Indeks Risiko Bencana

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun Terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realiasi			
1 Indeks Risiko Bencana Daerah (IRB)	Indeks	150,39	157,90	95,01	128,94	77,54
Rata-rata Capaian Kinerja				95,01		77,54

4. Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional.

Tabel 3.37
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan Standar Nasional

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2020			Target Nasional	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Nasional
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,89	80,55	97,17	135	59,67

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2020			Target Nasional	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Nasional	
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00		
3	Nilai AKIP Daerah	Nilai	71,00 (BB)	62,87 (B)	88,55	85	73,96
4	Persentase Wilayah Terhubung Dengan Pusat Perekonomian	%	76,55	69,56	90,87		
5	Persentase Rumah layak Huni	%	83,98	97,68	116,31		
6	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Terhadap air Minum	%	79,76	81,12	101,71		
7	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	13,18	12,21	92,66		
8	Nilai PDRB Perkapita	Juta Rupiah	17,83	15,68	87,94		
9	Nilai Realisasi Investasi						
	Nilai PMDN (Fasilitasi)	Milyar Rupiah	536,12	812,32	151,52		
	Nilai Realisasi Investasi PMA	US (Juta)	121,39	19,69	16,22		
10	Program Angka Kemiskinan	%	15,00	14,28	104,8		
11	TPT	%	3,20	4,58	56,88		
12	UHH	Tahun	66,84	66,94	100,15		
13	Persentase HLS	Tahun	13,20	13,71	103,86	15,41	88,96

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2020			Target Nasional	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Nasional	
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
14	Persentase RLS	Tahun	6,25	6,41	102,56	8,75	73,26
15	Kabupaten Layak Anak (KLA)	%	30,00	30,00	100,00	34	88,23
16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	89,00	89,05	100,06	91,22	97,62
17	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	%	55,41	68,02	122,76	69,6	97,72
18	Indeks risiko Bencana (IRB)	Indeks	150,39	157,90	95,01		

Dari tabel di atas, terlihat bahwa ada beberapa indikator kinerja yang ada pada indikator kinerja Nasional. Namun semua indikator kinerja masih belum mencapai target sesuai dengan yang diinginkan.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif solusi Yang telah dilakukan.

Sebelum dilakukan analisis perlu disampaikan bahwa RPJMD 2019-2024 pelaksanaannya dimulai pada pertengahan tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan lanjutan dan berkesinambungan dengan RPJMD 2014-2019. Dimana ada beberapa perbedaan yang terkait dengan Sasaran Strategis sehingga ada beberapa yang tidak bisa dibandingkan antara capaian kinerja 2019 dengan 2020. Namun ada beberapa sasaran strategis yang berbeda tetapi Indikator Kinerjanya sama sehingga bisa dilakukan perbandingan.

Secara Umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2020 ini melebihi hingga 100% meskipun masih juga terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkatogori tinggi.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.38
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian (%)	Tahun 2020		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	78,00	80,33	102,99	82,89	85,00	102,55

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020 sebesar 102.55 % (Kategori Sangat Baik), karena dari target sebesar 82,89 % di tahun 2020 terealisasi sebesar 85,00 %. Jika dilihat dari Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama 2 tahun, capaian kinerja pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,44 % jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 dengan capaian sebesar 102,99 %. Walaupun mengalami penurunan tetapi sudah melampaui target yang diinginkan.

Tercapainya indikator kinerja ini disebabkan karena adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain:

1. Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur pemerintah;
2. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik
3. Menyederhanakan pelayanan yang berbelit-belit.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari :

1. Nilai realisasi IKM tahun 2020 diperoleh sebesar 85% dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan melalui online dengan melibatkan 5.638 orang responden dengan jawaban Puas sebanyak 4.803 orang (85%) dan sebanyak 835 orang (15%) menjawab tidak puas.
2. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam penyusunan SKM terdapat 9 (Sembilan) unsur yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan saran serta masukan, sarana dan prasarana.
3. Untuk meningkatkan keberhasilan capaian indikator sasaran diperlukan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain :
 - a. Peningkatan kualitas perilaku (cakap, ramah dan baik) dan profesionalisme aparatur pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat yang cepat;
 - b. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik;
 - c. Melaksanakan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP).
 - d. Melakukan upaya pemenuhan sumber daya Dinas Kesehatan dengan melengkapi kebutuhan akan tenaga, sarana, prasarana dan alat kesehatan melalui usulan kegiatan melalui berbagai sumber dana serta memaksimalkan peran tenaga yang ada ditambah rekrutmen tenaga yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

- e. Mengusulkan penambahan staf untuk memenuhi kebutuhan SDM Bakesbangpol.
- f. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara rutin dan berkesinambungan, Peningkatan tematik kawasan rawan bencana dengan penambahan target lokasi DESTANA
- g. Mengembangkan system komando Koordiansi dalam kegiatan Penanggulangan Bencana, Tanggap Darurat, secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- h. Penerimaan Tenaga padam pendidikan dan pelatihan teknis.
- i. Untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan informasi publik telah dilakukan secara bertahap dengan pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan yang ada agar pelayanan informasi publik tidak terganggu secara signifikan.
- j. Dalam usaha pengintegrasian data dan informasi, Diskominfo telah berkoordinasi dengan BPS sebagai Stakeholder pemerintah dalam menyatukan satu data daerah.
- k. Mencukupi kelengkapan sarana dan prasarana secara bertahap melalui pengadaan barang yang sesuai standar operasi pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan.

Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 3.39
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	%
		Target	Realiasi			
1 Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Rata-rata Capaian Kinerja				WTP		WTP

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **Indikator Kinerja Opini BPK** pada **Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah** mencapai target sebesar 100%. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 masih sama jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100 %.

Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2020 sebesar 100%, mencapai target dikarenakan :

1. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern;
2. Peningkatan sumber daya manusia di bidang keuangan, pengembangan aplikasi pendukung laporan keuangan dan mempercepat penyelesaian atas pemeriksaan BPK tahun sebelumnya;
3. Meningkatkan koordinasi internal di Lingkungan Pemda Lombok Barat maupun eksternal kepada BPKP Perwakilan NTB untuk proses pendampingan selama pemeriksaan;
4. Peningkatan peran APIP untuk meningkatkan kinerja SPIP;
5. Pencegahan temuan berulang;
6. Deteksi dini yang berpotensi menjadi temuan.
7. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dalam transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan;
8. Pelaporan keuangan telah berbasis Akruwal (Accrual Basis) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua

transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang.

Sasaran 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.40
RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian (%)	Tahun 2020		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	%	BB	B	89,81	BB (71,00)	B (62,87)	88,55

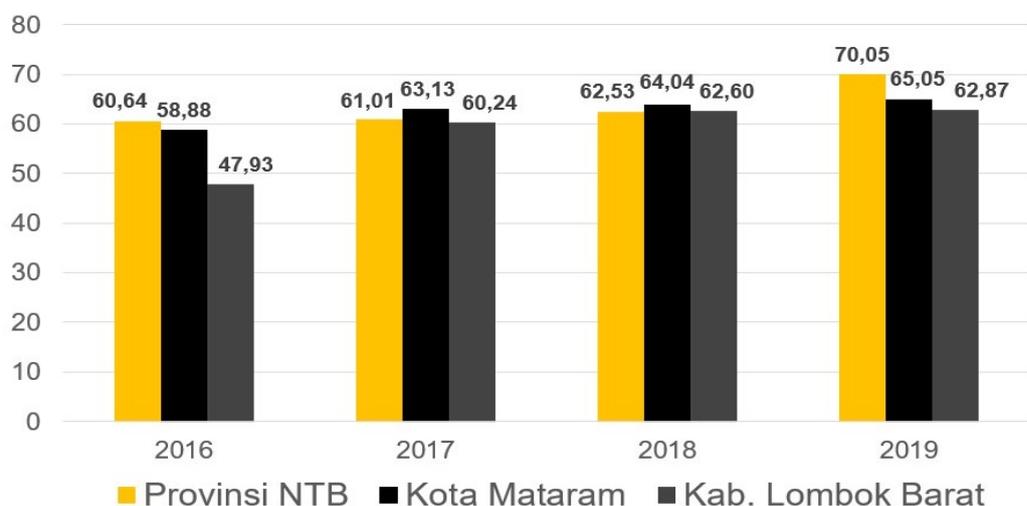
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **Indikator Kinerja Nilai AKIP** pada **Sasaran Strategis Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja** belum mencapai target yang diharapkan dengan realisasi sebesar 62,87 % dari target yang ditetapkan sebesar 71 % dengan capaian kinerja 88,55 %. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,26% dari tahun 2019 dengan capaian sebesar 89,81 %.

Sebagaimana diketahui SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

(Lobar) terus berusaha meningkatkan akuntabilitasnya. Setelah sebelumnya berhasil mendapat penghargaan dari KemenPAN-RB atas capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama kurun waktu tahun 2017 dan 2018 lalu yang statusnya sudah naik predikat dari CC menjadi B. Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga mendapat nilai 62,87 (B) dari 62,24 (B) pada tahun yang lalu.

Gambar 3.1. Rekapitulasi Nilai Sakip Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2019



Sumber : Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, 2020

SAKIP bukan hanya pemberian nilai, namun juga menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah berusaha memperbaiki diri terkait dengan hasil evaluasi Sakip sesuai dengan arahan Kemenpan RB, dan pada tahun 2017-2019 telah mendapatkan nilai B yang sebelumnya adalah C. Target pada tahun 2020 adalah mendapatkan nilai SAKIP 71,00 (BB), namun sampai LKPJ ini tersusun dan tersajikan, nilai SAKIP tersebut belum direlease sehingga belum dapat disajikan.

Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2019 sebesar 89,81%, belum mencapai target dikarenakan ada beberapa komponen penilaian SAKIP belum terpenuhi dan belum sepenuhnya melaksanakan rekomendasi dari KEMENPAN dan RB.

Solusi dan upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam rangka peningkatan nilai SAKIP adalah sebagai berikut :

1. Melakukan review terhadap dokumen perencanaan, baik dari sisi substansi sasaran dan indikator kerjanya;
2. Konversi program (program yang tidak sesuai/tidak tepat sasaran dihapus);
3. Mereview Indikator Kinerja Utama (IKU) dan memperbaiki kualitas penyusunan LAKIP;
4. Memperbaiki kualitas rewiu internal AKIP;
5. Membangun Aplikasi SAKIP yang beralamat : <http://www.sakip.lombokbaratkab.go.id>;
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja.

Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah

Tabel 3.41
RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian (%)	Tahun 2020		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Wilayah Terhubung Dengan Pusat Perekonomian	%				76,55	69,56	90,87

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **Indikator Kinerja Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian** pada **Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah** belum mencapai target yang diharapkan dengan realisasi sebesar 69,56 %

dari target yang ditetapkan sebesar 76,55 % dengan capaian kinerja 90,87 %. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 tidak bisa dibandingkan dikarenakan pada tahun 2019 masih menggunakan RPJMD 2017-2019 yang merupakan perubahan dari RPJMD 2014-2019. Dan untuk RPJMD 2019-2024 pelaksanaan dimulai pada pertengahan tahun 2019 sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dimana ada beberapa Sasaran Strategis yang mengalami perbedaan.

Peningkatan Wilayah yang terhubung dengan pusat-pusat perekonomian merupakan salah satu alternatif untuk menggerakkan dana memacu pembangunan guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi manakala dihubungkan dengan pusat-pusat perekonomian akan mempercepat terjadinya kemajuan ekonomi karena secara langsung maupun tidak langsung akan membuat masyarakat mencari kehidupan yang lebih layak didaerahnya.

Pusat-pusat perekonomian seperti pasar dan tempat wisata mampu memberikan output yang tinggi pada wilayah tertentu, yang dapat memberikan dampak yang luas (*spread effect*) dan dampak ganda (*multifiler effect*) pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas. Akses jalan menuju pusat-pusat perekonomian tersebut menurut kewenangan pengelolaannya terdiri dari Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa. Jalan Kabupaten yang merupakan akses pusat-pusat perekonomian sepanjang 236,63 Km dengan kondisi kemantapan jalan (kondisi baik dan kondisi sedang) pada Tahun 2020 sepanjang 163,36 Km atau 69,04% kemantapan jalannya, meningkat dari Tahun 2019 sebesar 60,35%.

Tabel 3.42

Pusat perekonomian dan kemandapan Jalan di Lombok Barat tahun 2020

NO	PUSAT PEREKONOMIAN	AKSES JALAN	PANJANG RUAS (Km)	KEMANTAPAN JALAN		KET.
				(Km)	(%)	
A.	PASAR UMUM					
I	Kecamatan Narmada					
1	Pasar Narmada Desa Lembuak	Narmada - Batu kumbang	2,60	2,60	100,00	
		Telaga ngembeng - Lembuak	1,54	1,54	100,00	
		Lembuak - Golong	4,00	4,00	100,00	
2	Pasar Lebah Sempaga Desa : Lebah Sempaga	Keru - Sesaot	14,20	4,60	32,39	
		Suranadi - Lembah Sempaga	2,80	0,00	0,00	
		Lembah sempaga - Pakuan	1,43	0,00	0,00	
3	Pasar Keru Desa : Keru	Keru - Sesaot				Ruas Jalan Sama
4	Pasar Endut Desa : Batu Mekar	Batu kumbang - Sigerongan	7,40	3,80	51,35	Jalan Non Status
		Endut - Lingsar	2,69	1,05	39,03	
		Endut - Nyiur Baya Gawah	2,02	2,02	100,00	
II	Kecamatan Lingsar					
5	Pasar Jelateng Desa : Gegerung	Dasan Geria - Ketapang orong	5,00	3,00	60,00	
		Gegutu - Jelateng	1,80	1,80	100,00	
6	Pasar Duman Desa Duman (Pasar Sigerongan)	Batu kumbang - Sigerongan				Ruas Jalan Sama
		Kekeri - Terep	4,00	4,00	100,00	
III	Kecamatan Gunungsari					
7	Pasar Lendang Bajur Desa : Gunungsari	Bale kuwu - Medas - Tanak malit	2,30	2,30	100,00	
8	Pasar Lilir Desa : Penimbung	Buwuh - Tunjang polak	6,50	6,50	100,00	
		Lilir - Gunungsari	3,16	3,16	100,00	
		Lilir - Sempeni	3,00	1,00	33,33	
10	Pasar Sesela Desa : Sesela	Sesela - Johar pelita	2,02	1,00	49,50	
IV	Kecamatan Labuapi					
11	Pasar Karang Bongkot pengganti pasar Perampuan	Jerneng - Perampuan	3,70	3,70	100,00	
12	Pasar Jerneng Desa:Labuapi	Jerneng - Perampuan				Ruas Jalan Sama

NO	PUSAT PEREKONOMIAN	AKSES JALAN	PANJANG RUAS (Km)	KEMANTAPAN JALAN		KET.
				(Km)	(%)	
		Jerneng - Bagik polak	1,66	1,66	100,00	
13	Pasar Telaga Waru Desa : Telaga Waru	Jerneng - Perampuan				Ruas Jalan Sama
		Telaga waru - Pagutan	1,97	1,97	100,00	
V	Kecamatan Gerung					
14	Pasar Gerung Desa : Gerung Selatan	Karang anyar - Rean	1,00	1,00	100,00	
15	Pasar Tempos Desa : Banyu Urip	Gerung - Bantir	6,80	6,80	100,00	
16	Pasar Penarukan Desa : Kebon Ayu	Karang anyar - Kebon ayu	3,65	3,65	100,00	
VI	Kecamatan Kediri					
18	Pasar Banyu Mulek Desa : Banyu Mulek	Lingkar Banyumulek	2,60	2,40	92,31	
19	Pasar Jagaraga Desa : Jagaraga Indah	Beleke - Jagaraga	3,37	3,37	100,00	
		Jagaraga - Lamper	1,16	0,80	68,97	
VII	Kecamatan Kuripan					
20	Pasar Kuripan Desa : Kuripan Induk	Lingkar Kuripan	1,10	1,00	90,91	
		Kuripan - Plabu	0,45	0,45	100,00	
21	Pasar Kuripan Utara Desa Kuripan Utara pindahan pasar Kumbang	Kumbang - Kuripan	4,50	4,50	100,00	
VII I	Kecamatan Lembar					
23	Pasar Jembatan Kembar Desa : Jembatan Kembar	Jembatan kembar - Bakong	2,64	0,64	24,24	
24	Pasar Lendang Garuda Desa : Mareje					Jalan Non Status
IX	Kecamatan Sekotong					
26	Pasar Sekotong Desa : Sekotong Tengah	Sekotong - Lemer	7,63	0,00	0,00	
		Sekotong - Telaga lebur	2,35	0,55	23,40	
29	Pasar Kedaro Desa : Kedaro (di bangun PMPN)	Lendang Re - Menjut	6,50	3,60	55,38	
		Taun - Kedaro	2,30	0,00	0,00	
		Pengawisan - Lendang guar	7,50	0,00	0,00	
30	Pasar Agro Kec. Lingsar	Selagalas - Batukumbang	5,90	5,90	100,00	
		Lingsar - Taman	0,60	0,40	66,67	
		Lingsar - Saribaya	0,85	0,85	100,00	
31	Pasar Bukit Tinggi Kec. Gunungsari	Buwuh - Tunjang polak				Ruas Jalan Sama
32	Pasar Giri Sasak Kec. Kuripan	Kuripan - Probot	3,84	2,64	68,75	

NO	PUSAT PEREKONOMIAN	AKSES JALAN	PANJANG RUAS (Km)	KEMANTAPAN JALAN		KET.
				(Km)	(%)	
B. PUSAT OLEH-OLEH / KULINER						
1	Pusat Oleh-Oleh dan kuliner Suranadi	Nyiur Lembang - Sesaot	8,80	8,80	100,00	
		Keru - Suranadi	6,10	6,10	100,00	
		Kalimanting - Sesaot	3,60	3,60	100,00	
2	Centra Produksi Madu	Sandik - Bengkaung	2,20	1,00	45,45	
		Melase - Penanggak	5,00	2,00	40,00	
		Bengkaung - Penanggak	5,00	5,00	100,00	
3	Centra Produksi Kain Tenun	Gerung - Bantir				Ruas Jalan Sama
		Berore - Gumise	3,40	0,70	20,59	
4	Centra Kerajinan Gerabah	Gerung - Rumak	8,93	3,73	41,77	
		Lingkar Banyumulek				Ruas Jalan Sama
		Batu Mulik - Banyumulek	3,10	3,10	100,00	
		Lelede - Basan Baru	1,40	1,40	100,00	
C. DAYA TARIK WISATA (DTW)						
Wilayah Utara (Zona 1, 2 dan 3)						
2	Kerandangan	Kerandangan - Wisata Alam	1,60	1,00	62,50	
9	Taman Langit	Sandik - Bengkaung				Ruas Jalan Sama
		Melase - Penanggak				Ruas Jalan Sama
		Bengkaung - Penanggak				Ruas Jalan Sama
11	Pasar Seni Sesela	Meninting - Midang	4,30	4,30	100,00	
13	Bukit Tiga Rasa	Lilir - Jeringo	3,16	3,16	100,00	
14	Karang Bayan	Batu Kumbang - Sigerongan				Ruas Jalan Sama
15	Pura Lingsar	Selagalas - Batukumbang				Ruas Jalan Sama
		Lingsar - Taman				Ruas Jalan Sama
Wilayah Tengah (Zona 1, 2, 3 dan 4)						
16	Aik Manggong	Salut - Batu Kumbang	3,55	3,55	100,00	
17	Rafling Batu Mekar	Ndut - Nyerbaya gawah	2,02	2,02	100,00	
18	Air Terjun Timponan	Jalan Desa				

NO	PUSAT PEREKONOMIAN	AKSES JALAN	PANJANG RUAS (Km)	KEMANTAPAN JALAN		KET.
				(Km)	(%)	
19	Purekmas Sesaot	Nyiur Lembang - Sesaot				Ruas Jalan Sama
20	Aik Nyet	Keru - Sesaot				Ruas Jalan Sama
		Seasot - Aik Nyet	2,20	-	0,00	Rusak Berat
21	Air Terjun Tibu atas	Jalan Desa				
22	Masjid Cina Pakuan	Keru - Sesaot				Ruas Jalan Sama
23	Air Terjun Segenter	Keru - Sesaot				Ruas Jalan Sama
24	Gunung Jae	Gunungjae - Lembah Suren	3,95	3,85	97,47	
		Gunung Jae - Bawak Enaw				
25	Taman Suranadi	Nyiur Lembang - Sesaot				Ruas Jalan Sama
		Keru - Suranadi				Ruas Jalan Sama
		Kalimanting - Sesaot				Ruas Jalan Sama
26	Taman Gandari Kawari	Gandari - Lembuak	0,25	0,25	100,00	
27	Kokok Babak Kediri	Montong Are - Badrain	0,63	0,63	100,00	
28	Pasar Seni Banyumulek	Gerung - Rumah				Ruas Jalan Sama
		Lingkar Banyumulek				Ruas Jalan Sama
		Batu Mulik - Banyumulek				Ruas Jalan Sama
		Lelede - Basan Baru	1,40	1,40	100,00	
29	Gunung Sasak	Kuripan - Tempos	4,03	4,03	100,00	
30	Bukit Ledu	Gerung - Bantir				Ruas Jalan Sama
		Perendekan Bantir	3,00	3,00	100,00	
31	Gunung Pengsong	Pengsong - Padang Reak	3,20	3,20	100,00	
33	Pantai Kuranji Dalang	Kuranji - Pantai	1,20	1,20	100,00	
34	Pantai Induk	Penarukan - Pantai Induk	2,20	0,70	31,82	
		Bongor - Pantai Induk	3,80	3,80	100,00	
35	Batu Idung	Berore - Gumese	3,40	0,70	20,59	

NO	PUSAT PEREKONOMIAN	AKSES JALAN	PANJANG RUAS (Km)	KEMANTAPAN JALAN		KET.
				(Km)	(%)	
	Wilayah Selatan (Zona 1, 2, 3, 4 dan 5)					
36	Cemara 1	Lembar - Serumbung	2,44	1,00	41,03	
39	Telaga Pandan Wangi	Lendang Garuda - Lendang damai	2,10	1,90	90,48	
42	Buwun Mas Hill	Sekotong - Lemer				Ruas Jalan Sama
		Lemer - Sepi	2,15	-	0,00	Rusak Ringan
JUMLAH			236,63	163,36	69,04	

Sumber : Dinas PUPR Kab. Lombok Barat, 2021

Hingga tahun 2020, terdapat 32 pasar yang ada di Kabupaten Lombok Barat, dan 24 diantaranya memiliki trayek angkutan umum, dan 8 pasar yang belum memiliki trayek angkutan umum, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.43
Capaian Indikator Utama Dishub Kab.Lobar Tahun 2020

Kecamatan	Daya Tampung	Jumlah Pasar Tahun 2020	Daya Tampung	Revitalisasi	Pembangunan Baru	Jaringan Trayek Angkutan Umum
Sekotong	479	4	479			
Pasar Sekotong	146		146		Pematangan Lahan Pasar Sekotong Tengah	Lembar - Sekotong - Blongas - Pengantap, Pp.
Pasar Tawun	76		76			Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
						Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
Pasar Pelangan	177		177			Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
						Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
Pasar Kedaro	80		80			
Lembar	256	3	256			
Pasar Lembar	146		146		Landscape Pasar Jelateng Eat Mayang	Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
						Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
Pasar Jembatan Kembar	65		65			Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.

Kecamatan	Daya Tampung	Jumlah Pasar Tahun 2020	Daya Tampung	Revitalisasi	Pembangunan Baru	Jaringan Trayek Angkutan Umum
Pasar Lendang Garuda	45		45			
Gerung	1142	4	1208	Pasar Tempos		
Pasar Gerung	975		975			Gerung - Penarukan - Kebon Ayu - Kuranji - Prampuan - Labuapi, Pp
						Gerung - Kediri - Rumak - Banyumulek - Gapuk, Pp.
						Gerung - Kuripan - Kediri - Mandalika, Pp.
						Gerung - Rumak - Gunung Pengsong - Prampuan - Bajur - Pagutan, Pp.
						Gerung - Rumak - Labuapi - Bengkel - Mandalika -, Pp.
						Gerung - Gapuk - Banyumulek - Rumak - Labuapi - Bengkel - Mandalika,Pp.
						Gerung - Tempos - Aik Ampat - Dasan Geres - Gerung, Pp.
						Gerung - Menang - Aikampat - Dasan Geres - Rumak - Labuapi, Pp
						Gerung-Banyu Urip- Aik Ampat,Pp
						Gerung-Rumak- Banyumulek-Suka Makmur- Mesanggok,Pp
Pasar Beleke	25		25			-
Pasar Tempos	66		132			Gerung-Banyu Urip- Aik Ampat,Pp
Pasar Penarukan	76		76			Gerung - Penarukan - Kebon Ayu - Kuranji - Prampuan - Labuapi, Pp
Labuapi	445	3	445			
Pasar Perampuan (Kr. Bongkot)	199		199			Prampuan - Jerneng - Labuapi - Bengkel - Mandalika, Pp.
Pasar Jerneng	134		134			Prampuan - Jerneng - Labuapi - Bengkel - Mandalika, Pp.
						Gerung - Rumak - Labuapi - Bengkel - Mandalika -, Pp.

Kecamatan	Daya Tampung	Jumlah Pasar Tahun 2020	Daya Tampung	Revitalisasi	Pembangunan Baru	Jaringan Trayek Angkutan Umum
Pasar Telaga Waru	112		112			Prampuan – Jerneng – Labuapi – Bengkel – Mandalika, Pp.
Kediri	629	3	629			
Pasar Kediri	395		395			Lembar - Gerung - Kediri - Bengkel - Mandalika, Pp.
						Gerung – Kediri – Rumak – Banyumulek – Gapuk, Pp.
						Gerung – Kuripan – Kediri – Mandalika, Pp.
						Kediri – Bagekpolak – Jerneng – Prampuan, Pp.
Pasar Banyu Mulek	155		155			Gerung – Gapuk – Banyumulek – Rumak – Labuapi – Bengkel – Mandalika, Pp.
Pasar Jagaraga	79		79			Gerung – Kuripan – Kediri – Mandalika, Pp.
Kuripan	200	3	250			
Pasar Kuripan	135		135			-
Pasar Kuripan Utara (Pindahan pkr kumbang)	65		65	Pasar Kuripan Induk	Pasar Giri Sasak	-
Pasar Giri Sasak			50			-
Narmada	1425	4	1425			
Pasar Narmada	655		655			Keru – Narmada – Mandalika, Pp.
						Sesaot – Narmada – Mandalika, Pp.
						Narmada – Lingsar – Mandalika, Pp.
						Narmada – Tanak Beak – Kumbang – Kuripan – Gerung, Pp.
				Pasar Keru		Narmada – Dasan Tereng – Merembu – Bengkel – Mandalika, Pp.
						Narmada – Batu Kumbang – Karang Bayan – Segerongan – Kekerri – Gn. Sari, Pp.
						Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.

Kecamatan	Daya Tampung	Jumlah Pasar Tahun 2020	Daya Tampung	Revitalisasi	Pembangunan Baru	Jaringan Trayek Angkutan Umum
Pasar Lebah Sempaga	125		125			Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.
Pasar Keru	588		588			Keru – Narmada – Mandalika, Pp.
						Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.
Pasar Endut	57		57			Narmada – Batu Kumbang – Karang Bayan – Segerongan – Kekerri – Gn. Sari, Pp
Lingsar	107	3	152			
Pasar Jelateng	62		62	Pasar Duman, Pasar Jelateng Lingsar	Pasar Agro	Gunung sari-Tamansari-Ranjok-Mambalan-Kekerri-Duman-Segerongan
Pasar Duman (Sigerongan)	45		45			Gunung sari-Tamansari-Ranjok-Mambalan-Kekerri-Duman-Segerongan
Pasar Agro			45			Gunung sari-Tamansari-Ranjok-Mambalan-Kekerri-Duman-Segerongan
Gunungsari	767	5	777			
Pasar Lendang Bajur	587		587		Pasar Bukit Tinggi	Gunung Sari – Mambelan – Lilir – Kekerri – Segerongan – Terep – Peteluan Indah – Selagalas – Mandalika, Pp.
						Gunung Sari – Montong – Mangsit – Ampenan, Pp.
						Kerandangan – Senggigi – Gunung Sari – Ampenan, Pp.
						Senggigi – Montong – Mangsit – Ampenan, Pp.
						Sidemen – Gunung Sari – Rembiga – Ampenan, Pp.
						Gunung Sari - Lilir - Kekerri - Sayang-Sayang - Sindu, Pp.
						Gunung Sari - Lilir - Sayang-Sayang - Mandalika, Pp.
Pasar Lilir	99		99			Gunung Sari - Lilir - Kekerri - Sayang-Sayang - Sindu, Pp.
						Gunung Sari - Lilir - Sayang-Sayang - Mandalika, Pp.
Pasar Sidemen	27		27			Sidemen – Gunung Sari – Rembiga – Ampenan, Pp.

Kecamatan	Daya Tampung	Jumlah Pasar Tahun 2020	Daya Tampung	Revitalisasi	Pembangunan Baru	Jaringan Trayek Angkutan Umum
Pasar Sesela	54		54			-
Pasar Bukit Tinggi			10			-
Batulayar	0	0	0			
Jumlah	5450	32	5621	171		

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lombok Barat, 2020

Berdasarkan tabel di atas dimana Dinas Perhubungan Kabupaten memiliki target penyediaan jalur trayek menuju pusat perekonomian (pasar), dimana dapat terlihat dari tabel tersebut masih terdapat 8 pusat perekonomian (pasar) yang belum memiliki jalur trayek antara lain : Pasar Kedaro, pasar lendang Garuda, Pasar Tempos, Pasar Kuripan, Pasar Kuripan Utara, Pasar Giri Sasak. Delapan pusat perekonomian ini menjadi salah satu target IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, hingga tahun 2020 ini belum terdapat penambahan jalur trayek menuju pusat perekonomian (pasar maupun objek wisata) dikarenakan kajian dan perencanaan jalur trayek tersebut belum dapat dilaksanakan terkait adanya refocusing anggaran. Capaian indikator kinerja utama wilayah terhubung dengan pusat perekonomian tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.44
Capaian indikator kinerja utama wilayah terhubung dengan pusat perekonomian tahun 2020

TAHUN	Wilayah Terhubung Dengan Pusat Perekonomian				
	Pasar Dapat Dilalui Roda 4	Objek Wisata Dapat Dilalui Roda 4	Pasar Memiliki Trayek	Objek Wisata Memiliki Trayek	Indeks Komposit Wilayah Terhubung Dengan Pusat Perekonomian
2018	100	100	75	56	80,50
2020	100	100	75	56	80,50

Sumber : Olah Data Bappeda, 2020

Solusi untuk meningkatkan capaian indicator kinerja **Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian adalah :**

- 1) Meningkatkan anggaran untuk infrastruktur jalan baik dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan PRIM sehingga Program Peningkatan Jalan Tahun 2020 bisa tercapai.
- 2) Mengusahakan perbaikan jalan rutin kabupaten guna menjaga kondisi kemantapan jalan. Upaya secara berkala ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perekonomian yang dapat menunjang kehidupannya sehari-hari.
- 3) Penyediaan jalur trayek menuju pusat perekonomian (pasar), dimana masih terdapat 8 pusat perekonomian (pasar) yang belum memiliki jalur trayek antara lain : Pasar Kedaro, pasar lendang Garuda, Pasar Tempos, Pasar Kuripan, Pasar Kuripan Utara, Pasar Giri Sasak. Delapan pusat perekonomian ini menjadi salah satu target IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, hingga tahun 2020 ini belum terdapat penambahan jalur trayek menuju pusat perekonomian (pasar maupun objek wisata) dikarenakan kajian dan perencanaan jalur trayek tersebut belum dapat dilaksanakan terkait adanya refocusing anggaran.
- 4) Berkoordinasi dengan pengusaha-pengusaha angkutan perdesaan dalam upaya pengisian potensi angkutan pada jalur-jalur trayek non-aktif
- 5) Menyusun produk hukum/legalitas yang mengatur penyebaran potensi angkutan perdesaan dalam setiap jalur trayek, sehingga tidak didominasi pada jalur trayek tertentu.

- 6) Mengupayakan tambahan ketersediaan mobil perintis melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah terpencil yang tidak terlayani moda angkutan perdesaan.
- 7) Mengaktifkan peran FLLAJ (Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan).

Sasaran 5. Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar

Tabel 3.45
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar

Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian (%)	Tahun 2020		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	1	Persentase RLH	%	78,00	97,21	124,63	83,98	97,68	116,31
	2	Persentase RT dengan Akses Air Minum Layak	%	85,00	80,4	94,59	79,76	81,12	101,71
						109,01			109,01

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar** keseluruhan mencapai target. Rata-rata capaian pada tahun 2020 sebesar 109,01 %, rata-rata capaiannya tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan jika dibandingkan dengan kinerja tahun lalu sebesar 109,01 %.

a. Persentase Rumah Layak Huni (RLH)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Persentase Rumah Layak Huni telah mencapai target yaitu dengan realisasi sebesar 97,68 % dari yang ditargetkan sebesar 83,98% atau capaian kinerjanya sebesar 116,31%. Dibandingkan dengan tahun 2019 indikator ini mengalami penurunan sebesar 8,32 % dari 124,63% pada tahun 2019 menjadi 116,31% pada tahun 2020.

Capaian pelaksanaan program sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, serta capaian kinerja keluaran masing-masing

kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran pada Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.46
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Perumahan dan Permukiman
Tahun 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur serta kualitas sarana dan prasarana public	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	98,33
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	1,510 Surat	3,396 Surat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.	12 Bulan	12 Bulan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas.	7 Unit	7 Unit
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	17 Orang	17 Orang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	48 Exemplar	48 Exemplar
				Penyediaan Makanan dan Minuman	239 OK	478 OK
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	3 OK	2 OK
				Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	1 Dokumen
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	6 Unit	6 Unit				
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Gedung Bangunan	1 Gedung Bangunan				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6 Unit	6 Unit
				pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10 Unit	10 Unit
				Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	82	83,84
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen
				Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen
				Penyusunan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen
				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
				Penyusunan RKA,RKAP,DPA, dan DPPA	9 Dokumen	9 Dokumen
				Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 Dokumen	1 Dokumen
				Penyusunan Profil/Monografi	1 Dokumen	1 Dokumen
			Meningkatnya akses infrastruktur dasar melalui rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	97,72	98,57
				Penyelarasan penyelenggaraan pengembangan perumahan	15 Rekomendasi	29 Rekomendasi
				Penyelarasan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	510 Unit	314 Unit

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	0 Unit	0 Unit
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Dokumen	1 Dokumen
			Meningkatkan Penanganan Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh	Program Lingkungan Sehat Perumahan	48	99,64
				Penyelarasan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	2 Dokumen	0 Dokumen
				Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	1 Dokumen	1 Dokumen
				Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh	0,17 Ha	0,17 Ha
				Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)	4 Ha	108,66 Ha
				Perencanaan Sarana Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	2 Dokumen
			Penanganan PSU semakin meningkat	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	4	59,53
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan	3 Lokasi	2 Lokasi
			Meningkatnya penanganan kawasan Perkotaan	Program Penataan Kawasan Perkotaan	1	99,48
				Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota	13 Ha	12,25 Ha
				Penataan dan Pengelolaan Periklanan/Reklame	110 Rekomendasi	162 Rekomendasi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				Penataan dan Pengelolaan Penerang Jalan Umum (PJU)	5.492 Titik	5.711 Titik
				Penyediaan Infrastruktur Perkotaan	0,23 Ha	0,31 Ha

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Lombok Barat, 2020

Pencapaian Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Lombok Barat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Pemerintah fokus pada penurunan angka kemiskinan, dimana rumah merupakan indikator yang berpengaruh cukup besar, sehingga alokasi anggaran untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni juga meningkat.
2. Meningkatnya kondisi perekonomian secara keseluruhan menyebabkan masyarakat mampu memperbaiki kondisi perumahan secara swadaya menjadi rumah layak huni.

Permasalahan dalam pencapaian kinerja ini yaitu :

1. Pada realisasi target program/kegiatan yang tidak mencapai target di sebabkan adanya refofusing untuk anggaran covid -19 pada tahun 2020 sebesar 8%.
2. Untuk pencapaian realisasi target kinerja di sebabkan dikarenakan ada Adanya perbedaan data yang terjadi di lapangan dengan data yang di berikan pada data awal pendataan, sehingga harus di validasi ulang lagi dan lambatnya pembentukan Pokmas – Pokmas di beberapa desa di Kabupaten Lombok Barat sehingga penanganan rumah gempa masih di lakukan pendataan ulang Rumah Korban bencana gempa dari usulan yang sudah masuk dan dilakukan Verifikasi oleh tim Verifikasi baik dari administrasi seperti KTP, KK dan Kepemilikan Tanah. serta data teknis – teknis lainnya.

3. Kurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat kurang sekali sehingga menimbulkan keterlambatan penanganan, dan Kurang tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung sasaran SPM.
4. Masih menunggu dana yang di alokasikan yaitu Dana Siap Pakai (DSP) dari Kementerian BPBD dan Pengesahan SK penerima Bantuan dari Kementerian BPBD Pusat.
5. Jumlah bantuan/stimulan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih sangat kurang dibandingkan dengan kondisi masyarakat yang pada umumnya dalam kategori kurang/tidak mampu untuk hidup layak.
6. Koordinasi pelaksanaan kegiatan antar lintas sektor masih perlu ditingkatkan.
7. Belum optimalnya fungsi kelembagaan yang terbentuk dalam masyarakat.
8. Adanya pemahaman bahwa setiap jenis bantuan dari pemerintah adalah bantuan Cuma-Cuma dan tidak ada sanksi hukum yang mengikat.

Solusi untuk meningkatkan capaian indikator kinerja **Persentase Rumah Layak Huni (RLH) adalah :**

- 1) Membantu pemerintah dalam menuntaskan virus covid 19 agar segera normal sehingga perekonomian, PAD, pariwisata perhubungan dan lain lainnya bisa berjalan sesuai dengan rencana /target.
- 2) Pendataan ulang /validasi ulang rumah akibat bencana baik KTP, KK dan Bukti kepemilikan lahan.
- 3) Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan KTP, KK dan status lahan, sehingga pendataan rumah akibat bencana jelas peruntukannya.

- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pencapaian sasaran SPM.
- 5) Penambahan Sumber Daya Manusia untuk mendukung pencapaian sasaran SPM seperti merekrut tenaga fasilitator lapangan ataupun mengontrak tenaga ahli individual terutama dalam bidang IT.
- 6) Meningkatkan koordinasi secara intensif terhadap pelaksanaan kegiatan,
- 7) Meningkatkan kontinuitas komunikasi dan pembinaan terutama terhadap program kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari bantuan luar negeri, sehingga dapat terealisasinya bantuan langsung kepada masyarakat,
- 8) Mengoptimalkan pencapaian sasaran secara prioritas dan penyusunan rencana pembiayaan secara bertahap pada tahun anggaran berikutnya.

b. Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum

Peningkatan jumlah penduduk menuntut peningkatan sarana prasarana pendukung, salah satunya terkait ketersediaan sarana air minum layak. Air bersih merupakan komponen penting bagi kehidupan manusia. Pelayanan air bersih, khususnya air minum perpipaan, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan penataan lingkungan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman. Mengingat jumlah penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya, dalam menjalankan tugas penyediaan air minum perpipaan ini masih belum mencapai target pelayanan secara keseluruhan.

Capaian realisasi akses terhadap air minum sebesar 81,12% kurang dari target sebesar 79,76 % dengan capaian kinerja 101,71 %.

Tabel 3.47. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kunjungan Wisata (Covid19)	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	57,44%	46,95%
				Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	8 Dok.	8 Dok.
				Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum	7 Dok.	7 Dok.
				Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	2 DI	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi	2 P3A	2 P3A
				Pengembangan dan Peningkatan Kegiatan Operasional Komisi Irigasi Kabupaten	4 Kali	4 Kali
			Meningkatkan Produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kunjungan Wisata (Covid19)	Program penyediaan dan Pengolahan Air Baku	100%	226%
				Rehabilitasi Prasarana pengambilan dan aluran pembawa	23 JIK	52 JIK
			Meningkatkan akses rumah tangga dengan air minum layak (covid19)	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	79,76%	116%

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi
				Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	500 SR	952 SR
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 Dok.	12 Dok.
			Meningkatkan akses rumah tangga dengan sanitasi layak (covid19)	Program Pengelolaan Sanitasi Layak	86,28%	86,28%
				Penyediaan sarana sanitasi dasar pedesaan	16 Unit	16 Unit

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lombok Barat, 2020

Tercapainya realisasi capaian indikator kinerja disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Terkait dengan arah kebijakan yang dilakukan oleh Dinas PUPR yaitu Meningkatkan akses rumah tangga dengan air minum layak (covid19), Dinas PUPR melaksanakan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan dengan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan sebanyak 952 SR.
2. Terkait dengan arah kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman yaitu Meningkatkan Penanganan Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh, Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan Program Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.

Adapun upaya yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah

1. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih.
2. Melaksanakan pembentukan kelompok pengguna air bersih.

3. Koordinasi dengan ditjen anggaran lebih dioptimalkan untuk menyikapi ketentuan yang diatur didalam juknis DAK untuk menghindari kemungkinan tidak terserapnya anggaran.
4. Penggunaan tenaga kerja secara proposional antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja luar dengan tetap berdasarkan kompetensi kerja.
5. Koordinasi dan sinergi penyusunan anggaran perlu lebih dioptimalkan dengan tim anggaran pemerintah daerah untuk menghindari pekerjaan fisik yang tidak dapat dilaksanakan.
6. Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan melalui upaya identifikasi permasalahan lapangan. mendiskusikan langkah tindak dan ketepatan pelaporan. Pada tahun-tahun kedepan diupayakan agar perencanaan telah dipersiapkan satu tahun sebelum pelaksanaan konstruksi fisik.
7. Pada tahapan proses pengadaan barang jasa memerlukan waktu yang relatif panjang sehingga adanya ketentuan lelang cepat merupakan salah satu solusi untuk percepatan pelaksanaan konstruksi fisik.
8. Pendekatan dengan kepala desa dan jajarannya, tokoh masyarakat dan beberapa pekerja untuk dapat memasukkan tenaga kerja dari luar daerah guna percepatan penyelesaian pekerjaan.
9. Pengaturan dan distribusi air didasarkan atas kesepakatan penjadwalan pengalokasian air untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan.
10. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan rapat-rapat teknis.

Sasaran 6. Meningkatnya Daya Saing Sektor ekonomi Unggulan

Tabel 3.48
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 6
Meningkatnya Daya saing sektor Ekonomi Unggulan

Indikator kinerja		Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD	
			Target	Realiasi				
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah	%	13,18	12,21	92,66	14,45	84,50	
2	Nilai PDRB Perkapita (ADHK)	Juta Rupiah	17,83	15,68	87,94	20,55	76,30	
3	Nilai Realisasi Investasi	PMA	Juta US\$	121,39	19,69	16,22	177,73	11,08
		PMDN	Milyar	536,12	812,32	151,52	784,93	103,49
Rata-rata Capaian Kinerja					87,09		68,84	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Daya Saing Sektor Ekonomi Unggulan** belum mencapai target seperti yang diharapkan dengan rata-rata capaian pada tahun 2020 sebesar 87,09 %, demikian juga jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD belum mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 68,84.

a. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat mencatat bahwa persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2020 mencapai 12,88 Persen, masih lebih rendah dari target yang ditetapkan pada RKPD tahun 2020 sebesar 13,18 persen.

Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.652.529.725.599,34, atau 93,50 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.767.349.185.721,24, yang meliputi PAD dengan

realisasi sebesar Rp. 212.985.765.008,34 atau 84,55 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 251.904.996.796,71. Komponen Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp. 1.088.277.768.451,00 atau sebesar 96,84 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.123.763.086.382,00. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp. 351.266.192.140,00 atau 89,68 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 391.681.102.542,53.

Sedangkan pendapatan asli daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 212.985.765.008,34 atau 84,55 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 251.904.996.796,71. Adapun rincian komponen pendapatan daerah, dan PAD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.49. Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020

Uaian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Realisasi
PENDAPATAN	1.767.349.185.721,24	1.652.529.725.599,34	93,50
PENDAPATAN ASLI DAERAH	251.904.996.796,71	212.985.765.008,34	84,55
Pendapatan Pajak Daerah	107.239.551.110,90	70.245.485.990,78	65,50
Hasil Retribusi Daerah	17.588.700.000,00	13.032.536.313,49	74,10
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.008.894.967,38	13.338.227.432,62	88,87
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	112.067.850.718,43	116.369.515.271,45	103,84
DANA PERIMBANGAN	1.123.763.086.382,00	1.088.277.768.451,00	96,84
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	51.577.760.976,00	43.007.211.140,00	83,38
Dana Alokasi Umum	730.289.354.000,00	724.706.010.000,00	99,24
Dana Alokasi Khusus	341.895.971.406,00	320.564.547.311,00	93,76
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	391.681.102.542,53	351.266.192.140,00	89,68
Pendapatan Hibah	96.018.133.424,53	66.489.603.681,00	69,25
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	81.971.818.118,00	71.085.437.459,00	86,72
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	213.691.151.000,00	213.691.151.000,00	100,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Barat, 2020 (*Un Audit*)

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya terus dilakukan, namun realisasi PAD tahun 2020 belum tercapai. Beberapa penyebab tidak tercapainya PAD Lombok Barat

tahun 2020 sebagai berikut :

1. Pandemi covid-19 telah memukul sendi-sendi perekonomian daerah terutama sector pariwisata, yang berdampak pada Belum pulihnya tingkat penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini berdampak pada penerimaan sector pajak dan retrebusi daerah.
2. Belum terselesaikanya masalah PT.PELINDO III terhadap persoalan potensi pajak terhutang yang di sebabkan oleh belum keluarnya SKPH (surat ketetapan pemberian hak) dari kanwil BPN
3. Belum tuntasnya penyelesaian hutang pajak The Santosa.
4. Faktor Teknis Operasional antara lain :
 - a. Perbub-perbub yang belum masih perlu disesuaikan dan dilengkapi.
 - b. SDM, Teknologi Informasi dan Kerjasama yang perlu ditingkatkan
 - c. Belum signifikannya penerimaan pajak Daerah

Disamping faktor tersebut, rendahnya capaian PAD Lombok Barat tidak terlepas dari pengaruh pandemic covid-19 yang melanda dunia. Covid-19 telah meluluhlantakkan sector pariwisata Lombok Barat yang selama ini menjadi andalan sumber PAD. Sebelumnya industri pariwisata yang ada di Lombok Barat sedang melakukan pembenahan pasca bencana gempa bumi 2018, serta sedang mempersiapkan diri untuk turut mengambil bagian pada event Motor GP. Akan tetapi, selama masa pandemi ini baik turis lokal maupun mancanegara mengalami penyusutan jumlah yang sangat signifikan. Dari banyaknya sektor yang terkena dampak pandemi, Industri pariwisata merupakan salah satu yang terkena dampak terbesar dibanding industri-industri lainnya.

Virus Corona ini juga memaksa tutupnya banyak hotel pada masa pandemi ini, ribuan karyawan tetap juga dirumahkan dan hanya mendapatkan setengah gaji karna pandemi ini, yang membuat perekonomian para karyawan yang dirumahkan menurun. Selain

Hotel ada juga perusahaan pendukung pariwisata yang mengalami kerugian lainnya seperti industri travel.

Namun demikian, optimisme tetap harus ada. Kita juga harus mencermati bahwa saat pandemi berakhir ada kemungkinan membludaknya wisatawan yang datang karena sudah sangat bosan dirumah. Lombok Barat harus bersiap untuk ikut mengambil moment tersebut dalam menumbuhkan sektor pariwisata. Di sisi lain, upaya meningkatkan PAD selama masa pandemic ini masih berlangsung adalah dengan memaksimalkan sumber pajak bumi bangunan.

b. Nilai PDRB Perkapita

Berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik Lombok Barat, PDRB per kapita (ADHK) di Lombok Barat pada tahun 2020 sebesar Rp 14.032.000,00 per kapita, menurun dari tahun 2019 sebesar Rp 15.676.920,00 per kapita, dan masih lebih rendah dari target yang ditetapkan pada RKPD sebesar Rp 17.830.000,- dengan capaian sebesar 78,69 persen. Nilai PDRB per kapita Lombok Barat (ADHK) mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017, dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018 akibat gempa bumi yang melanda Pulau Lombok, dan meningkat kembali pada tahun 2019, dan menurun drastic pada tahun 2020 sebagai dampak pandemic Covid-19. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar Rp 14,15 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 15,45 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2018 sedikit menurun menjadi 15,31 juta rupiah dan meningkat kembali menjadi 15,68 juta rupiah pada tahun 2019, dan sebesar 14,03 juta tahun 2020. Perubahan angka PDRB per kapita atas harga konstan tidak dipengaruhi oleh factor inflasi.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lombok Barat masih berada dibawah nilai PDRB per kapita di Nusa Tenggara Barat yang pada tahun 2020 mencapai angka 17,53 juta rupiah atau masih terdapat selisih

sebesar 2,86 juta rupiah. PDRB per kapita (ADHK) di Kabupaten Lombok Barat dan Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.50
PDRB per kapita (ADHK) di Kabupaten Lombok Barat dan Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lombok Barat						
PDRB Per Kapita (ADHK) Rp 000	14.146	14.722	15.450	15.313	15.676	14.368
Pertumbuhan	4,71	4,07	4,94	-0,89	2,38	-8,35
NTB						
PDRB Per Kapita (ADHK) Rp 000	18.475	19.306	19.091	18.029	18.542	17.531
Pertumbuhan	20,20	4,5	-1,11	-5,56	2,85	-5,45

Sumber : Diolah dari BPS Kabupaten Lombok Barat, 2021; BPS Provinsi NTB, 2021

c. Nilai Investasi (PMA)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat realisasi investasi Penanaman Modal Penanaman Modal Asing (PMA) atau *foreign direct investment* (FDI) pada tahun 2020 (Januari-Desember) mencapai angka sebesar 31,77 juta US \$. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan pada RKPD tahun 2020 yaitu sebesar 121,39 juta US \$, dengan tingkat capaian sebesar 26,17 persen atau sangat rendah.

Rendahnya realisasi investasi Penanaman Modal Asing terjadi karena terdampak pandemi virus corona yang dirasakan hampir semua negara di dunia ini. Dari rilis BKPM Pusat mengatakan, rendahnya realisasi investasi asing akibat dampak ekonomi global yang sedang lesu karena dampak pandemi virus corona yang mulai masuk pada maret 2020, termasuk dalam hal ini di Lombok Barat. Pencapaian ini bukan karena investor asing enggan menaruh dananya di Indonesia termasuk di Lombok Barat. Namun, dampak wabah corona (Covid-19) turut

memengaruhi niat pemodal asing untuk mengeksekusi investasi.

d. Nilai Investasi (PMDN)

Kondisi ini berbanding terbalik dengan realisasi investasi PMDN yang ditopang oleh pengusaha lokal yaitu sebesar 1,147 trilyun rupiah dengan capaian sebesar 214,01 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 536,12 milyar rupiah. Ini sinyal positif pengusaha domestik kita mulai baik. Target dan realisasi jumlah investasi dan nilai investasi PMDN/PMA berfasilitas fiscal tahun 2020 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.51
Target dan realisasi jumlah investasi dan nilai investasi
PMDN/PMA berfasilitas fiscal tahun 2020

No	Jenis Investasi	Target		ealisasi		Capaian (%)	
		Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Nilai Investasi	Jumlah Proyek
1.	PMDN (Rp)	28	536.116.507.825	99	1.147.368.128.509	214,01	353,57
2.	PMA (US \$)	187	121.392.674	245	31.770.649	26,17	130,48

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Lombok Barat, 2021

Realisasi investasi PMDN Tahun 2020 yang melebihi target realisasi investasi Tahun 2020 merupakan pertanda yang baik dan cukup positif, meskipun dalam situasi pandemic covid-19. Kinerja investasi tetap menunjukkan geliat pertumbuhan di tengah-tengah pandemic. Makna strategis dari capaian positif realisasi investasi PMDN ini juga memperlihatkan kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental ekonomi di Lombok Barat, serta prospek pertumbuhan ekonomi ke depan dapat terjaga dengan baik.

Untuk mendukung peningkatan investasi di Lombok Barat ini diperlukan kerjasama dari semua pemangku kepentingan, termasuk

instansi pemerintah pusat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB untuk lebih memberikan kemudahan bagi para investor. Kepastian hukum berusaha dan investasi diharapkan tercipta seiring implementasi UU Cipta Kerja. Begitu juga, adanya iklim ketenagakerjaan yang mendukung iklim investasi. Kemudahan usaha dan investasi juga diwujudkan melalui, antara lain, pelayanan perizinan investasi dengan *online single submission* (OSS), insentif fiskal dan nonfiskal untuk investasi teknologi menengah dan tinggi, dan pengawalan dalam kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan melalui rapat koordinasi dengan OPD terkait.

Diharapkan para investor yang menunda eksekusi pada 2020 akan merealisasikan di 2021. Harapannya di tengah-tengah wabah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda melandai, program vaksinasi bisa menjadi *game changer* menuju perekonomian yang lebih baik. Faktor kuncinya datangnya investasi. Investasi menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional dan daerah. APBN saja tidak akan cukup untuk menutup seluruh pembiayaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, sudah menjadi komitmen pemerintah pusat dan daerah daerah untuk mempermudah adanya investasi.

Sasaran 7. Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Tabel 3.52
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD	
		Target	Realiasi				
1	Persentase Angka Kemiskinan	%	15,00	14,28	104,8	10,75	67,16
2	TPT	%	3,20	4,58	56,88	2,75	33,46
Rata-rata Capaian Kinerja					80,84		50,31

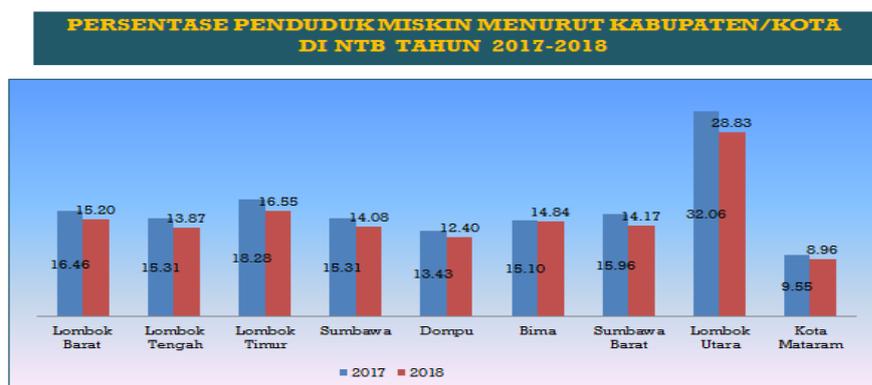
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat** yang terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu 1). Persentase Angka Kemiskinan dengan capaian 104,8 % dari target 15,00 % dengan capaian realisasi sebesar 14,28 %, 2). TPT dengan capaian 56,88 % dari target 3,20 % dengan capaian realisasi sebesar 4,58 %. Rata-rata capaian pada tahun 2020 sebesar 80,84 %.

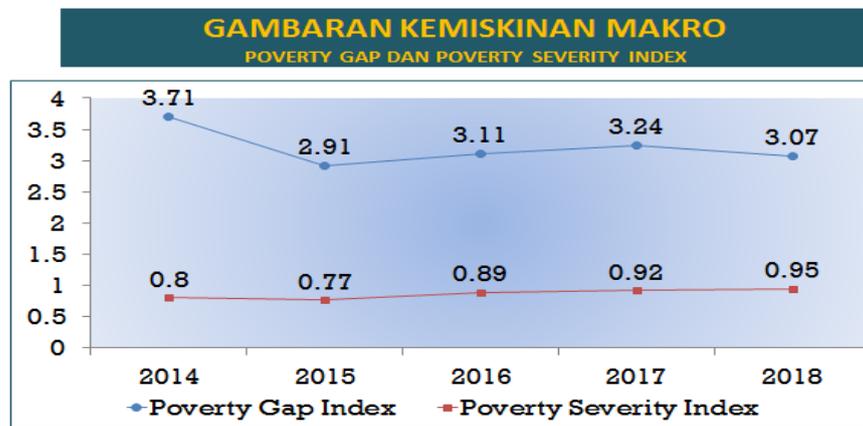
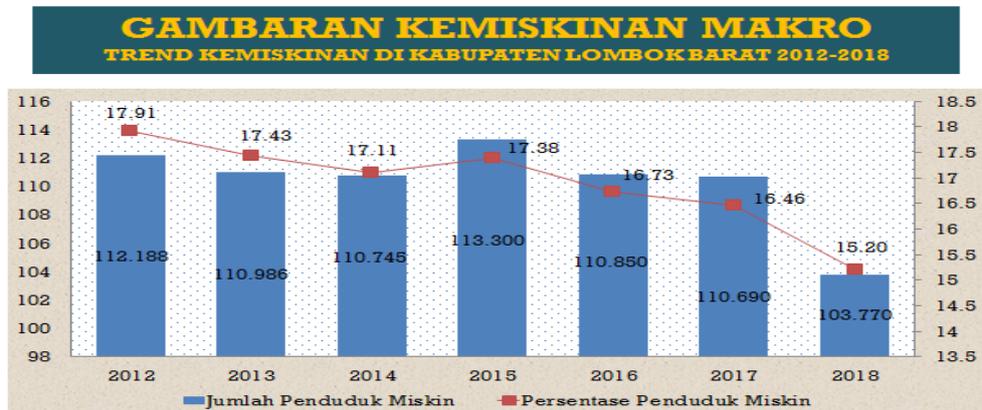
a. Persentase Angka Kemiskinan

Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Lombok Barat tahun 2018 mencapai 110.692 jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 6.922 jiwa, dari jumlah penduduk miskin 110.692 jiwa di tahun 2017. Kabupaten Lombok Barat merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbesar ketiga di NTB setelah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah.

Angka Kemiskinan turun 1,26% dari 16,46% tahun 2017 menjadi 15,20% tahun 2018. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun menjadi 3,07 dan Indeks Keparahan Kemiskinan turun menjadi 0,95.

Grafik 3.1
Angka kemiskinan Kab. Lombok Barat 2017-2018





Sumber : BPS Lombok Barat 2018

Perlu kegiatan yang bersifat integrasi, sinkron, komplementer dan inovatif untuk akselerasi penurunan angka kemiskinan di Lombok Barat, karena mereka yang miskin 37,16% tidak tamat SD, 47,81% tidak bekerja dan 18,41% bekerja di sektor pertanian yang bekerja tanpa upah/pekerja keluarga.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan masalah yang selalu dihadapi dalam perekonomian, pengangguran muncul karena adanya ketidaksesuaian antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Masalah pengangguran ini sangat penting karena

adanya pengangguran dapat menimbulkan masalah sosial termasuk masalah sosial dengan motif ekonomi. Pengangguran adalah mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan (atau mengembangkan) pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya (menemukannya). Definisi lainnya menyebutkan bahwa pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan, tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan. Negara manapun di dunia ini baik yang dikategorikan negara maju maupun negara sedang berkembang senantiasa menghadapi masalah pengangguran, perbedaannya negara berkembang tidak mampu memberikan tunjangan kepada warga negaranya yang menganggur, sedangkan negara maju mampu memberikan jaminan itu.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Sesuai dengan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), tingkat penganggur terbuka terdiri dari empat komponen, yaitu :

- Pertama, mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan.
- Kedua, mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha.

- Ketiga, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Keempat, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Menurut Badan Pusat Statistik Lombok Barat, tingkat pengangguran terbuka di Lombok Barat pada tahun 2020 sebesar 4,58%, masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada RKPD tahun 2020 sebesar 3,20. TPT Lombok Barat tahun 2020 juga meningkat dari tahun sebelumnya (2019) yang mencapai angka 3,76%, dan berada pada posisi ketiga TPT tertinggi Di Nusa Tenggara Barat setelah Kota Mataram (6,83) dan Kabupaten Sumbawa Barat (5,50) , serta masih berada dibawah TPT Provinsi NTB yang mencapai angka 4,22 persen.

Angka TPT Lombok Barat ini bergerak cukup pelan dalam periode 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015-2020. Pada tahun-tahun sebelumnya tingkat pengangguran terbuka di Lombok Barat juga tergolong tinggi, tahun 2008 mencapai angka 6,98%, mengalami penurunan secara perlahan, dan pada tahun 2012 mencapai angka 5,30%. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lombok Barat disajikan pada gambar berikut.

Grafik 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008-2020



Sumber : BPS Lombok Barat, 2021

Untuk diketahui bahwa angka TPT tahun 2020 sebesar 4,58% diperoleh BPS berdasarkan survey Susenas yang dilakukan pada bulan Februari tahun 2020 sebelum Pandemi Covid-19 melanda. Artinya angka tersebut belum memperhitungkan dampak *Corona Virus Deseases* (Covid-19) terhadap bidang ketenagakerjaan.

Apabila survey dilakukan pada saat pandemic covid-19, maka angka TPT di Lombok Barat kemungkinan akan lebih tinggi dari angka yang dipublish saat ini. Sebagaimana diketahui, kontraksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II dan kuartal III tahun 2020 menyebabkan terjadinya peningkatan pengangguran terbuka. Sektor yang paling banyak kehilangan pekerja adalah sektor perdagangan, industri manufaktur, konstruksi, jasa perusahaan, dan akomodasi serta makanan dan minuman (pariwisata). Pada tingkat nasional,

Bappenas memperkirakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2020 akan mencapai 8,1-9,2 persen. Jumlah tersebut jauh di atas realisasi 2019 yang mencapai 5,28 persen. Sedangkan pada 2021 diperkirakan mencapai 7,7 hingga 9,1 persen. Untuk itu, Pemerintah Pusat akan menjalankan strategi untuk memulihkan kembali ekonomi Indonesia, mendorong bertumbuhnya kewirausahaan hingga pembangunan infrastruktur sederhana di pedesaan yang bersifat padat karya, dengan harapan TPT bisa dikembalikan (jumlah pengangguran dan TPT) setidak-tidaknya mendekati sebelum pandemic.

Apabila melihat perbandingan di negara lain, Tingkat pengangguran di Amerika Serikat telah meningkat menjadi 14,7 persen pada April 2020. Ini merupakan imbas virus corona yang memukul perekonomian Negeri Paman Sam itu. Peningkatan ini berarti tingkat pengangguran di AS saat ini lebih buruk dari kondisi pengangguran pada masa Depresi Besar tahun 1930-an silam.

Untuk mengatasi meningkatnya angka pengangguran di Lombok Barat, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengatasi sumber masalah utamanya yaitu Covid-19. Pada tahun 2020, langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diantaranya adalah : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah merefokuskan anggaran kurang lebih 60 miliar untuk penanggulangan Covid 19. Hal ini disampaikan oleh Bupati H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si. saat rapat dengan Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda Provinsi dan Bupati/Wali Kota Se Nusa Tenggara Barat melalui Video Conference dari Ruang rapat Jayengrana, Selasa 7 April 2020, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah H. Baihaki, Kapolres Lombok Barat, para Asisten, dan

jajaran Kepala Dinas yang termasuk dalam gugus tugas penanganan covid 19.

Anggaran 60 miliar ini bisa kurang, bisa juga lebih tergantung keadaan dan walaupun nanti ada tuntutan lebih karena lamanya penanganan virus corona ini bisa diatasi, sudah disiapkan langkah-langkah terkait hal tersebut. Alokasi anggaran 60 miliar ini digunakan untuk kebutuhan petugas kesehatan, termasuk insentif, penyiapan APD dan kebutuhan kesehatan lainnya, dan penanggulangan dampak virus covid 19 antara lain pemberian bantuan sembako kepada keluarga yang sangat merasakan dampak covid 19.

Data Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat ada sekitar 1700 pekerja di PHK dan dirumahkan oleh hotel dan restouran di wilayah Senggigi akan diberikan stimulus yang akan dipadukan dengan sikap apa yang akan diambil terkait dengan kewajiban hotel dan restouran tersebut dan untuk sementara sudah diidentifikasi beberapa pilihan kebijakan yang akan diambil, misalnya mengurangi, menunda atau bahkan menolak kewajiban dari hotel maupun restouran ini dan nanti akan dikaitkan dengan sikap yang akan dilakukan terhadap para pekerja yang sudah dirumahkan tersebut.

Selain itu, salah satu faktor untuk menjaga stabilitas ekonomi-sosial dan politik dalam situasi pandemi ini dengan meningkatkan pertumbuhan sektor pangan. Sektor ini menjadi sangat strategis karena pembangunan ekonomi berkelanjutan bila didukung ketersediaan pangan, sekaligus menyerap tenaga kerja. Diperkirakan bahwa satu-satunya sector yang masih konsisten menyerap tenaga kerja di saat pendemi ini adalah sektor pertanian secara umum. Tercatat pada tahun 2019 sektro pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan utama penduduk Lombok Barat

usia 15 tahun ke atas, yaitu sebesar 22,11%, pada urutan ketiga setelah sector transportasi, pergudangan dan komunikasi (22,56%), jasa kemasyarakatan, social, perorangan dan lainnya (22,54%).

Tabel 3.53
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019

No	Lapangan usaha Utama	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	22,45	21,66	22,11
2	Pertambangan dan Penggalian	2,53	2,25	2,41
3	Industri	13,55	19,48	16,11
4	Listrik, Gas dan Air Minum	0	0	0
5	Konstruksi	0,08	0,8	0,39
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	17,41	0,58	10,16
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	15,69	31,64	22,56
8	Lembaga Keuangan, real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,29	0,33	3,72
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Perorangan dan Lainnya	22	23,26	22,54
Total		100	100	100

Sumber : BPS Lombok Barat, 2020

Upaya-upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, sekaligus sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Diketahui bahwa penurunan dalam pengangguran sebesar 1% akan mampu mengungkit pertumbuhan tambahan dalam GDP Riil yang mendekati 2%.

Sasaran 8. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.54
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 8
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi			
1 UHH	Tahun	66,84	66,94	100,15	67,92	98,56
Rata-rata Capaian Kinerja				100,15		98,56

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup** pada **Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** sudah mencapai target yang diharapkan dengan realisasi sebesar 66,94 % dari target yang ditetapkan sebesar 66,84 % dengan capaian kinerja 101,15 %. Demikian juga jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD belum mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 98,56 %.

Walaupun capaian kinerja sudah mencapai target, namun terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan terkait realisasi fisik dan keuangan serta capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2020. Permasalahan tersebut teridentifikasi berkaitan dengan faktor internal maupun eksternal, antara lain :

A. Faktor Internal

Terdapat beberapa permasalahan internal di Dinas Kesehatan dan jaringannya dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran sepanjang tahun 2020. Faktor internal sebagian besar berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, antara lain :

- 1) Penghitungan target sasaran program dan kegiatan menggunakan angka proyeksi pertumbuhan penduduk provinsi sehingga

kemungkinan jumlah sasaran program dan kegiatan terlalu tinggi mengakibatkan beberapa capaian program dan kegiatan tidak sesuai dengan target.

- 2) Masih terdapat kekurangan tenaga maupun prasarana dalam melakukan pengambilan data terkait kegiatan penunjang penyelesaian permasalahan prioritas seperti kasus *stunting*, deteksi dini kasus gizi bayi dan balita, ibu hamil risiko tinggi maupun kasus lainnya.
- 3) Beberapa paket pekerjaan konstruksi telah selesai pekerjaan fisik, namun tertunda pembayaran disebabkan belum lengkapnya persyaratan administrasi.
- 4) Capaian indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi satu tahun penuh karena data yang berasal dari Puskesmas dan jaringannya belum terekapitulasi secara lengkap dan akurat sampai disusunnya laporan tahun 2020.
- 5) Data indikator kinerja sebagian besar sulit terkumpul pada awal tahun karena mesti menunggu rekapitulasi dari UPTD Puskesmas dan RSUD Awet Muda Narmada sehingga data sering menjadi kurang lengkap, kurang akurat dan tidak tepat waktu.

B. Faktor Eksternal

Beberapa faktor eksternal yang dapat diidentifikasi terkait capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2020, antara lain :

- 1) Penetapan target indikator kinerja bersumber SPM terbaru bidang kesehatan belum dapat diakomodir karena regulasinya keluar ketika dokumen renstra perubahan tahun 2019-2024 selesai dijilid dan diperbanyak, selain itu penafsiran akan SPM terbaru belum sepenuhnya dipahami karena belum tersedianya

- petunjuk teknis penerapan SPM bidang kesehatan yang terbaru.
- 2) Pelaksanaan tender paket pekerjaan khusus konstruksi bersumber DAK 2020 sangat terlambat sehingga waktu pelaksanaan efektif tidak mencukupi menyebabkan banyak paket pekerjaan yang tidak dapat selesai tepat waktu sesuai kontrak.
 - 3) Informasi tentang petunjuk teknis penggunaan dana terutama bersumber APBN seringkali terlambat sehingga beberapa perencanaan kegiatan khususnya konstruksi batal dilaksanakan karena tidak cukupnya waktu pelaksanaan.
 - 4) Terdapat efisiensi anggaran selain rasionalisasi anggaran yang terjadi pada pertengahan tahun pelaksanaan sehingga banyak kegiatan beserta indikator kinerjanya tidak dapat dilaksanakan.
 - 5) Terjadinya kasus Pandemi yang disebabkan Virus Corona sejak maret 2020 hingga kini menyebabkan banyak kegiatan dan program Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 terhambat karena fokus untuk mengatasi permasalahan penyebaran Corona tersebut.

Dalam rangka mempertahankan capaian kinerja yang sudah mencapai target dan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang terjadi dalam capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2020, dapat diupayakan solusi sebagai berikut :

- 1) Melakukan penentuan target dan sasaran secara cermat dan proporsional berdasarkan berbagai referensi terkait sehingga ketimpangan antara penentuan target dengan realisasi tidak terlampau jauh.
- 2) Melakukan upaya pemenuhan sumber daya Dinas Kesehatan dengan melengkapi kebutuhan akan tenaga, sarana, prasarana dan alat kesehatan melalui usulan kegiatan melalui berbagai sumber dana serta memaksimalkan peran tenaga yang ada

ditambah rekrutmen tenaga yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

- 3) Melakukan percepatan proses tender bagi seluruh paket pekerjaan terutama yang berkaitan dengan pembangunan, rehabilitasi maupun renovasi sarana kesehatan.
- 4) Tetap melakukan monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan secara berkala, terus menerus dan berkelanjutan agar dihasilkan capaian yang sesuai target dan tepat sasaran.
- 5) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal dalam mengatasi pandemi corona yang diperkirakan masih berlanjut di tahun 2021

Sasaran 9. Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan

Tabel 3.55
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 9
Meningkatnya Kualitas Dan Mutu pendidikan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun Terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi			
1 Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,2	13,71	103,86	13,90	98,63
2 Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	6,25	6,41	102,56	7,19	89,15
Rata-rata Capaian Kinerja				103,21		93,89

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan** sudah mencapai target seperti yang diharapkan dengan rata-rata capaian pada tahun 2020 sebesar 103,21 %, Namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD belum mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 93,89 %.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Capaian indikator urusan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2020, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.56 Capaian indikator urusan bidang pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya akses pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	6,25	6,41	102,56
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,2	13,71	103,86
2	Meningkatnya Mutu pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar	Angka Melanjutkan SD ke SMP	%	100	100	100
		Angka Melanjutkan SMP ke SMA	%	100	100	100
3	Nilai AKIP	A	Nilai	A	A	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat, 2020

Capaian pelaksanaan program sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, serta capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.57
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 surat	1500 surat

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik 10.000 Kwh, Internet 5 line, sambungan PDAM 1 sambungan	Listrik 10.000 Kwh, Internet 5 line, sambungan PDAM 1 sambungan
				Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	119 unit	119 unit
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	636 OB	636 OB
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24 OB	24 OB
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.500 eks	38.500 eks
				Penyediaan Makanan dan Minuman	1300 kotak	1300 kotak
				Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	20 kali	20 kali
				Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	1634 orang	1634 orang
			Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 unit	2 unit
				Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas operasional	113 unit	113 unit
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20 unit	20 unit
			Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	50 orang	50 orang
			Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	2 laporan	2 laporan
				Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 laporan	1 laporan
			Meningkatkan Akses Pendidikan yang Berkeadilan dan Terjangkau (Covid 19)	Program Pendidikan Anak Usia Dini	100%	100%
				Penambahan Ruang Kelas Sekolah	11 ruang	11 ruang
				Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	10 paket	10 paket
				Pengadaan Mebelur Sekolah	8 paket	8 paket
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	22 ruang	22 ruang
				Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	19 TK Negeri	19 TK Negeri
				Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	100 orang	100 orang
			Meningkatkan Akses Pendidikan yang Berkeadilan dan Terjangkau	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun	100%	100%
				Pembangunan gedung sekolah	1 unit	1 unit
				Penambahan Ruang Kelas Sekolah	19 ruang	19 ruang

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	3 ruang	3 ruang
				Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	14 paket	14 paket
				Pembangunan pepustakaan sekolah	5 ruang	5 ruang
				Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	11 ruang	11 ruang
				Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	2 paket	2 paket
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	26 paket	26 paket
				Pengadaan Mebeluer Sekolah	17 paket	17 paket
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	45 ruang	45 ruang
				Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	60 orang	60 orang
				Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP	6 bulan	6 bulan
				Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP / MTs	400 sekolah	400 sekolah
				Penyelenggaraan Paket A Setara SD	100 orang	100 orang
				Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	3 lomba	1 lomba
				Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang TK, SLB, SKB dan SMP	1 tahun	1 tahun
			Meningkatkan Akses Pendidikan yang Berkeadilan dan Terjangkau	Program Pendidikan Non Formal	100%	100%

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	4 paket	4 paket
			Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	100%
				Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	1 tahun	1 tahun
				Pengembangan sistem Pendataan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2 dokumen	2 dokumen
				Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap Profesi pendidk	30 orang	30 orang
			Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	100%	65,15%
				Pembinaan komite sekolah	10 UPTD	10 UPTD
				Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	1 tahun	1 tahun
				Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	40 orang	40 orang

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat, 2020

Pada kegiatan Pembinaan Komite Sekolah yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020, terdapat belanja operasional pengelolaan UPTD Dikbud Kecamatan yang tidak direalisasikan secara optimal, hal tersebut disebabkan karena tahapan proses refocusing serta perubahan anggaran selama kurun waktu tahun anggaran 2020 sehingga belanja tersebut diatas tidak direalisasikan.

Pada kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya direncanakan untuk pelaksanaan Festival/Lomba Seni

Siswa Nasional (FLS2N) Tahun 2020 yang dilaksanakan dalam 6 cabang lomba. Namun karena dampak Pandemi Covid 19, kegiatan FLS2N Tahun 2020 secara Nasional tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tidak direalisasikan.

Walaupun capaian kinerja sudah mencapai target, namun terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan terkait capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Awal Tahun 2020 Kondisi Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) tidak memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung secara normal. Terdapat ratusan sekolah ditutup untuk mencegah penyebaran, ada ribuan siswa dan guru di Lombok Barat melakukan kegiatan belajar dari rumah dan kegiatan mengajar jarak jauh.
2. Terbitnya Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ, Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).
3. Kegiatan dan program yang menunjang percepatan pencapaian peningkatan Angka rata-rata lama sekolah untuk jenjang kesetaraan kejar Paket B dan C masih memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga diharapkan mampu meningkatkan dan mempercepat peningkatan angka rata-rata lama sekolah dalam mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lombok Barat .

4. Terbitnya Permendikbud No. 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang merupakan perubahan atas Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota memberikan pengaruh pada capaian indikator-indikator SPM terdahulu karena secara umum pengaturan cakupan standar pelayanan minimal bidang pendidikan lebih luas mengatur tentang pelayanan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan. Indikator-indikator capaian setiap jenjang pun berubah. Hal tersebut tentu menjadi catatan dan prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

Langkah-langkah yang di ambil dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dalam peningkatan capaian kinerja antara lain:

1. Pada masa pandemi Covid-19, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat melakukan sejumlah terobosan yang dilakukan secara cepat dan massif dengan kebijakan belajar dari rumah, melalui pembelajaran daring bagi semua siswa dan oleh semua guru.
2. Berdasarkan Surat Edaran 4 Menteri Dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat sangat memperhatikan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan dan penetapan zona untuk percepatan penanganan COVID-19, Dimana sekolah zona oranye dan merah tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, sekolah pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan Belajar Dari Rumah (BDR), sedangkan Satuan pendidikan di zona kuning diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan pertimbangan risiko kesehatan

yang tidak berbeda jauh dengan zona hijau dan menerapkan Prosedur Kesehatan yang sangat ketat. Saat ini ada 11 Sekolah di kabupaten Lombok Barat yang berada di zona hijau dan kuning yang telah melakukan pembelajaran tatap muka dengan persetujuan Pemerintah Daerah, Kepala Sekolah, dan Orang Tua.

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat juga melakukan Evaluasi bersama Kepala Satuan Pendidikan dengan terus berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk memantau tingkat risiko COVID-19 di daerah. Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman, terdapat kasus terkonfirmasi positif COVID-19, atau tingkat risiko daerah berubah menjadi oranye atau merah, satuan pendidikan wajib ditutup kembali.
4. Perencanaan Penganggaran yang lebih berbasis kepada percepatan pencapaian indikator angka rata-rata lama sekolah dalam bentuk program kesetaraan Kejar Paket B dan Kejar Paket C.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan komite sekolah dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan melalui pelaksanaan Program BOS yang tepat sasaran.
6. Perencanaan program dan penganggaran berbasis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan baik Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan telah menjadi based data dalam penyusunan Renstra maupun RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024 sehingga arah pelaksanaan program kegiatan diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang merupakan hak dasar seluruh warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

Sasaran 10. Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Tabel 3.58
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 10
Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun Terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi			
1 Kabupaten Layak Anak (KLA)	%	30,00	30,00	100,00	70,00	42,86
2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	89,00	89,05	100,06	91,50	97,32
Rata-rata Capaian Kinerja				100,03		70,09

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan** sudah mencapai target seperti yang diharapkan dengan rata-rata capaian pada tahun 2020 sebesar 100,03 %, Namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD belum mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 70,09 %.

Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan pernyataan perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tahunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP2KBP3A. Adapun capaian kinerja Dinas DP2KBP3A sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.59
Hasil capaian indikator kinerja utama DP2KBP3A

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
1	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM)	IKM	Persen	82,89	77,14	93,06
2	Meningkatnya nilai AKIP	Nilai AKIP	Persen	71	82,50	116,20
3	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus pada anak dan perempuan	Persentase penanganan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan	Persen	85,00	100,00	117,65

Sumber : DP2KBP3A Kab. Lombok Barat, 2020

Capaian persentase penanganan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan sudah mencapai target 100% karena semua pengaduan kasus yang masuk semua diberikan penanganan. Indikator Kabupaten Layak Anak beserta Skor yang dihasilkan dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :

Tabel 3.60
Capaian Indikator Kabupaten layak Anak

Indikator Kabupaten Layak Anak		Ukuran	Nilai
1	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Ada, dan mencakup 5 klaster KHA	60
2	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Persentase anggaran untuk 5 klaster KHA, dan meningkat setiap tahun	50
3	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	Ada, dan meningkat setiap tahun	40
4	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	Meningkat setiap tahun, dan mencakup seluruh tenaga/petugas pemberi layanan, terutama: pendidikan, kesehatan, sosial, dan penegak hukum	40
5	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	Ada, mencakup 5 klaster KHA dalam bentuk Profil Anak, dan diperbarui setiap tahun	50
6	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Ada, dan meningkat setiap tahun	30
7	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	Ada, dan meningkat setiap tahun	30

Indikator Kabupaten Layak Anak		Ukuran	Nilai
8	Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	100%	60
9	Tersedia fasilitas informasi layak anak	Ada, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlahnya meningkat setiap tahun	45
10	Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan	Ada, dan berperan dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak	40
11	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	Menurun setiap tahun	25
12	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	Ada, dan dimanfaatkan oleh orang tua/keluarga	25
13	Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)	Ada, dan dimanfaatkan oleh semua anak di luar asuhan keluarga	30
14	Angka Kematian Bayi (AKB)	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun	30
15	Prevalensi kekurangan gizi pada balita	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun	30
16	Persentase ASI eksklusif	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun	15
17	Jumlah Pojok ASI	Ada, dan meningkat setiap tahun	15
18	Persentase imunisasi dasar lengkap	Minimal 80%, dan meningkat setiap tahun	20
19	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Ada, dan dapat diakses oleh anak	20
20	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Meningkat setiap tahun	20
21	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun	20
22	Tersedia kawasan tanpa rokok	Ada, dan meningkat setiap tahun	20
23	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun, untuk anak laki-laki dan anak perempuan	30
24	Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	100% untuk anak laki-laki dan anak perempuan	50
25	Persentase sekolah ramah anak	Meningkat setiap tahun	20

Indikator Kabupaten Layak Anak		Ukuran	Nilai
26	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	Meningkat setiap tahun	20
27	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak	Ada, dan dapat diakses semua anak	45
28	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	100%	40
29	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	Persentase penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif meningkat	30
30	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	Ada, disosialisasikan, dan diimplementasikan (jika terjadi bencana)	20
31	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	100%	30
TOTAL NILAI			1000

Sumber : DP2KBP3A Kab. Lombok Barat, 2020

Capaian pelaksanaan program sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, serta capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.61
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG / KEG	TARGET	REALISASI
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A	Meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	1 Dokumen	1 dokumen
				Evaluasi Pelaksanaan PUG	1 Dokumen	1 dokumen

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG / KEG	TARGET	REALISASI
			Meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	29,61 %	29,61%
				Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	150 Orang	150 orang
			Meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	100,00%	100,00
				Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan pihak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75 Orang	75 orang
				Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56 Orang	56 orang

Sumber : DP2KBP3A Kab. Lombok Barat, 2020

Walaupun capaian kinerja sudah mencapai target, namun terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan terkait capaian indikator kinerja DP2KBP3A pada tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Masih belum efektifnya lembaga jejaring yang terbentuk karena kendala biaya operasional.

- 2) Masih belum efektifnya kelompok tri-bina maupun UPPKS untuk berkreatifitas, karena pembinaan/ pelatihan untuk maksud tersebut terkendala pada pembiayaan.

Langkah-langkah yang di ambil dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat dalam peningkatan capaian kinerja antara lain:

- 1) Mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah untuk diberikan tambahan dana guna memberikan bantuan biaya operasional lembaga/ jejaring agar lebih termotivasi, memberikan pelatihan ketrampilan kepada kelompok tri-bina maupun UPPKS untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- 2) Memberikan penghargaan kepada lembaga/ jejaring, kader, kelompok tri-bina maupun UPPKS yang telah berhasil mendukung dan berpartisipasi dalam menggerakkan program KKBPK yang bertujuan untuk lebih termotivasi untuk berkarya maupun berkreativitas.
- 3) Bekerja dengan OPD perencana dan OPD terkait untuk mewujudkan *Kabupaten Lombok Barat Layak Anak*. Indikator Kabupaten Layak Anak :
 - Hak Sipil kebebasan meliputi : akta kelahiran, informasi anak, partisipasi anak.
 - Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi : perkawinan anak, lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga, lembaga pengasuhan alternatif, infrastruktur layak anak.
 - Kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi : persalinan di faskes, prevalensi gizi, Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), Faskes dengan pelayanan ramah anak, air minum dan sanitasi, kawasan tanpa rokok,
 - Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya meliputi : PAUD-HI (Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif), wajar 12 tahun, Sekolah Ramah Anak, Pusat Kreativitas Anak (PKA).

- Perlindungan Khusus meliputi : korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, Anak Berhadapan Hukum (ABH), terorisme dan stigma.

Sasaran 11. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3.62
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 11
Terwujudnya Masyarakat Sadar Lingkungan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun Terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi			
1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	55,41	68,02	122,76	58,57	116,14
Rata-rata Capaian Kinerja				122,76		116,14

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** pada **Sasaran Strategis Terwujudnya Masyarakat Sadar Lingkungan** sudah mencapai target yang diharapkan dengan realisasi sebesar 68,02 % dari target yang ditetapkan sebesar 55,41 % dengan capaian kinerja 122,76 %. Demikian juga jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD sudah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 116,14 %.

Capaian pelaksanaan program sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, serta capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.63
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2020

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi
1	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan dan pemberdayaan aparatur dalam pelayanan persampahan, rekomendasi izin lingkungan, pelayanan informasi dan pos pengaduan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 surat	1500 surat
				Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	12 bln
				Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	57 unit	57 unit
				Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen
				Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5 orang	5 orang
				Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 buah	72 buah
				Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bln	12 bln

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi
				Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 kali	1 kali
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
				Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 unit	2 unit
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	3 unit	3 unit
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional	17 kendaraan	17 kendaraan
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6 unit	6 unit
			Peningkatan kinerja dan disiplin aparatur sipil negara	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
				Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dok	12 dok
				Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2 dok	2 dok
				Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	1 dok
				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 dok	2 dok

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi
				Kegiatan Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, dan DPPA	6 dok	6 dok
				Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 dok	1 dok
			Meningkatkan pelayanan serta peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		
				Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	3 Unit	3 Unit
				Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	106 TPS	106 TPS
				Kegiatan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	1 Unit	1 Unit
				Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan		
				Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2 kelompok	2 kelompok

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi
			Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah kabupaten lombok barat	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
				Penilaian Kota Sehat / Adipura	6 lokasi	6 lokasi
				Pemantauan Kualitas Lingkungan	11 Sungai	11 Sungai
				Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	24 usaha dan atau kegiatan	24 usaha dan atau kegiatan
				Pengelolaan B3 dan Limbah B3	48 usaha dan atau kegiatan	48 usaha dan atau kegiatan
				Kegiatan Dampak Pengkajian Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen
				Kegiatan Penyusunan AMDAL	300 Rekomendasi ijin	451 Rekomendasi ijin
				Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	100%
				Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri		
				Pelatihan dan/atau sertifikasi bagi tenaga teknis di bidang lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi
			Rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mengedepankan partisipasi dan peran serta masyarakat	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		
				Kegiatan Konservasi Sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	20 Mata Air	20 Mata Air
				Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	1 desa	1 desa
				Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	1 lokasi	1 lokasi
				Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	5 sekolah	5 sekolah
				Kegiatan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	-	-
				Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam		
				Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi
				Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Lahan Eks Tambang Bahan Galian Non Logam	5 lokasi	5 lokasi
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
				Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	19 Dokumen	19 Dokumen
				Kegiatan Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	1 Dokumen	1 Dokumen
				Program Peningkatan Pengendalian Polusi		
				Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	4 unit	4 unit

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Barat, 2020

Walaupun capaian kinerja sudah mencapai target, namun terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan terkait capaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2020.

Permasalahan yang dihadapi secara umum adalah jumlah (kuantitas) personil di Dinas Lingkungan Hidup sudah mencukupi tetapi secara kualitas masih kekurangan personil, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kurangnya armada persampahan berupa Truck Sampah sehingga

mengurangi efektifitas pelayanan persampahan dimana sampah yang bisa tertangani baru 61,03% dari total produksi sampah perkotaan di Kabupaten Lombok Barat.

- 2) Kurangnya personil pada Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai latar pendidikan bidang Laboratorium, Operator Komputer, Akuntansi dan Teknik Lingkungan.
- 3) Kurangnya jumlah dan kemampuan tenaga Operator Komputer untuk menunjang kegiatan dibidang softwear dan aplikasi komputer dimana semua kegiatan administrasi dari perencanaan, keuangan dan pelaporan kedepannya sudah mengarah ke sistem aplikasi online. Sampai saat ini Aplikasi On line yang sudah diterapkan pada DLH Kabupaten Lombok Barat antara lain sistem aplikasi Web DLH Lobar, Web PPID, SIRUP LKPP dan penerapan Sistem Perencanaan (SIPD).
- 4) Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Langkah-langkah yang di ambil dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat dalam peningkatan capaian kinerja antara lain:

- 1) Mengusulkan penambahan armada persampahan khususnya Truck sampah dimana idealnya ada minimal 40 Armada Truck Sampah untuk melayani 10 Kecamatan di Lombok Barat.
- 2) Melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi personil
- 3) Mengusulkan permintaan personil khususnya yang mempunyai kualifikasi laboratorium dan teknik lingkungan kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah.

- 4) Mengupayakan penguasaan pengetahuan dasar komputer kepada staf untuk penyelesaian pekerjaan.
- 5) Mengusulkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

Sasaran 12. Menurunnya Indeks Risiko Bencana

Tabel 3.64
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 12
Menurunnya Indeks Risiko Bencana

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Tahun RPJMD	%
		Target	Realiasi			
1 Indeks Risiko Bencana Daerah (IRB)	Indeks	150,39	157,90	95,01	128,94	77,54
Rata-rata Capaian Kinerja				95,01		77,54

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **Indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana Daerah (IRB)** pada **Sasaran Strategis Menurunnya Indeks Risiko Bencana** masih belum mencapai target yang diharapkan dengan realisasi sebesar 157,90 % dari target yang ditetapkan sebesar 150,39 % dengan capaian kinerja 95,01 %. Demikian juga jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD belum mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 77,54 %.

Capaian pelaksanaan program sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, serta capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran pada BPBD Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.65
Capaian Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	BPBD	Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	90,25
				Penyediaan jasa surat menyurat	1000	1000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, air dan Listrik	12	12
				Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas Operasional	17	17
				Penyediaan Jasa administrasi keuangan	132	132
				Penyediaan Jasa kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun	60	60
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3	3
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang Undangan	60	60
				Penyediaan makan minum	150	150
				Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	27	23
			Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17	17

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12	12
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	14	14
			Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	100
				Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	83	83
				Pemantauan Disiplin dan kinerja Pegawai	12	12
			Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur serta kualitas sarana dan prasarana publik	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.	12	12
				Penyusunan Laporan Keuangan Semester	8	8
				Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun dan tahunan.	1	1
				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.	2	2
				Penyusunan RKA, RKAP, DPA dan DPPA	4	4
				Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	4	4
				Penyusunan Profil/Monografi	20	20

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi
			Menyusun RPB ,mitigasi, Sosialisasi, Diseminasi, penyebaran informasi, pelatihan, bimtek terhadap aparatur/masyarakat serta pemberdayaan masyarakat;	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100	100
				Pengurangan Risiko Bencana	2	2
				Penyusunan database lokasi bencana	1	1
				Peningkatan kemampuan dan keterampilan BPBD penanggulangan bencana	200	200
				Pemantauan Penyebaran Informasi Bencana	2	2
				Pemberdayaan Masyarakat dalam kesiapsiagaan	2	2
			Mengembangkan system komando Koordiansi dalam kegiatan Penanggulangan Bencana, Tanggap Darurat, secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh	Program kedaruratan dan logistik	100	100
				Pengadaan tempat penampungan sementara dan BPBD evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	12	12
				Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari BPBD ancaman/korban bencana alam	3	3
				Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di BPBD tempat penampungan sementara	2	2
				Penanganan pengungsi akibat bencana	12	12

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi
				Program Pemulihan Pasca Bencana	100	100
				Pemulihan sarana dan prasarana vital akibat bencana	2	2
				Survey dan investigasi lokasi pasca bencana	2	2
				Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana	2	2
				Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah Pasca bencana	1	1

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lombok Barat, 2020

Semakin disadari dampak dari kejadian Bencana serta meningkatnya kuantitas kejadian bencana dari tahun ke tahun di Kabupaten Lombok Barat menjadikan Pengurangan Risiko Bencana menjadi perhatian dalam Program kegiatan BPBD. Adapun kendala dan hambatan yang harus dikurangi dan dihilangkan untuk mewujudkan Program kegiatan BPBD Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Makin meluasnya banjir dan longsor di daerah aliran sungai dan tebing.
- 2) Lemahnya sistem kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
- 3) Kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana.
- 4) Lambatnya usaha pengembangan sistem pemulihan bencana.
- 5) Masing kurangnya dokumen pengurangan resiko bencana per jenis bencana.

Adapun Tindak lanjut dan solusi penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kapasitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan .
- 2) Mengoptimalkan pengurangan resiko bencana melalui mitigasi

- struktural dan struktural.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan semua stakeholder, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka Penanggulangan Bencana.
 - 4) Peningkatan tematik kawasan rawan bencana dengan penambahan target lokasi DESTANA.
 - 5) Mengembangkan system komando Koordiansi dalam kegiatan Penanggulangan Bencana, Tanggap Darurat, secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
 - 6) Menjalin komunikasi yang harmonis dan efektif dengan stakeholder lainnya dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

6. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 12 program dari 18 Program utama. Adapun pencapaian dari setiap program tersebut diuraikan dibawah ini :

- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- 2) Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Program Peningkatan Rumah Layak Huni
- 4) Program Peningkatan Akses Air Minum Layak.
- 5) Program Peningkatan Investasi.
- 6) Program Penanggulangan Kemiskinan.
- 7) Program Peningkatan Usia Harapan Hidup.
- 8) Program Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah.
- 9) Program Peningkatan Harapan Lama Sekolah.
- 10) Program Pengurustamaan Gender.
- 11) Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
- 12) Program Penanggulangan Bencana.

12 program tersebut ditujukan untuk mencapai 19 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat Periode 2019-2024 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ke 19 Indikator Kinerja tersebut sebesar Rp. 901.973.916.113,62 dari total anggaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 sebesar Rp.1.893.671.160.410,53

Berdasarkan data, tahun anggaran 2020 pada program utama yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja ke 19 indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 901.973.916.113,62 yang diserap sebesar Rp. 834.118.776.297,77 atau 92,47 %.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahun (RPJMD) dan dokumen rencana tahunan. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2020 dari 19 indikator kinerja Utama (IKU) dengan capaian rata-rata kinerja sebesar 128,65% dan efisiensi anggaran sebesar Rp. 67.855.139.815,85 atau 7,52 %, walaupun ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

- 1) Ketepatan pelaksanaan program yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
- 2) Terdapat konsistensi dalam implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 3) Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan didalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan program tahun 2020.

Berikut tabel analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja untuk tahun anggaran 2020, sebagai berikut :

Tabel 3.66
Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja untuk Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2020			Nama Program	Keuangan				
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,89	85,00	102,55	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	184.940.377.877,87	175.499.711.246,00	94,90
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2.	Opini BPK	Opini	100	100	100	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.442.912.350,00	1.440.333.250,00	99,82
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	3.	Nilai AKIP Daerah	Nilai	71,00	62,87	88,55	Program Peningkatan AIKP Daerah	26.071.341.888,77	21.859.581.489,23	83,85
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	4.	Persentase Wilayah Terhubung Dengan Pusat Perekonomian	%	76,55	69,56	90,87	Program Peningkatan Konektivitas Wilayah	69.959.784.192,67	67.425.330.335,00	96,38
5	Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	5.	Rasio RLH	%	83,98	97,68	116,31	Program Peningkatan Rumah Layak Huni	37.797.458.539,60	35.856.088.522,00	94,86
		6.	Persentase RT dengan Akses Air Minum Layak	%	79,76	81,12	101,71	Program Peningkatan Akses Air Minum Layak	9.138.436.000,00	8.640.104.000,00	94,55
6	Meningkatnya Daya Saing Sektor Ekonomi Unggulan	7.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	13,18	12,21	92,66	Program Peningkatan Pembangunan Ekonomi	9.212.596.325,00	8.472.467.030,00	91,97

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2020			Nama Program	Keuangan				
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	%		
	8.	Nilai PDRB Perkapita	%	17,83	15,68	87,94	Program Peningkatan PDRB Sektor-sektor Unggulan	82.395.958.170,50	53.298.672.582,00	64,69	
	9.	Nilai Investasi					Program Peningkatan Investasi	51.180.400,00	51.178.200,00	99,99	
		PMDN	Rp. M	536,12	812,32	151,52					
		PMA	US (Juta)	121,39	19,69	16,22					
7	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat	10.	Program angka Kemiskinan	%	15,00	14,28	95,20	Program Pemerataan Pembangunan	769.596.553,00	719.989.012,00	93,55
								Program Penanggulangan kemiskinan	13.743.516.500,00	13.471.492.390,00	98,02
		11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,20	4,58	56,88	Program Penurunan Angka Pengangguran	10.327.239.350,00	10.220.599.278,00	98,97
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12.	Usia Harapan Hidup	Tahun	66,84	66,94	100,15	Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	309.877.215.314,34	294.144.780.799,56	94,92
9	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	13.	Harapan lama Sekolah	Tahun	13,20	13,71	103,86	Program Peningkatan Harapan Lama Sekolah	4.937.493.207,28	4.705.059.333,00	95,29
		14.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,25	6,41	102,56	Program Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah	121.477.501.516,59	119.104.564.415,98	98,05
10	Meningkatnya Partisipasi Perempuan	15.	Kabupaten Layak Anak	%	30	30	100	Program	6.772.639.970,00	6.389.812.605,00	94,35

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2020			Nama Program	Keuangan				
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	%		
dalam Pembangunan						Pengurustamaan Gender					
	16.	Indeks Pembangunan Gender	%	89,00	89,05		100,06				
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	17.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	55,41	68,02	122,76	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	10.158.758.098,00	10.055.993.000,00	98,99
12	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	18.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	150,39	157,90	95,00	Program Penanggulangan Bencana	2.899.909.860,00	2.763.018.810,00	95,28
Rata-rata Capaian							128,65		901.973.916.113,62	834.118.776.297,77	92,47

Dari table di atas terlihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 128,65 dengan realisasi anggaran sebesar 92,47 % dari pagu anggaran sebesar Rp.901.973.916.113,62 dengan realisasi sebesar Rp. 834.118.776.297,77. Terdapat 11 program yang sudah mencapai target dan 7 program yang belum mencapai target. Ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran, walaupun anggaran tidak mencapai 100 % namun capaian kinerja sudah melampaui target yang diharapkan.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 7,52 % atau sebesar Rp. 67.855.139.815,85,- dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp.901.973.916.113,62 dengan realisasi sebesar Rp. 834.118.776.297,77,-. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya rata-rata capaian melebihi target yaitu sebesar 128,65 % dari target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan menggunakan harga yang maksimal yang tertulis dalam DPA, sepanjang masih dimungkinkan untuk menggunakan harga di bawah standar DPA namun tidak mengurangi kualitas dan klasifikasi yang diinginkan tetap bisa terpenuhi.

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan anggaran untuk tahun anggaran 2020 pada table berikut :

Tabel 3.67
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran
Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGGARAN			
				PAGU	REALISASI	EFISIENSI	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	184.940.377.877,87	175.499.711.246,00	9.440.666.631,87	5,10
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2.	Opini BPK	1.442.912.350,00	1.440.333.250,00	2.579.100,00	0,18
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	3.	Nilai AKIP Daerah	26.071.341.888,77	21.859.581.489,23	4.211.760.399,54	16,15
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	4.	Persentase Wilayah Terhubung Dengan Pusat Perekonomian	69.959.784.192,67	67.425.330.335,00	2.534.453.857,67	3,62
5	Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	5.	Rasio RLH	37.797.458.539,60	35.856.088.522,00	1.941.370.017,60	5,14
		6	Persentase RT dengan Akses Air Minum Layak	9.138.436.000,00	8.640.104.000,00	498.332.000,00	5,45
6	Meningkatnya Daya Saing Sektor Ekonomi Unggulan	7.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	9.212.596.325,00	8.472.467.030,00	740.129.295,00	8,03
		8.	Nilai PDRB Perkapita	82.395.958.170,50	53.298.672.582,00	29.097.285.588,50	35,31
		9.	Nilai Investasi PMDN PMA	51.180.400,00	51.178.200,00	2.200,00	0,00
7	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat	10.	Program angka Kemiskinan	769.596.553,00	719.989.012,00	49.607.541,00	6,45
				13.743.516.500,00	13.471.492.390,00	272.024.110,00	1,98
		11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	10.327.239.350,00	10.220.599.278,00	106.640.072,00	1,03

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGGARAN			
				PAGU	REALISASI	EFISIENSI	%
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12	Usia Harapan Hidup	309.877.215.314,34	294.144.780.799,56	15.732.434.514,78	5,08
9	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	13	Harapan lama Sekolah	4.937.493.207,28	4.705.059.333,00	232.433.874,28	4,71
		14	Rata-rata Lama Sekolah	121.477.501.516,59	119.104.564.415,98	2.372.937.100,61	1,95
10	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	15	Kabupaten Layak Anak	6.772.639.970,00	6.389.812.605,00	382.827.365,00	5,65
		16	Indeks Pembangunan Gender				
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	10.158.758.098,00	10.055.993.000,00	102.765.098,00	1,01
12.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	18	Indeks Risiko Bencana	2.899.909.860,00	2.763.018.810,00	136.891.050,00	4,72
Rata-rata Capaian				901.973.916.113,62	834.118.776.297,77	67.855.139.815,85	7,52

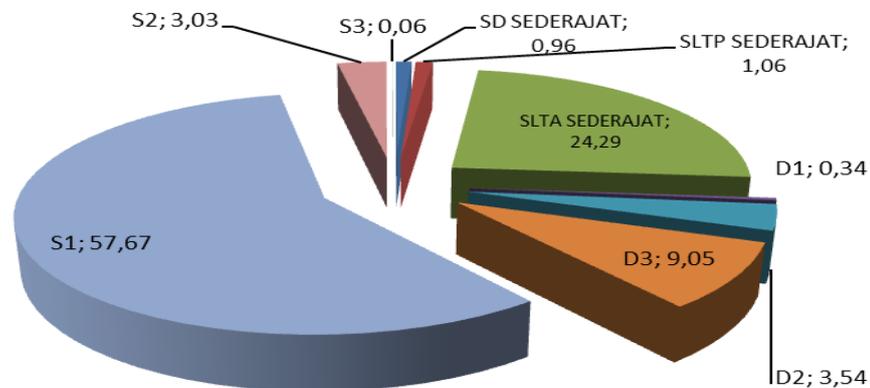
Selain sumberdaya anggaran pencapaian indikator kinerja juga dipengaruhi oleh Sumberdaya Manusianya.

Tabel 3.68. Jumlah PNS Kabupaten Lombok Barat Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	L	P	JML
1	SD SEDERAJAT	58	5	63
2	SLTP SEDERAJAT	62	7	69
3	SLTA SEDERAJAT	1.037	549	1.586
4	D1	6	16	22
5	D2	123	108	231
6	D3	166	425	591
7	S1	1.856	1.909	3.765
8	S2	138	60	198
9	S3	3	1	4
JUMLAH		3.449	3.080	6.529

Sumber : BKDPSDM Kabupaten Lombok Barat, 2020

Gambar 3.2. Persentase PNS Kabupaten Lombok Barat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020



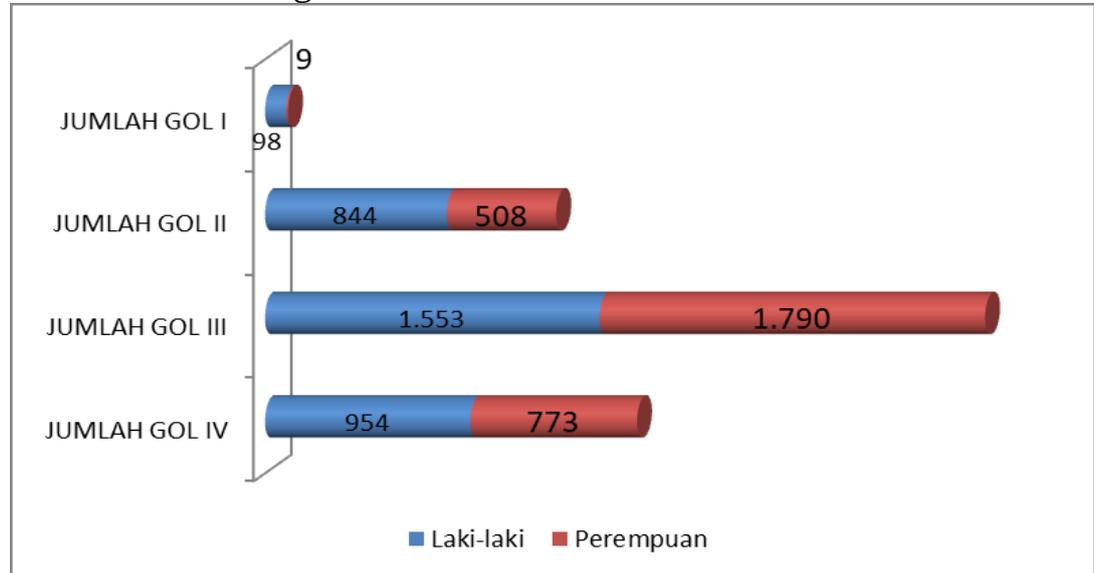
Sumber : BKDPSPDM Kabupaten Lombok Barat, 2020

Jenjang pendidikan Sarjana merupakan tingkat pendidikan yang mendominasi PNS dengan persentase sebesar 57,67% seperti gambar 5 di atas. Pada gambar 6 di bawah, dapat terlihat detail pendidikan lulusan Strata-1 mendominasi jumlah Pendidikan terbanyak. Lulusan SMA atau sederajat menjadi tingkat pendidikan kedua tertinggi dengan jumlah 1.586 orang, disusul dengan lulusan Diploma 3 sebanyak 591 orang dan Diploma 2 sebanyak 231 orang. Patut disyukuri, bahwa birokrasi di Lombok Barat juga memiliki kualifikasi Sumberdaya Manusia dengan jenjang pendidikan tertinggi (S3) yaitu sebanyak 4 orang doktor.

Golongan III merupakan Golongan dominan dari PNS yaitu sebanyak 51,20% dari total PNS atau berjumlah 3.343 PNS, disusul dengan Golongan IV sebesar 26,45% atau 1.727 dari seluruh PNS. Sedangkan Golongan I berjumlah 1,64% dari total PNS. Besarnya persentase Golongan III memiliki kaitan dengan tingkat pendidikan D-IV/S-1 yang merupakan tingkat pendidikan terbanyak yang dimiliki

oleh PNS sesuai pada Gambar di atas.

Gambar 3.3. Jumlah PNS Kabupaten Lombok Barat Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber : BKDPSPDM Kabupaten Lombok Barat, 2020

PNS eselon IV a dengan golongan III mendominasi PNS dengan jumlah 478 orang, diikuti PNS eselon IV b dengan jumlah 87 orang, dan PNS eselon III b golongan IV dengan jumlah 86 orang. Data PNS Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 berdasarkan golongan dan eselon secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.69. Data PNS Kabupaten Lombok Barat Menurut Golongan Dan Eselon Tahun 2020

NO	GOL	ESELON								STAF	TOTAL
		IIA	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVB	V	JML		
1	IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IV/d	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	IV/c	-	24	-	-	-	-	-	24	1	25
4	IV/b	-	5	38	15	4	-	-	62	3	65
5	IV/a	-	-	16	71	37	4	-	128	11	139
JMLH GOL IV		1	29	54	86	41	4	-	215	15	230
6	III/d	-	-	3	30	308	18	-	359	62	421
7	III/c	-	-	-	1	138	15	-	154	66	220

NO	GOL	ESELON								STAF	TOTAL
		IIA	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVB	V	JML		
8	III/b	-	-	-	-	32	30	-	62	235	297
9	III/a	-	-	-	-	-	24	-	24	677	701
JMLH GOL III		-	-	3	31	478	87	-	599	1.040	1.639
JML ESL & STAF		1	29	57	117	519	91	-	814	1.055	1.869

Sumber : BKDPSDM Kabupaten Lombok Barat, 2020

B. REALISASI ANGGARAN

Target pendapatan daerah Kabupaten Lombok Barat pada anggaran perubahan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.767.349.185.721,24 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.687.875.004.287,65 atau 95,50 %. Rincian target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2020 dapat di lihat pada tabel 3.70 sebagai berikut :

Tabel 3.70
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN	1.767.349.185.721,24	1.687.875.004.287,65	95,50
PENDAPATAN ASLI DAERAH	251.904.996.796,71	218.982.013.696,65	86,93
Pendapatan Pajak Daerah	107.239.551.110,90	70.245.485.990,78	65,50
Hasil Retribusi Daerah	17.588.700.000,00	13.032.536.313,49	74,09
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.008.894.967,38	13.338.227.432,62	88,86
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	112.067.850.718,43	122.365.763.959,76	109,18
DANA PERIMBANGAN	1.123.763.086.382,00	1.088.277.768.451,00	96,84
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	51.577.760.976,00	43.007.211.140,00	83,38
Dana Alokasi Umum	730.289.354.000,00	724.706.010.000,00	99,23
Dana Alokasi Khusus	341.895.971.406,00	320.564.547.311,00	93,76
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	391.681.102.542,53	380.615.222.140,00	97,17
Pendapatan Hibah	96.018.133.424,53	95.838.633.681,00	99,81
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	81.971.818.118,00	71.085.437.459,00	86,71
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	213.691.151.000,00	213.691.151.000,00	100

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
BELANJA	1.893.671.160.410,53	1.784.074.477.631,73	94,21
BELANJA TIDAK LANGSUNG	991.697.244.296,91	949.955.701.333,96	95,79
Belanja Pegawai	646.680.730.428,86	615.169.082.951,00	95,12
Belanja Bunga			
Belanja Hibah	34.422.952.229,96	32.174.966.802,96	93,46
Belanja Bantuan Sosial	7.775.000.000,00	7.770.000.000,00	99,93
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.482.825.111,09	11.466.845.185,00	91,86
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	242.383.843.527,00	242.380.358.253,00	99,99
Belanja Tidak Terduga	47.951.893.000,00	40.994.448.142,00	85,49
BELANJA LANGSUNG	901.973.916.113,62	834.118.776.297,77	92,47
Belanja Pegawai	60.233.206.378,60	59.091.539.781,00	98,10
Belanja Barang dan Jasa	444.524.710.283,58	418.647.805.697,77	94,17
Belanja Modal	397.215.999.451,44	356.379.430.819,00	91,48
SURPLUS / DEFISIT	(126.321.974.689,29)	(96.199.473.344,08)	76,15
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	141.402.252.428,29	149.983.214.764,29	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	26.102.252.428,29	26.102.252.428,29	100
Penerimaan Pinjaman Daerah	115.000.000.000,00	123.771.112.336,00	107,62
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	300.000.000,00	109.850.000,00	36,61
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.080.277.739,00	43.292.334.195,00	287,07
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
Pembayaran Pokok Utang	15.080.277.739,00	43.292.334.195,00	287,07
PEMBIAYAAN NETTO	126.321.974.689,29	106.690.880.569,29	84,45
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	10.491.407.225,21	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 .(un-Audit).

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa rata-rata realisasi komponen pendapatan daerah mencapai 95,50%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 hanya mencapai Rp. 218.982.013.696,65 atau 86,93% dari target yang ditetapkan, sementara komponen Dana Perimbangan pada tahun 2020 realisasinya sebesar Rp. 1.088.277.768.451,00 atau mencapai 96,84% dari target yang direncanakan, dan komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp. 380.615.222.140,00 atau mencapai

97,17%. Rendahnya realisasi komponen PAD disebabkan kejadian bencana non alam Pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020 yang berdampak pada sector pariwisata di Senggigi sebagai sumber Pajak dan Retribusi Daerah sehingga realisasinya menurun drastis, yakni Pendapatan Pajak daerah yang capainnya hanya sebesar 65,50% dan Hasil Retribusi Daerah yang capaiannya hanya sebesar 74,09%

Sementara itu kontribusi komponen-komponen Pendapatan Daerah terhadap pendapatan daerah sendiri didominasi oleh komponen Dana Perimbangan yakni sebesar 96,84%, hal ini disebabkan tingginya realisasi sub komponen pembentuk Dana Alokasi Umum yang mencapai 9,23% dan Dana Alokasi Khusus yang mencapai 93,76%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan atau kemandirian daerah masih tergantung dari dana Pusat atau Provinsi.

Sementara untuk penyerapan anggaran belanja langsung untuk program/kegiatan utama pada tahun 2020 sebesar Rp 834.118.776.297,77,- (92,47%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 901.973.916.113,62,-. Sedangkan realisasi anggaran belanja tidak langsung untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 949.955.701.333,96,- (95,79%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 991.697.244.296,91,-. Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 sebagai berikut :

1. APBD Belanja tidak langsung sebesar Rp 949.955.701.333.296,91 (95,79%);
2. APBD Belanja langsung sebesar Rp 834.118.776.297,62,- (92,47%);

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.70 di atas.

Adapun rincian realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat 2020 dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

BAB IV

INOVASI DAN PRESTASI KERJA

A. INOVASI

Inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang innovator (orang yang membuat inovasi). Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang innovator melalui berbagai macam aksi ataupun penelitian yang terencana. Inovasi dalam suatu instansi pemerintah akan melibatkan kreativitas dari para pegawainya, terutama dalam inovasi pelayanan terhadap masyarakat/pelayanan public.

Berikut beberapa inovasi yang sudah dilakuka oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, antara lain :

1. Aplikasi “dr. Sapto Anthro” Berbasis Android

Aplikasi ini diciptakan oleh seorang dokter yang bertugas di UPT BLUD Puskesmas Sekotong. Aplikasi ini digunakan untuk mengecek status gizi seseorang.

Tujuan inovasi ini untuk mempermudah, mempecepat, meningkatkan akurasi penemuan dan intervensi status gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sekotong. Aplikasi ini dapat meningkatkan pelibatan masyarakat dalam penilaian status gizi bagi putra-putri mereka

Aplikasinya adalah dr. Sapto-Anthro. Terdownload lebih dari 1.000 perangkat melalui PlayStore, dan pemasangan offline tidak dapat kami dihitng. Karena masyarakat dapat melakukan penilaian status gizi sebagai penapisan (*screening*) awal sebelum diperifikasi oleh petugas kesehatan.

Berdasarkan aplikasi yang dibuat, Dr. Sapto Sutardi mendapatkan gelar sebagai tenaga kesehatan teladan Puskesmas se-Indonesia bersama 140 orang lainnya. Penghargaan langsung

diberikan oleh Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto dalam ajang “Inovasi Pelayanan Kesehatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”.

2. E-Demung (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Berbasis Elektronik Kecamatan Labuapi.

E-Demung merupakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Berbasis Elektronik. Aplikasi ini merupakan sebuah inovasi yang menjawab beberapa keluhan masyarakat akan pelayanan yang lama dan melelahkan. Dalam Aplikasi E-Demung telah disediakan beberapa menu terkait urusan yang menjadi kewenangan kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 28 Tahun 2015 yaitu IMB, Rekomendasi IMB, IPPT, IUMK dan rekomendasi IUMK.

Kemudahan dari aplikasi ini adalah masyarakat tidak perlu datang ke kantor camat untuk mengantarkan persyaratan perizinan karena cukup menggunakan aplikasi e-demung.

3. Inovasi “Sejelo Nyambang Desa” Kecamatan Lingsar

Inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Lingsar dalam melaksanakan fungsi pembinaan adalah dengan diadakannya Kegiatan “Sejelo Nyambang Desa” dalam rangka melakukan pembenahan terhadap penataan system dan tertib administrasi desa dirangkaikan dengan penyelenggaraan PATEN Kecamatan di Tingkat Desa.

Dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan berdasarkan RPJMD Lombok Barat tahun 2019-2024, salah satu strategi dan arah kebijakan pembangunan adalah melakukan inovasi daerah.

Beberapa inovasi daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Center Plan Clinic (CPC)
2. Gerakan Terpadu Kejar Paket (Gardu Jacket)
3. Gerakan Terpadu Pemberdayaan Produk Lokal (Gardu Doa)
4. Gerakan Berpijak (Beriuk Piak Jamban Keluarga Sehat)
5. Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (Gerasak)
6. Gerakan Terpadu Penanganan Stunting (Gardu Santun)
7. Gerakan Terpadu Pembangunan Gili Gede
8. Desa Wisata
9. Gerakan Anti “Merariq Kodeq” (GAMAK)

B. PRESTASI KERJA

Prestasi merupakan hasil atas usaha yang dilakukan oleh seseorang. Prestasi dapat dicapai dengan kemampuan intelektual, spiritual dan emosional serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Sedangkan Prestasi Kerja adalah hasil yang diperoleh dari usaha kerja yang telah dilakukan, baik secara perseorangan maupun secara berkelompok (perusahaan/instansi). Prestasi kerja suatu instansi sangat dipengaruhi oleh kinerja dari para pegawainya. Dan untuk mewujudkan sebuah prestasi dalam suatu perangkat daerah, dibutuhkan kerjasama dan dedikasi yang tinggi diantara para pegawainya. Begitu juga dengan Pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat terus berusaha untuk berbenah dalam prestasi kerja yang diraih.

Prestasi Kerja yang diraih Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada tingkat Provinsi dan Nasional antara lain :

1. Penghargaan atas hasil Evaluasi Sakip dengan Predikat “B” dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara



2. Penghargaan terbaik Ketiga Nasional sebagai Kabupaten dengan Kepatuhan Terbaik dengan Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman RI.



3. Penghargaan Apresiasi pada Peringatan Hari Aksara Internasional ke-54 dalam rangka Percepatan Penuntasan Buta Aksara dari Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI



4. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional 2019 dari Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI



5. program kampung iklim dengan kategori Pratama dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan RI



6. Penghargaan atas kinerja baik dalam penyelenggaraan penataan ruang dari Menteri Agraria dan Tata ruang / Badan Pertanahan Nasional



7. Penghargaan atas Pengguna mail.go.id terbanyak dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI



8. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tk.Provinsi NTB Tahun 2019 dari Komisi Informasi Prov.NTB



9. Penghargaan atas Prestasi sebagai Juara Pertama Lomba Desa dan Kelurahan Tk.Provinsi dari Kementerian Dalam Negeri RI



10. Penghargaan atas Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan



11. Piagam Penghargaan sebagai Kepala Daerah yang telah berpartisipasi mendukung Program Moderasi beragama dan Penguatan fungsi Penyuluh Agama dari Menteri Agama RI



12. Piagam Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atas Jasa dan Dharma Bakti dalam memajukan Kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI



13. SNI ISO Quality Management System Dinas Tenaga Kerja Kab.Lobar



14. Penghargaan Pemenang Green Silver atas Pelestarian Lingkungan Desa Wisata Sesaot dari Menteri Pariwisata RI



15. Sertifikat Akreditasi B Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat



16. Pada Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja telah mendapatkan akreditasi ISO 9001:2015. ISO 9001:2015 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu produk/jasa yang dihasilkannya.

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020, berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Bab III dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian terhadap 18 sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dapat diketahui keseluruhannya masuk dalam kategori **Sangat Baik** kecuali **indikator Nilai Realisasi Investasi PMA** yang kategori **Sangat Kurang**. Pencapaian indikator sasaran strategis pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		Rata-rata Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	102,55	SB
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Opini BPK	100,00	SB
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	3	Nilai AKIP Daerah	88,55	B
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	4	Persentase Wilayah Terhubung Dengan Pusat Perekonomian	90,87	SB

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		Rata-rata Capaian (%)	Kategori
5	Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	5	Persentase Rumah layak Huni	116,31	SB
		6	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Terhadap air Minum	101,71	SB
6	Meningkatnya Daya saing Sektor Ekonomi Unggulan	7	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	92,66	SB
		8	Nilai PDRB Perkapita	87,94	B
		9	Nilai Realisasi Investasi		
			Nilai PMDN (Fasilitasi)	151,52	SB
			Nilai Realisasi Investasi PMA	16,22	SK
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	10	Indeks Gini Ratio		
		11	Persentase Angka Kemiskinan	104,8	SB
		12	TPT	56,88	K
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13	UHH	100,15	SB
9	Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan	14	Persentase HLS	103,86	SB
		15	Persentase RLS	102,56	SB
10	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	16	Kabupaten Layak Anak (KLA)	100,00	SB
		17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100,06	SB
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	18	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	122,76	SB
12	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB)	19	Indeks risiko Bencana (IRB))	95,01	SB
Rata-rata Capaian				128,65	

Dari 12 Sasaran Strategis dengan 19 indikator kinerja yang ada, dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 100% atau bermakna Sangat Baik, namun ada 2 capaian indikator kinerja per sasaran strategis yang mendapat kategori Baik yaitu **Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja** dengan **Indikator Kinerja Nilai AKIP Daerah** pencapaian rata-rata 88,55 % dan **Sasaran Strategis Meningkatnya Daya saing Sektor Ekonomi Unggulan** dengan **Indikator Kinerja Nilai PDRB Perkapita** pencapaian rata-rata 87,94%. Dan 1 Sasaran Strategis yang rata-rata pencapaian kinerja yang dengan kategori Sangat kurang yaitu **Sasaran Strategis Meningkatnya Daya saing Sektor Ekonomi Unggulan** dengan Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA rata-rata pencapaian sebesar 16,22 %. Serta 1 Sasaran Strategis yang rata-rata pencapaian kinerja yang dengan kategori kurang yaitu **Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat** dengan Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Rata-rata pencapaian sebesar 56,88 %.

Untuk meningkatkan kinerja daerah, maka pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan lima program prioritas pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Pembangunan pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas. Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya meningkatkan daya saing sektor ekonomi unggulan dan meningkatnya kemandirian masyarakat. Prioritas ini bertujuan untuk (a) peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan dan tingkat pengangguran; (b) peningkatan kinerja ekonomi daerah melalui kemitraan antar pelaku usaha, pemberdayaan masyarakat dan menciptakan Wirausaha baru, serta menyediakan sarana prasarana perekonomian kreatif, peningkatan keberpihakan terhadap pengembangan dan penggunaan produk lokal; (c) peningkatan produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kunjungan

wisatawan; (d) peningkatan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata serta promosi dan pemasaran pariwisata, (f) peningkatan peran Lembaga Ekonomi Perdesaan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat; (g) peningkatan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran melalui peningkatan keberagaman pola konsumsi masyarakat serta meningkatkan kewaspadaan pangan; peningkatan pelatihan produktivitas dan pengembangan penempatan tenaga kerja dan upaya transmigrasi swakarsa serta pembinaan pemuda dan olah raga.

2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan sumber daya manusia Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas dan kapasitas sumberdaya manusia yang unggul melalui (a) peningkatan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dan lansia; (b) peningkatan pengetahuan dan keterampilan gizi masyarakat; (c) revitalisasi posyandu; (d) pemenuhan cakupan JKN 100%; (d) pemenuhan sarana dan prasarana Puskesmas sesuai ASPAK; (e) optimalisasi pengelolaan DAK Non Fisik Kesehatan; (f) peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatkan Akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau; (g) peningkatan pelestarian cagar budaya; (h) Meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif; (i) Meningkatkan pengendalian kelahiran penduduk; (j) Meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan dan pendidikan.
3. Peningkatan Konektivitas dan infrastruktur wilayah Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya percepatan terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan Hal tersebut dilakukan dengan cara: (a) Meningkatkan jalan mantap, (b) Meningkatkan ketersediaan moda transportasi; (c) Meningkatkan ketersediaan rumah layak

- huni; (d) Meningkatkan akses rumah tangga dengan sanitasi layak; (e) Meningkatkan akses rumah tangga dengan air minum layak.
4. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan daerah yang berkualitas Prioritas ini ditetapkan untuk mencapai tujuan pemenuhan SPM yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan ketahanan daerah pasca bencana melalui : (a) penurunan pencemaran air sungai; (b) peningkatan perlindungan mata air; (c) peningkatan pengelolaan sampah; (d) peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan (e) Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan risiko bencana. Dalam rangka penanganan bencana pasca Covid-19, pada tahun 2021 diarahkan pada : Mendorong pemulihan industry pariwisata dan pariwisata berbasis desa; Mendorong pemulihan ekonomi dengan kemudahan berinvestasi dan kesempatan berusaha; Mendorong aktivitas industry olahan, perdagangan dan UMK; Memberikan stimulus dalam upaya peningkatan PAD dari PBB; Efisiensi belanja melalui peningkatan kinerja ASN; dan Mitigasi bencana.
 5. Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola dan pemerintahan yang baik dan bersih dengan cara : (a) meningkatkan kualitas pelayanan publik; (b) meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah; (c) meningkatkan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja. Pada tanggal 4 April 2019, terdapat komitmen bersama seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk kerjasama daerah dalam hal : 1) Pengelolaan sampah berbasis Zero Waste; 2) Revitalisasi Posyandu; 3) Pengembangan Desa Wisata; 4) Penanggulangan Kemiskinan; dan 5) Mitigasi Bencana. Beberapa poin tersebut telah disepakati bersama melalui MoU atau kesepakatan bersama dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa program dan kegiatan di Kabupaten Lombok Barat yang mendukung prioritas provinsi tersebut telah termuat juga dalam prioritas pembangunan di tahun 2021 seperti

Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial, Program Ketahanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Program pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil. Prioritas provinsi Mitigasi Bencana di dukung melalui Program Penanganan Kedaruratan dan Logistik di BPBD, selanjutnya prioritas terkait pengelolaan sampah berbasis zero waste di dukung melalui program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup. Untuk prioritas pengembangan desa wisata pemerintah Kabupaten Lombok Barat memberikan dukungan pada Program pengembangan destinasi pariwisata di Dinas Pariwisata selain menerbitkan Peraturan Bupati terkait pengembangan desa wisata di Kabupaten Lombok Barat sebagai bentuk komitmen daerah dalam mengaplikasikan sustainable tourism development. Sementara prioritas revitalisasi Posyandu di dukung melalui program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan melakukan peningkatan kapasitas pada kelembagaan Posyandu.

Dalam tahun anggaran 2020, untuk pencapaian 12 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja utama pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2019-2024, telah dianggarkan melalui APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 1,893,671,160,410.53 dengan realisasi sebesar 1,784,074,477,631.73 atau 94,21%.

Dalam upaya meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pada tahun-tahun berikutnya, maka perlu dilakukan beberapa perbaikan yaitu terkait dengan perumusan indikator kinerja daerah, maupun indikator kinerja utama pada tiap-tiap OPD agar dapat lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, berdasarkan kondisi senyatanya yang dihadapi, dan memiliki jangka waktu dalam pencapaiannya. Berkaitan dengan

penggunaan sumberdaya (anggaran) dalam mencapai target yang ditetapkan, perlu dilakukan analisis standar kebutuhan anggaran terhadap target yang ingin dicapai agar target yang ditetapkan tidak terlalu tinggi atau rendah.

Semoga Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah kabupaten Lombok Barat ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat, untuk mewujudkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanya milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di kemudian hari.

Gerung, Maret 2021
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID, S.Ag, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
INSPEKTORAT

Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung Telp (0370) 6186366
Fax. (0370) 6186366, Kode Pos 83363 E-mail: inspektoratkablobar@gmail.com ;
Website: www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id

PERNYATAAN REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gerung, 26 Maret 2021



H. ILHAM, S.Pd. M.Pd
Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651231 198803 1 240

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2019-2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH dan PIHAK PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	nilai	Pihak Independen	Bappeda, Setda, Inspektorat	Semua OPD
2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK	Opini	BPK	BPKAD	Semua OPD
3 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Daerah	3 Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Huruf dan Angka	Kementerian PAN dan RB	Bappeda, Setda, Inspektorat	Semua OPD
4 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	4 Persentase Wilayah terhubung dengan pusat-pusat perekonomian	(Pasar Dapat Dilalui Roda 4*Objek Wisata Dapat Dilalui Roda 4*Pasar Memiliki Trayek*Objek Wisata Memiliki Trayek)/0,25	Indeks composi	FU,perindag,Dichub	Dichub	Dichub,Dicperindag, dan PUTR
5 Meningkatnya akses infrastruktur dasar	5 Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100$	%	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas PUTR
	6 Persentase Masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	%	Dinas PUTR	Dinas PUTR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan	Dinas PUTR
	6 Meningkatkan Daya Saing sektor ekonomi unggulan	7 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Nilai Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$	%	Bapenda dan BPKAD	Bapenda
	8 Nilai PDRB Perkapita	PDRB Perkapita	Rp.Juta	BPS	Seluruh OPD	Seluruh OPD
	9 Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi :					
	PMDN	Nilai Realisasi PMDN (Facilitas) tahun yg dihitung	Rp. Milyar	DPMPTSP	DPMPTSP	Dinas PUTR, Pariwisata dan SETDA
	PMA	Nilai Realisasi PMA tahun yg dihitung	\$ juta			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH dan PIHAK PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 Meningkatkan Kemandirian ekonomi masyarakat	10 Indeks Gini Ratio	$G = 1 - \sum f_i (Y_i + Y_{i+1})$ <p>G = Ratio Gini f_i = Proporsi Rumah Tangga dim Klt i Y_i = Proporsi Jumlah Kumulatif RT dim Klt i Y_{i+1} = Proporsi jumlah kumulatif pendapatan dim Klt i</p>	Indeks	Badan Pusat Statistik	Disperindag, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata dan Badan Ketahanan Pangan Daerah	Dinsoc, Dincaker, Koperasi, DPMD, DP2KBPSA
	11 Persentase Angka Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk dibawah garis kemiskinan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	%	Badan Pusat Statistik	Dinsoc, Dukcapil, Dinas Ketahanan Pangan	Seluruh OPD, Forum CSR, BAZNASDA dan Pemerintah Desa
	12 Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah orang yang tidak bekerja}}{\text{Jumlah angkatan Kerja}} \times 100$	%	Badan Pusat Statistik	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Disperindag, Diskop dan UKM, Dinas Pertanian, Perikanan, Pariwisata
8 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	13 Usia Harapan Hidup	$\frac{\text{Jumlah umur semua penduduk yg meninggal}}{\text{Jumlah penduduk yang meninggal}}$	Tahun	Badan Pusat Statistik	Dinas Kesehatan	Semua OPD
9 Meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan	14 Rata-rata Lama Sekolah	$RSL = \frac{\sum_{i=1}^n (L_i \times P_i)}{\sum_{i=1}^n P_i}$ <p>Rata-rata Lama Sekolah (RSL) adalah rata-rata jumlah tahun pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. RSL dihitung berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSEN) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). RSL menunjukkan tingkat literasi dan keterampilan penduduk yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.</p>	tahun	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Seluruh Perangkat Daerah
	15 Harapan Lama Sekolah	$HLS = \sum_{i=1}^n \frac{P_i \times L_i}{\sum_{i=1}^n P_i}$ <p>Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah rata-rata jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. HLS dihitung berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSEN) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). HLS menunjukkan tingkat literasi dan keterampilan penduduk yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.</p>	tahun	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Seluruh Perangkat Daerah
10 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16 Kabupaten Layak Anak	Pemilihan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Skor	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBPSA	Bappeda, DP2KBPSA, DPMD, Diker dan PIK.
	17 Indeks Pembangunan Gender	$\frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}} \times 100$	Skor	BPS	Bakcerbangpoidagri, Satpol PP, BPED, Damkar	Seluruh Perangkat Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH dan PIHAK PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	18 Indekst Kualitas Lingkungan Hidup	(Indekst Kualitas Air x 30%) + (Indekst Kualitas Udara x 30%) + (Indekst Kualitas Tutupan Lahan x 40%)	Indekst	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Semua OPD dan Masyarakat
12 Menurunnya Risiko Bencana	19 Indekst Risiko Bencana	Indekst Ancaman x Indekst Kerentanan	Indekst	BPBD	BPBD	Dinas Pemadam Kebakaran, SatPOLPP, Kesbang, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
		Indekst Kapasitas Daerah				

BUPATI LOMBOK BARAT.

H. FAUZAN KHALID



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : H. FAUZAN KHALID, S.Ag.,M.Si.

J A B A T A N : BUPATI LOMBOK BARAT

Berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Gerung, Januari 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID, S.Ag.,M.Si.

LAMPIRAN :
PERJANJIAN KINERJA
BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2020

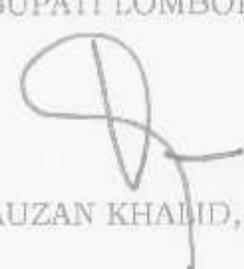
PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	82,89
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Daerah	3	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Huruf dan Angka	BB (71,00)
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	4	Persentase Wilayah terhubung dengan pusat-pusat perekonomian	Indeks composit	76,55
5	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	5	Persentase Rumah Layak Huni	%	83,98
		6	Persentase Masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum	%	79,76
6	Meningkatnya Daya Saing sektor ekonomi unggulan	7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	13,18
		8	Nilai PDRB Perkapita	Rp.Juta	17,83
		9	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi :		
		PMDN	Rp. Milyar	121,39	
		PMA	\$ juta	536,12	
7	Meningkatnya Kemandirian ekonomi masyarakat	10	Indeks Gini Rasio	Indeks	< 0,3
		11	Persentase Angka Kemiskinan	%	15,00
		12	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,20

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
8 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	13 Usia Harapan Hidup	Tahun	66,84
9 Meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan	14 Rata-rata Lama Sekolah	tahun	6,25
	15 Harapan Lama Sekolah	tahun	13,20
10 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16 Kabupaten Layak Anak	Skors	30,00
	17 Indeks Pembangunan Gender	Skors	89,00
11 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	55,41
12 Menurunnya Risiko Bencana	19 Indeks Risiko Bencana	Indeks	150,39

NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp 290.524.639.115,91
2	Prog Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keu Daerah	Rp 7.364.434.000,00
3	Program Peningkatan AKIP Daerah	Rp 14.998.441.879,00
4	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Rp 97.511.598.800,00
5	Prog Peningkatan Akses Air Minum Layak	Rp 13.334.860.000,00
6	Program Peningkatan RLH	Rp 61.156.010.788,60
7	Program Peningkatan Pembangunan Ekonomi	Rp 15.335.917.700,00
8	Program Peningkatan PDRB Sektor Unggulan	Rp 93.126.923.648,00
9	Program Peningkatan Investasi	Rp 510.361.000,00
10	Program Pemerataan Pembangunan	Rp 2.292.884.800,00
11	Program Penanggulangan Kemiskinan	Rp 23.229.377.174,00
12	Program Penurunan Angka Pengangguran	Rp 10.497.093.750,00
13	Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Rp 303.484.249.330,03
14	Program Peningkatan Rata- Rata Lama Sekolah	Rp 36.234.610.400,00
15	Program Peningkatan Harapan Lama Sekolah	Rp 6.558.006.305,00
16	Program Pengarusutamaan Gender	Rp 5.941.499.000,00
17	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Rp 61.175.862.542,70
18	Program Penanggulangan Bencana	Rp 3.378.065.600,00
JUMLAH		Rp 1.046.654.835.833,24

BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID, S. Ag., M. Si.